

**PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN: KEHIDUPAN ETNIS
TIONGHOA DI GLODOK (1955-1969)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra



oleh:

Shintia Astiagyna
07407141020

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Perjanjian Dwikewarganegaraan: Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok 1955-1969” ini telah disetujui pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, Mei 2012

Pembimbing

Miftahuddin, M. Hum.

NIP. 19740302 200312 1 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Perjanjian Dwikewarganegaraan : Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok (1955-1969)* ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada 23 Mei 2012 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Dina Dwikurniarini, M. Hum	Penguji Utama		22 Juni 2012
Drs. Djumarwan	Ketua Penguji		22 Juni 2012
H.Y. Agus Murdiyastomo, M. Hum	Sekretaris Penguji		22 Juni 2012
Miftahuddin, M. Hum	Penguji Pendamping		22 Juni 2012

Yogyakarta, Juni 2012

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.

19620321 198903 1 001

MOTTO

“Jika Kamu Bersabar untuk Bersusah Payah Sebentar Saja Maka Pasti Kamu Akan
Menikmati Kesenangan yang Sangat Banyak”

(Shintia Astiagyna)

“Bukanlah Keindahan Itu Pada Pakaian yang Menghiasi Diri Kita Namun
Sesungguhnya Keindahan Adalah yang Berilmu dan Budi Pekerti”

(Shintia Astiagyna)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa yang tidak hentinya berdoa untuk saya. Terima kasih juga pada Irwan sebagai motivator dan selalu setia mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shintia Astiagyna

NIM : 07407141020

Program studi : Ilmu sejarah

Jurusan : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Judul : Perjanjian Dwikewarganegaraan: Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok 1955-1969

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul di atas benar-benar hasil karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis skripsi ini tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali beberapa bagian yang diambil penulis sebagai bahan acuan. Apabila kelak di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka segala akibat yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 22 Juni 2012

Shintia Astiagyna

07407141020

PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN: KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA DI GLODOK 1955-1969

Oleh: Shintia Astiagyna
NIM: 07407141020

Abstrak

Perjanjian Dwikewarganegaraan merupakan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai kewarganegaraan ganda. Perjanjian ini diresmikan oleh menteri luar negeri Soenario dan Chou En Lai pada 22 April 1955 di Bandung. Timbulnya dwikewarganegaraan bersumber pada adanya dua asas yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur kewarganegaraan suatu negara, *Ius soli* atau berdasarkan tempat kelahiran dan *Ius sanguinis* atau berdasarkan keturunan. Penggunaan asas yang berbeda dari setiap negara itulah yang akhirnya menimbulkan dwikewarganegaraan. Mereka yang merupakan golongan dwikewarganegaraan terbanyak diantaranya golongan keturunan Tionghoa. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Perjanjian dwikewarganegaraan serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap etnis Tionghoa di Glodok.

Penulisan skripsi ini menggunakan metodesejarah kritis. Pertama heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber, merupakan tahap pengkajian terhadap kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan sejarah yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dwikewarganegaraan dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah Indonesia untuk membentuk satu bangsa yang homogen, sehingga tidak ada lagi timbulnya kewarganegaraan ganda. Dalam pemilihan kewarganegaraan, orang Tionghoa diberi kesempatan untuk memilih dalam jangka waktu 2 tahun (1960-1962). Janji yang diberikan oleh pemerintah kepada etnis Tionghoa yaitu diperlakukan hak yang sama dan tidak ada unsur paksaan untuk pilihannya. Dalam kenyataannya, untuk mengurus surat-surat pernyataan untuk menjadi kewarganegaraan Tiongkok maupun WNI dipersulit. Selain itu untuk menghindari adanya diskriminasi, kelompok asimilasi menganjurkan untuk anak-anak Tionghoa agar diubah menjadi nama Indonesia. Penggantian nama ini telah dilakukan hampir seluruh orang Tionghoa di Glodok yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia. Di tahun 1959 pemerintah membatasi orang tionghoa dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah no.10. Peraturan Presiden ini tidak berlaku di Jakarta khususnya di Glodok. Selama adanya PP tersebut, orang Tionghoa di Glodok mengungsi ke kampung Selam (Islam) yang berada di daerah Krukut, Jakarta Pusat dan Pekojan, Jakarta Barat.

Kata Kunci: *Perjanjian Dwikewarganegaraan, Etnis Tionghoa, Glodok*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan yang diridhoi-Nya yakni ajaran Islam.

Skripsi yang berjudul “Perjanjian Dwikewarganegaraan: Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok 1955-1969” akhirnya dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat meraih gelar Sarjana Sastra di Universitas Negeri Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini dapat berjalan berkat dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak di bawah ini yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

1. Bpk. Miftahuddin, M. Hum, yang telah membimbing selama mengerjakan skripsi.
2. Ibu Dina Dwi Kurniarini, M. Hum, selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Sejarah dan Pendidikan Sejarah yang sudah membimbing selama masa perkuliahan.
4. Mama dan Papa yang selalu memberikan doa dan semangat, baik secara materiil maupun moril.
5. Irwan yang telah membantu penulis untuk selalu bersemangat dalam mengerjakan skripsi.

6. Desyari Widi Astuti, Edwin Wahyuni, dan Septi Utami. Kebersamaan kita tidak akan pernah aku lupakan
7. Teman-teman Ilmu, Altav, Agung, Anas, Ardi, Ari, Arfin, Ike, Uni, Ninda, Edo, Dana, Wisnu, Eko, Fatah, Ghufon, Gilang yang selalu kompak selama perkuliahan.
8. Ayu, Tante Mia, Bude, Mbah Kakung dan Mbah Putri yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi.
9. Pak Dahana, Pak Liem Tjoe Tek, Pak Hendra Tan, Pak Sukiman, Pak The Bian Nio, Pak Iwan, Pak Sunardi, Bu Lisa, Pak Wanandi, Pak Riyanto, Pak Sanusi yang telah bersedia menjadi informan.
10. Teh Fajar, Teh Daisy, Bu Ani dan seluruh Staf ANRI yang telah membantu dalam pencarian arsip.
11. Staf BPS Prov. Jakarta dan Staf Dept. Kehakiman RI yang telah membantu dalam pencarian statistik dan dokumen Negara.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada pihak-pihak tersebut di atas yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan.

Yogyakarta, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	hlm
HALAMANJUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Historiografi yang Relevan.....	12
G. Metode dan Pendekatan Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. EKSISTENSI ETNIS TIONGHOA DI GLODOK	
A. Jakarta Sebelum Tahun 1950.....	26
B. Jakarta sebagai Kota Pendatang.....	30
C. Faktor-Faktor Pendukung Migrasi Etnis Tionghoa keJakarta.....	34
D. Etnis Tionghoa di Jakarta	39

BAB III. KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA	
A. <i>Nederlandschap</i> : Kewarganegaraan Belanda	44
B. Sistem Kewarganegaraan Indonesia Setelah Merdeka....	47
C. Perjanjian Dwikewarganegaraan: Indonesianisasi terhadap Warga Negara Indonesia KeturunanTiongkok.....	53
1. Pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan.....	53
2. Indonesianisasi terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tiongkok.....	61
BAB IV. DAMPAK PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN RI- RRT DI GLODOK TAHUN 1955-1969	
A. Bidang Sosial: Asimilasi (Pembauran Dua Kebudayaan).....	68
B. Bidang Ekonomi: Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959.....	77
C. Bidang Politik: Masyarakat Tionghoa dalam Politik.....	87
D. Bidang Pendidikan: Sekolah-sekolah Tionghoa ditutup.....	91
BAB V. KESIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	104

DAFTAR ISTILAH

amalgamasi	: perkawinan campur
apatis	: acuh tak acuh, masa bodoh
asimilasi	: peleburan
bipatride	: orang yang mempunyai dua kewarganegaraan
Cina Town	: Pecinaan, Kampung Tionghoa
dasawarsa	: sepuluh tahun
distrik	: bagian kota/negara yang dibagi untuk tujuan tertentu
entrepot	: gudang
Europeanen	: orang Eropa
hainan	: suku bangsa tionghoa yang berasal dari Tiongkok Utara
hakka	: suku bangsa tionghoa yang berasal dari Tiongkok Selatan
hokkien	: suku bangsa tionghoa yang berasal dari Tiongkok Selatan
homogen	: terdiri atas jenis, macam, sifat, watak
infiltrasi	: campur tangan
implementasi	: pelaksanaan, penerapan yang telah disepakati
imlek	: tahun baru Cina
Inlanders	: pribumi
ius soli	: berdasarkan azas tempat kelahiran
ius sanguinis	: berdasarkan azas keturunan
imigran	: orang yang datang dari negara lain dan menetap di suatu Negara

image	: gambar, kesan
integrasi	: pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh
komprang	: sangat longgar
kota satelit	: kota yang terletak di pinggir atau berdekatan dengan kota besar
Karesidenan	: bagian dari provinsi
kawula	: rakyat dari suatu negara
koloni	: tanah jajahan
Koninkrijk Jacatra	: Kerajaan Jayakarta
kastil	: Istana
Meester Cornelis	: Jatinegara
minoritas	: golongan sosial yang jumlahnya sedikit
mayoritas	: jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu
momok	: sesuatu yang menakutkan karena berbahaya
migrasi	: perpindahan penduduk ke suatu tempat atau negara
melting plot	: pencairan petak
master plan	: pola induk / rencana buruk
Nederlanderschap	: kewarganegaraan Belanda
Nederlander	: orang Belanda
Nederlands Onderdaan	: warga negara Belanda
naturalisasi	: kewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
national building	: pembangunan nasional

peranakan	: keturunan anak orang asing; Tiongkok, India, Arab
passenstelsel	: skema
pantalón	: celana yang panjangnya sampai ke mata kaki
potia/pachter	: hak atas pengolah tanah
ras	: golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik
repatriasi	: pemulangan kembali orang ke tanah airnya
reenifikasi	: penyatuan kembali
saudagar	: orang yang memperdagangkan sesuatu dalam jumlah besar
singkek	: orang Tionghoa totok
stateless	: tanpa kewarganegaraan
Tiongkok	: istilah ini digunakan untuk merujuk pada negara Tiongkok
Tionghoa	: orang keturunan Tiongkok di Indonesia
teochew	: suku bangsa tionghoa yang berasal dari Tiongkok Selatan
urban	: orang yang berpindah dari desa ke kota
Vreemde Oosterlingen: orang Timur asing	
veteran	: mantan prajurit
weltevreden	: merasa senang
wijkenstelsel	: sistem kota

DAFTAR SINGKATAN

Baperki	: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
Baperwatt	: Badan Permusyawaratan Warganegara Turunan Tionghoa
dpl	: di atas permukaan air laut
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
Dubes	: Duta Besar
KAA	: Konferensi Asia Afrika
Kepres	: Keputusan Presiden
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KSAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
LN	: Lembar Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RT	: Rukun Tetangga
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
SBKI	: Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia
VOC	: Verenigde Oost Indische Compagnie
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNO	: Wet op liet Nederlandsch Onderdaanschap

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Responden.....	104
Lampiran 2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954	105
Lampiran 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1960	112
Lampiran 4. Pertukaran Nota RI-RRT.....	115
Lampiran 5. UU Kewarganegaraan RI no. 62 tahun 1958	120
Lampiran 6. Surat Pernyataan untuk menjadi WNI.....	132
Lampiran 7. Peta Glodok, Jakarta	133
Lampiran 8. Peta Intensitas Migrasi ke Jakarta tahun 1961.....	134
Lampiran 9. Keputusan Presidium Kabinet no. 127 tahun 1966.....	135
Lampiran 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 6 tahun 1969.....	138
Lampiran 11. Tabel 1. Jakarta berdasarkan suku bangsa tahun 1960.....	140
Lampiran 12. Tabel 2. Jumlah Permohonan Naturalisasi di Jakarta tahun 1960.	141

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal kedatangan etnis Tionghoa¹ ke Indonesia yaitu melalui migrasi. Para imigran dari Tiongkok menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke Nusantara. Pendatang dari Tiongkok tersebut semuanya laki-laki, mereka menikah dengan perempuan lokal. Sejak itu muncul sebuah ras campuran baru, yaitu golongan peranakan. Anak-anak mereka dibesarkan oleh ibu bangsa pribumi yang kehilangan bahasa Tiongkok dan berbicara menggunakan bahasa lokal. Pemukiman-pemukiman kecil orang Tionghoa sudah ada di Indonesia jauh sebelum kedatangan orang Eropa, terutama bandar-bandar perdagangan disepanjang pantai utara Pulau Jawa. Ketika Belanda memantapkan kedudukannya di Jawa, penduduk Tionghoa bertambah banyak dan tersebar luas.

Pemerintah Hindia Belanda dengan propagandanya telah menciptakan pemisahan tingkatan (stratifikasi) sosial dalam masyarakat Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda membagi penduduknya dalam 3 golongan, yaitu *Europeanen*, *Vreemde Oosterlingen*, *Inlanders* (golongan Eropa, Arab, India, Tionghoa dan

¹ Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari kata-kata bahasa kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, artinya adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965. Penamaan Tionghoa itu merupakan kata yang baku dan netral, sedangkan Cina itu bertendensi menghina. Lihat Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 257. Untuk itu penulis menggunakan istilah Tionghoa untuk menghormati masyarakat Tionghoa.

pribumi) berdasarkan kategori rasial.² Etnis Tionghoa dijadikan mitra bisnis dalam mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan perang. Orang-orang Tionghoa ini memulai peranannya dari seorang kuli pada tambang timah, seorang penjual klontong atau pedagang kecil kemudian berubah menjadi pengusaha, pemilik perkebunan ataupun seorang pedagang yang kaya.³ Pemerintah Hindia Belanda hanya memanfaatkan peranan orang Tionghoa untuk mengelola daerah perkebunan, dan pertambangan timah mereka.⁴ Pada saat itu pula orang-orang Tionghoa membentuk suatu kelompok sendiri, sampai munculnya kecemburuan sosial antara pribumi dengan orang-orang Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda menempatkan orang Tionghoa sebagai warga negara kelas dua, setelah bangsa Belanda dan penduduk pribumi dijadikan sebagai bangsa kelas bawah.

Dampak dari strasifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut adalah timbulnya kebencian dan kemarahan bangsa pribumi terhadap etnis Tionghoa. Hal ini dikarenakan pribumi menganggap etnis Tionghoa telah membantu dan bersekutu dengan pemerintah Hindia Belanda. Belanda kemudian memberikan berbagai fasilitas dan wewenang yang sangat terbuka terhadap berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan etnis Tionghoa. Akan tetapi, orang asing yang berada di wilayah Hindia Belanda dibatasi dalam hal kebebasan yang pada

² Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT.Temprint, 1984), hlm. 4.

³ Slamet Martosudiro, *Penyelesaian Masalah Cina Perantauan: Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional*, *PRISMA*, (Jakarta: LP3ES, 1973), hlm. 23.

⁴ Stuart W Greif, *WNI: Problematik Orang Indonesia asal Cina*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hlm. 2-3.

intinya mereka harus tetap tunduk pada penguasaan Pemerintah Belanda.⁵ Pembatasan kebebasan ini diakhiri setelah adanya peraturan-peraturan khusus mengenai pengawasan terhadap warganegara.⁶

Berkaitan dengan paham nasionalisme yang sedang berkembang, setiap negara yang berdaulat dapat menentukan sendiri siapa saja yang menjadi warganegaranya. Negara-negara bebas untuk memilih asas-asas yang dipakai dalam mengatur kewarganegaraan warganegaranya. Perbedaan asas kewarganegaraan ini merupakan timbulnya masalah dwikewarganegaraan (*bipatridie*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatridie*). Dalam menentukan kewarganegaraan dikenal dua asas yang digunakan, yaitu asas kelahiran (*ius soli*) dan asas keturunan (*ius sanguinis*).

Pemerintah Hindia Belanda pernah membuat dua peraturan yang menyangkut kewarganegaraan orang asing di Hindia Belanda.

1. Di tahun 1892 tertera dalam *Nederlanderschap (Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap)*.⁷ Undang-undang ini didasarkan atas asas keturunan, bahwa seseorang yang dilahirkan dari seorang yang berstatus Belanda, adalah *kawula*⁸ Belanda (*Nederlanders*).

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶ Gouw Giok Siong, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Jakarta: Keng Po, 1958), hlm. 5. Tertera juga dalam Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1954 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia, lihat lampiran 2.

⁷ Peraturan ini tertera pada *Staatsblad* 1892 no.268.

⁸ Kawula berasal dari bahasa Jawa yang merupakan Rakyat dari suatu Negara. Gouw Giok Siong, *Op, cit.*, hlm. 3.

2. Di tahun 1910 tertera dalam *Nederlands-Onderdaanschap (Wet houdende regeling van het Nederlands onderdaanschap van niet-Nederlanders)*.⁹

Peraturan ini didasarkan atas azas kelahiran. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang menetap di wilayah Hindia Belanda adalah warga Negara Belanda (*Nederlands Onderdaan*).¹⁰ Undang-undang ini tidak memandang perbedaan penduduk di Hindia Belanda ke dalam golongan-golongan orang-orang Eropa, Timur Asing (Arab, India, Tionghoa), dan Pribumi. Mereka yang dilahirkan di Hindia Belanda dianggap sebagai *kawula* Belanda.

Masalah ini timbul saat undang-undang kewarganegaraan di Tiongkok tahun 1929 menjelaskan tentang setiap orang yang dilahirkan dari orang tua Tionghoa, dimanapun mereka berada dan berapa lama diluar wilayah Tiongkok, tetap dianggap sebagai warganegara Tiongkok.¹¹ Meskipun peranakan Tionghoa mendapat status kawula Belanda, namun dalam prakteknya mereka diperlakukan sebagai orang asing.¹²

Status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda muncul sebagai suatu masalah pokok yang berlanjut dengan diadakannya perundingan kewarganegaraan Tiongkok dengan Belanda. Perundingan kewarganegaraan tersebut mencapai sebuah persetujuan yang dikenal dengan

⁹ Peraturan ini tertera pada *Staatsblad* 1910 no. 296 mengenai hukum yang mengatur kewarganegaraan Belanda dan non Belanda.

¹⁰ *Staatsblad* 1910 no. 296, pasal I ayat 1 sub 1e.

¹¹ Gouw Giok Siong, *op.cit.*, hlm. 8-9.

¹² *Ibid*, hlm. 22.

“Perjanjian Konsuler” tahun 1911 yang isinya menyebutkan bahwa Tiongkok mengakui yuridiksi Belanda atas orang Tionghoa yang lahir diwilayah Hindia Belanda, jika mereka memang menetap diwilayah itu. Sebaliknya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diberi hak untuk mendirikan konsulat-konsulat. Akan tetapi, pemerintah Tiongkok sama sekali tidak meninggalkan klaimnya atas orang Tionghoa perantauan dengan menganggapnya tetap sebagai warga negara Tiongkok yang setia kepada negeri leluhurnya.¹³

Perjanjian Konsuler ini mulai mencerminkan lemahnya Pemerintahan Kerajaan Tiongkok yang selalu mengalah kepada negara-negara Barat. Akan tetapi, kalangan etnis Tionghoa sedang tumbuh dan berkobar rasa nasionalismenya untuk menolak *Wet op liet Nederlandsch Onderdaanschap* (WNO)¹⁴ dan Perjanjian Konsuler tahun 1911 tersebut. Undang-undang WNO tahun 1910 dan Perjanjian Konsuler tahun 1911 tidak memecahkan persoalan dwikewarganegaraan. Pada masa Hindia Belanda belum menjadi persoalan yang terlalu besar, tetapi ketika Indonesia merdeka persoalan tersebut menjadi besar.¹⁵

Hal di atas membuat pemerintah Indonesia menawarkan kewarganegaraan Indonesia kepada semua orang Tionghoa di tahun 1946. Keputusan ini dibuat untuk orang Tionghoa yang dilahirkan di Indonesia yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 5 tahun berturut-turut. Akhir tahun 1949, pemerintah

¹³ Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm. 122.

¹⁴ *Wet op liet Nederlandsche Onderdaanschap* adalah Undang-undang tentang Kawula Belanda. Undang-undang ini dibuat sebelum konsul-konsul Tiongkok diperbolehkan masuk ke Indonesia.

¹⁵ Ong Ho Kham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 92.

melakukan penertiban dan keamanan kepada orang Tionghoa dengan memberikan kesempatan untuk menjadi warganegara. Kesempatan itu berlaku selama dua tahun (1949-1951) untuk menerima atau menolaknya.¹⁶

Pada saat berjalannya Konferensi Asia Afrika (KAA) Pedana Menteri Chou En Lai menjelaskan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik atau hubungan diplomatik dengan RRT. Tukar menukar nota kesepakatan antara Pedana Menteri Ali Sastroamidjojo I dan Pedana Menteri Chou En Lai dilakukan pada tanggal 3 Juni 1955 di Peking.¹⁷ Setelah tukar menukar nota kesepakatan, dokumen tersebut mengalami perombakan-perombakan sampai terwujudnya pelaksanaan.

Peraturan pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan berlaku mulai tanggal 20 Januari 1960. Ketentuan perjanjian menyebutkan bahwa orang dewasa yang berkewarganegaraan ganda, yaitu setiap warga negara dari negara-negara yang mengadakan perjanjian (Indonesia-RRT) akan diberi waktu dua tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Kebijakan yang baru ini, memberikan pengharapan kepada orang Tionghoa di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sekaligus meminimalisir adanya ras diskriminasi bagi masyarakat Tionghoa.

¹⁶ Stuart W Greif, *op.cit.*, hlm. 10-11.

¹⁷ Tertera dalam UU No. 2 tahun 1958 tentang persetujuan RI dan RRT mengenai dwikewarganegaraan.

B. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan tetap berada pada lingkup yang sesuai serta selalu terarah, sehingga dapat dicapai solusi yang tepat pada pokok permasalahan. Adapun pertanyaan–pertanyaan yang berhubungan dengan masalah ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia atas kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia?
2. Bagaimana etnis Tionghoa mendapatkan kewarganegaraannya di Indonesia?
3. Apa saja pengaruh–pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan kewarganegaraan tersebut terhadap etnis Tionghoa di Glodok?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Sebagai sarana efektif dalam upaya penerapan metodologi penelitian sejarah.
 - b. Untuk melatih daya pikir yang kritis analisis serta objektif dalam menganalisa suatu peristiwa sejarah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memberikan gambaran kehidupan etnis Tionghoa dengan adanya persoalan dwikewarganegaraan
 - b. Memberikan gambaran tentang dampak dari dilaksanakannya perjanjian dwikewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai tolak ukur kemampuan dalam meneliti menganalisa dan merekonstruksi suatu penulisan sejarah.
- b. Dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang pengaruh dari perjanjian dwikewarganegaraan terhadap etnis Tionghoa di Glodok.

2. Bagi Pembaca

- a. Pembaca diharapkan memperoleh gambaran yang jelas berkenaan dengan proses perjanjian dwikewarganegaraan hingga dampak dari dilaksanakannya perjanjian dwikewarganegaraan di Glodok.
- b. Menambah wawasan kesejarahan pembaca sehingga dapat menilai secara kritis dan objektif terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa Indonesia yang lain pada masa lampau.

E. Kajian Pustaka

Kewarganegaraan adalah masalah yang sangat penting, karena status kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan suatu negara. Seorang warganegara yang tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas akan mengalami kesulitan hidup karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dalam suatu negara.¹⁸ Status kewarganegaraan juga akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah hubungan antara anak dan orang tua, pewarisan, perwalian, maupun

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 115.

pengampunan. Hal ini dapat terjadi karena hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang apabila berhadapan dengan Negara. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan seseorang ada 3 (tiga), yaitu (1) unsur darah keturunan (*ius sanguinis*), (2) unsur daerah tempat kelahiran (*ius soli*), dan (3) unsur pewarganegaraan (*naturalisasi*).¹⁹

Masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa ini mencapai puncaknya ketika Indonesia telah memegang kekuasaannya. Persoalan dwikewarganegaraan yang timbul pada masa Hindia Belanda yaitu Kekawulanegaraan Belanda (*Nederlands Onderdaanschap*) sangat penting untuk kewarganegaraan Indonesia. Peraturan mengenai *Nederlands Onderdaanschap* ini terdapat kekurangan-kekurangan. Dalam peraturan itu tidak dapat ditemukannya apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang kaulanegara Belanda. Akan tetapi, perbedaan karena keturunan bangsa terdapat dalam undang-undang Hindia Belanda. Perbedaan oleh hukum ini mempunyai pengaruh-pengaruh yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Walaupun orang keturunan Tionghoa telah dijadikan *Nederlands Onderdaan*, mereka masih dianggap sebagai orang asing dalam perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berbeda dengan *Nederlands Onderdaan*, setelah Indonesia merdeka, pemerintah langsung membuat peraturan untuk orang asing di Indonesia. Pemerintah harus melakukan banyak perombakan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Sementara itu untuk menghilangkan persengketaan antara pemerintah

¹⁹ Harsono, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 1.

²⁰ Gouw Giok Siong, *op.cit.*, hlm. 52.

Indonesia dengan RRT, maka keduanya menandatangani Perjanjian Dwikewarganegaraan pada tahun 1955. Perjanjian dwikewarganegaraan adalah perjanjian yang ditujukan kepada orang asing khususnya Tionghoa yang berkewarganegaraan ganda untuk menjadi warganegara tunggal dengan memilih antara kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan Tiongkok. Dimulainya Perjanjian Dwikewarganegaraan ini tanggal 20 Januari 1960 jangka waktu selama 2 tahun untuk pelaksanaan pemilihan tersebut yaitu sampai tanggal 20 Januari 1962. Mereka yang ingin tetap menjadi warganegara Indonesia harus datang di pengadilan Indonesia setempat. Mereka yang berdwikewarganegaraan tidak mengambil langkah tersebut, maka telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya setelah usai pelaksanaan.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk memilih salah satu di antara dua kewarganegaraan dalam waktu dua tahun setelah perjanjian itu mulai berlaku. Ketentuan ini dikenakan bagi mereka yang sudah dewasa, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagi anak yang belum dewasa kewarganegaraan mereka ditentukan oleh kedua orang tuanya. Seorang warganegara RI yang telah menikah dengan warganegara RRT, maka masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan yang dimilikinya ketika sebelum menikah. Kecuali bila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan yang lain. Mereka yang membuat pernyataan lisan akan diberi “surat catatan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan RRT untuk tetap menjadi warga negara Indonesia”.

Pemerintah membuat rencana mengadakan asimilasi orang Indonesia keturunan Tionghoa, kedalam masyarakat mayoritas. Asimilasi ini dilakukan dengan cara tidak menganggap minoritas sebagai suatu kelompok tersendiri. Didirikannya sekolah campuran dan menganjurkan kaum minoritas untuk mengubah nama-nama mereka menjadi Indonesia. Asimilasi ini membuka peluang kembali bagi perkawinan campur (*amalgamatie*), dengan demikian maka asimilasi akan tercapai secara biologis, ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya.²¹

Asimilasi adalah proses sosial yang tumbuh bila ada: golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda saling bergaul langsung secara intensif dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga kebudayaan-kebudayaan dari masing-masing golongan mengalami perubahan dan saling menyesuaikan. Asimilasi biasanya terjadi antara golongan mayoritas dengan minoritas dan pada akhirnya golongan minoritas harus menyesuaikan dengan golongan mayoritas.²² Proses asimilasi hubungan yang bersifat sosio-struktural dan penyesuaian (adaptasi), dengan kata lain asimilasi bertemunya dua budaya, yakni budaya lokal (mayoritas) dengan budaya pendatang (minoritas), dalam proses sosialnya terjadilah perubahan struktural dari budaya minoritas yang diakibatkan dari penyesuaian (adaptasi) dari budaya minoritas.

²¹ Ong Hok Kham, "Asimilasi Golongan Peranakan", dalam *Star Weekly*, no. 12, tahun XII, Februari 1960.

²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986), hal. 248.

Kebijakan asimilasi berdampak setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno, yaitu peraturan *stelsel aktif*²³ yang dihilangkan. Mereka warganegara keturunan Tionghoa berbondong-bondong mengurus statusnya di Pengadilan Negeri. Ong Ho Kham dalam *star weekly* mengemukakan bahwa asimilasi membuka peluang bagi perkawinan campur. Menurut Ong Ho Kham ini merupakan salah satu jalan agar tidak ada diskriminasi dan konflik lagi terhadap warganegara keturunan Tionghoa.

F. Historiografi Yang Relevan

Historiografi adalah usaha dari sejarawan untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau. Peristiwa pada masa lampau ini tentunya harus memiliki batasan antara sesuatu yang benar-benar terjadi dan imajinasi.²⁴ Sejarawan perlu memastikan bahwa rekaman-rekaman pada masa lalu yang akan dikaji memang benar-benar terjadi.

Skripsi karya Amorettya Minayora yang berjudul *Masalah Identitas Tionghoa Indonesia Muslim di Jakarta* memaparkan upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan mendekatkan kembali hubungan orang Tionghoa Indonesia dan orang Indonesia demi tercapainya kesatuan bangsa. Caranya antara lain dengan pindah agama ke agama yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia yaitu agama Islam.

²³ *Stelsel aktif* adalah Warga Negara Asing (WNA) yang tidak memilih kewarganegaraan/diam saja otomatis menjadi WNI. *Stelsel pasif* adalah menuntut WNA untuk mengajukan atau mengurus dokumen untuk menjadi WNI.

²⁴ Louis Gottschalk, *Understanding History*, terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 32.

Thesis karya Faizatush Sholikhah yang berjudul *Terpaksa Menjadi Asing: Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI) dan Pencarian Identitas Kebangsaan Indonesia Pasca Kolonial* memberikan gambaran pasca kolonial warganegara keturunan asing yang menjadi warganegara Indonesia harus memiliki surat bukti kewarganegaraan Indonesia dan identitas orang-orang Indonesia setelah Indonesia merdeka. Kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI) tersebut ditunjukkan kepada warganegara keturunan asing keseluruhan yaitu keturunan dari Arab, India, Tiongkok yang bernaung di wilayah Indonesia. Rentang waktu yang di pilih adalah 1940-1960. Tahun 1940 ketika warganegara telah memiliki identitas mereka. Tahun 1960 ketika terjadi perubahan identitas setelah kemerdekaan.

Karya Faizatush Sholikhah di atas sebenarnya mirip dengan kajian ini yang berjudul *Perjanjian Dwikewarganegaraan: Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok (1955-1969)*. Akan tetapi, karya Faizatush Sholikhah lebih berfokus pada Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI) yang harus dimiliki oleh orang asing di Indonesia ketika menjadi warga negara Indonesia. Kajian *Perjanjian Dwikewarganegaraan: Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok (1955-1969)* lebih membahas kehidupan orang Tionghoa ketika harus menjadi WNI dan daerah yang diteliti juga dipersempit yaitu di daerah Glodok. Namun, karya Faizatush Sholikhah sangat membantu dalam penelitian mengenai identitas orang Tionghoa dan kehidupannya.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam menyusun tugas akhir ini, peneliti menggunakan metode sejarah seperti yang telah banyak disusun oleh banyak ahli sejarah, yang pada pokoknya bisa dikatakan serupa: dimulai dari penentuan topik, dilanjutkan dengan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan diakhiri dengan penulisan.²⁵ Penelitian ini adalah penelitian historis, yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber sehingga mendapatkan fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya. Langkah-langkah penelitian, sebagai berikut.

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan dengan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.²⁶ Kedekatan emosional peneliti terhadap objek kajiannya Jakarta, berdasarkan kedekatan pada kota tersebut yang dijadikan tempat pertama diselenggarakannya Perjanjian Dwikewarganegaraan, dan merupakan tempat tinggal peneliti. Sedangkan untuk kedekatan intelektual yang dirujuk di sini adalah kemampuan penulis dalam mengkaji objek penelitiannya. Dalam pemenuhan sumber untuk keterkaitannya dengan Jakarta dan masalah kewarganegaraan ganda ini, peneliti banyak menemukan sumber sezaman yang dapat ditelaah.

²⁵ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 89.

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 91.

b. Heuristik

Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.²⁷ Sumber-sumber yang akan dikumpulkan tentunya berkaitan dengan tema yang akan dikaji. Sumber merupakan hal yang penting dalam penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber, peristiwa sejarah tidak akan dapat direkonstruksi menjadi sebuah kisah. Seperti Sartono Kartodirdjo memaparkan bahwa sumber penelitian sejarah merupakan modal utama untuk menyusun peristiwa sejarah, karena dari sumber itu dapat ditarik fakta yang kemudian menjadi dasar usaha untuk menghidupkan masa lampau.²⁸ Tanpa adanya sumber, sebuah karya sejarah hanyalah sebuah cerita rekaan. Helius Sjamsuddin menganggap sumber sejarah sebagai hal yang berkaitan langsung atau tidak, yang menceritakan kepada kita ikhwal suatu kenyataan atau kegiatan manusia.²⁹ Sumber di dalam sejarah dapat dibedakan menjadi dua, sumber primer dan sumber sekunder.

1.) Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri, yaitu saksi dengan panca indera, atau alat mekanis (yang juga bisa menghasilkan suatu rekaman yang

²⁷ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 86.

²⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 23.

²⁹ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 80.

bisa di indera).³⁰ Sumber primer dapat pula diartikan sebagai suatu sumber cerita atau catatan saksi mata atau pengamat, berisi catatan para saksi yang menyaksikan suatu peristiwa. Beberapa sumber primer yang digunakan antara lain:

a.) Wawancara

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat
1.	A. Dahana	58 tahun	Dosen	Kompleks Perumahan Dosen UI, Blok : B. No. 45 Sawangan -Depok
2.	X-Ling (Liem Tjoe Tek)	63 tahun	Pelukis	Jl. Pasar Pagi III. No. 21 Ps. Pagi Jakarta-Utara.
3.	Hendra Tan	66 tahun	Wirausaha	Pasar Pagi, Glodok, Jakarta
4.	Sukiman Hartono	51 tahun	Anggota Komunitas Glodok	Petak 9, Jakarta Barat
5.	The BianNio	55 tahun	Haksu	Jln. Pangeran Jayakarta III. No. 16 Glodok-Jakarta
6.	Iwan. S	63 tahun	Pensiun	Pasar Pagi, Glodok, Jakarta
7.	Sunardi	74 tahun	Pensiun	Jl. Perniagaan no.7, Jakarta Barat
8.	Lisa Santoso	68 tahun	Wirausaha	Pasar Pagi, Glodok, Jakarta
9.	Richard Wanandi	77 tahun	Anggota Komunitas Glodok	Petak 9, Jakarta Barat
10.	Riyanto	63 tahun	Departemen Kehakiman RI	Cililitan, Jakarta Timur
11.	Widi Sanusi	59 tahun	Departemen Kehakiman RI	Cililitan, Jakarta Timur

³⁰ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 35.

b.) Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa lembaran perintah dari pemerintah Republik Indonesia (RI), seperti; *Peraturan Pemerintah no.11 tahun 1960* berisi tentang penegasan mulainya berlaku Peraturan Pemerintah no.20 tahun 1959 tentang pelaksanaan UU dan persetujuan perjanjian antara RI dan RRT mengenai dwikewarganegaraan. Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1954 yang menerangkan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia.

2.) Sumber Sekunder

Louis Gottschalk berpendapat bahwa sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni seseorang yang tidak hidup pada peristiwa yang dikisahkannya.³¹ Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber sekunder yang pertama, buku *The National Status of the Chinese in Indonesia, 1900-1958* karangan Donald E Willmott yang dicetak ulang pada tahun 2009. Buku ini merupakan monografi yang menggambarkan latar belakang perjanjian Tiongkok dengan Indonesia mengenai Dwikewarganegaraan yang pada akhirnya diratifikasi pada tahun 1960. Kemudian buku ini juga membahas mengenai kedudukan orang Tionghoa asing dan keturunan Tionghoa pada tahun 1958. Kedua, buku yang berjudul *Warga Negara dan*

³¹ *Ibid.*

Orang Asing karya Gouw Giok Siong yang memaparkan tentang faham kewarganegaraan. Tinjauan sejarah kedudukan hukum kenegaraan golongan Tionghoa di Indonesia dari asing sampai *Nederlands Onderdaanschap*. Perbandingan kawula Belanda dengan kewarganegaraan Indonesia juga terdapat dalam buku ini. Selain itu, khusus mengungkap mengenai perjanjian dwikewarganegaraan tahun 1955 sampai perkawinan dan kewarganegaraan dipaparkan sangat jelas. Ketiga, buku yang berjudul *Dilema Minoritas Tionghoa* karya Leo Suyadinata menjelaskan persepsi tentang Bangsa Indonesia dan minoritas Tionghoa. Kemudian juga memaparkan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Tionghoa lokal dari tahun 1949-1975 serta dampak yang ditimbulkan.

c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber ditelusuri dan didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengkritisi sumber tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tidak semua sumber dapat digunakan dalam sebuah historiografi. Agar sumber tersebut bisa dipakai harus melewati dua kali pemeriksaan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

1.) Kritik Eksternal

Kritik sumber dilakukan untuk mencari keabsahan data dengan melakukan penyaringan secara kritis. Menurut Kuntowijoyo tujuan kritik ekstern untuk menilai keabsahan sumber, misalnya jenis

kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, untuk mengetahui otentitas sumber.³²

Dalam kajian ini berusaha untuk melakukan kritik ekstern untuk mengetahui otentitas data berupa dokumen-dokumen mengenai peraturan-peraturan dan pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan pasca kemerdekaan di Arsip Nasional. Disini penulis meyakini bahwa surat-surat tersebut benar-benar asli adanya. Hal ini ditandai dengan beberapa faktor seperti model tulisan atau pengetikan yang sangat sesuai dengan zamannya. Arsip ini menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama dengan tulisan yang masih jelas. Kemudian terdapat cap dan tanda tangan pada dokumen tersebut yang menandakan bahwa dokumen tersebut bersifat resmi mengingat dokumen terbitan dari pemerintah dan penulisan tanggal dokumen yang sesuai dengan batasan waktu dari pokok pembahasan yang telah di tentukan. Akan tetapi, kondisi arsip-arsip tersebut terpecah sehingga mempersulit proses penelitian ini.

2.) Kritik Internal

Selain melakukan kritik ekstern peneliti juga melakukan kritik intern untuk mengetahui validitas isi sumber.³³ Kritik ini merupakan pemeriksaan terhadap isi sumber yang bertujuan untuk membuktikan apakah kesaksian dan pernyataan sumber dapat diandalkan atau

³² Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 101.

³³ *Ibid*, hlm. 102.

tidak.³⁴ Untuk mendapatkan pembuktian ini dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, mengetahui isi dari catatan selama perjalanan pelaku atau saksi. Kedua, mengetahui apakah sumber tersebut jujur atau tidak. Kedua hal ini begitu terasa penting ketika sumber itu menggunakan kata kiasan. Untuk mengetahui jujur tidaknya sumber tersebut perlu juga diperbandingkan pernyataannya dengan sumber lain yang sependapat atau tidak.³⁵

Sumber-sumber yang ada dalam penelitian ini telah melalui kritik internal. Sumber-sumber tersebut telah di teliti satu sama lainnya. Sebagian sumber di atas juga telah lolos seleksi yang sama sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam penulisan skripsi.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh setelah diterapkan kritik sumber. Dengan kata lain interpretasi dapat diartikan sebagai penciptaan penelitian baru (*sintensis*) dengan menafsirkan berbagai fakta. Karena demikian, setiap peneliti sejarah bisa saja memiliki sintesis yang berbeda meskipun berangkat dari sumber yang sama.³⁶ Interpretasi sebagai upaya untuk merangkai fakta-fakta agar memiliki bentuk dan struktur. Fakta-fakta tersebut ditafsirkan sehingga

³⁴ *Ibid*, hlm. 135.

³⁵ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 252.

³⁶ Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 104.

ditemukan struktur logisnya. Selain itu diperlukan landasan yang jelas agar terhindar dari penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit.

Proses *analisis* yang dilakukan untuk membeberkan fakta-fakta yang telah didapat dari sumber-sumber sejarah seperti buku maupun artikel. Contoh dalam Warganegara dan Orang asing karangan Sudargo Gautama dijelaskan; pertama, paham tentang kewarganegaraan. Kedua, pentingnya kewarganegaraan pada masa Hindia Belanda sampai Indonesia merdeka. Ketiga, dilakukannya perjanjian kewarganegaraan untuk orang asing agar mendapatkan persamaan hak dan kewajiban dalam suatu negara. Dari sini dapat dianalisis bahwa tujuan pemerintah melakukan perjanjian kewarganegaraan ini tidak lain adalah untuk mencapai bangsa yang homogen dengan persamaan hak dan perlindungan hukum serta pencarian identitas mereka setelah menjadi WNI ketika Indonesia merdeka.

d. Penulisan

Penulisan merupakan upaya mengorganisir hasil penelitian yang memerlukan hubungan logis antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Penulisan ini disusun secara ilmiah karena ditujukan untuk penelitian skripsi. Penulisan ini akan memperhatikan terhadap sejarah kewarganegaraan Indonesia tahun 1955-1969. Tentunya pokok pembahasan ini akan dikembangkan ke tahap dampak perjanjian dwikewarganegaraan terhadap etnis Tionghoa di Glodok.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi masa lampau. Dalam penulisan suatu karya sejarah sangat membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk mempertajam serta memperjelas penulisan.³⁷ Permasalahan pada skripsi ini dapat diperjelas dengan menggunakan konsep sosial dan hukum.

Konsep pembauran atau asimilasi, konsep ini menerangkan tentang interaksi sosial yang terjadi antara budaya yang ada dalam masyarakat. Asimilasi adalah proses sosial yang tumbuh bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda saling bergaul langsung secara intensif dalam jangka waktu yang relatif lama. Akibatnya, kebudayaan dari masing-masing golongan mengalami perubahan dan saling menyesuaikan.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa dalam proses asimilasi yakni bertemunya dua budaya, budaya lokal (mayoritas) dengan budaya pendatang (minoritas), dalam proses sosialnya terjadilah perubahan struktural dari budaya minoritas yang diakibatkan dari penyesuaian (adaptasi) dari budaya minoritas. Mengutip pendapat Milton Gordon dalam konsep asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut kelompok mayoritas maupun minoritas, salah satunya adalah asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan secara besar-besaran.

³⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 3.

Mengacu pada konsep pembauran atau asimilasi, awal kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia semula laki-laki, mereka menikah dengan perempuan lokal (Indonesia). Sejak itu muncul sebuah ras campuran baru, yaitu golongan peranakan. Anak-anak mereka dibesarkan oleh ibu bangsa pribumi yang kehilangan bahasa Tionghoa dan berbicara menggunakan bahasa lokal (Indonesia). Akibat dari Perjanjian dwikewarganegaraan, golongan peranakan Tionghoa di Jakarta dapat bertahan hanya empat generasi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Tionghoa telah terasimilasi secara tuntas kedalam masyarakat Indonesia, hingga menjadi masyarakat Indonesia asli. Peranakan Tionghoa menjadi penduduk pribumi (WNI) dalam kaitannya telah beradaptasi dan terbiasa dengan agama, kebiasaan maupun cara hidup pribumi lainnya di Jakarta.

Berdasarkan dampak dari dwikewarganegaraan, penulisan ini juga mengambil konsep hukum. Konsep Institusional, menurut Hans Kelsen, Negara menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis. Mengacu dengan konsep ini, difokuskan mengenai tugas dan kewenangan atau apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti kabinet atau menteri. Dengan konsep hukum ini, dalam mempelajari perjanjian dwikewarganegaraan, maka yang diperhatikan adalah wewenang ketika pemerintah Indonesia memberikan kebijakan kepada orang Tionghoa lokal (peranakan) yang ingin menyatu dengan Indonesia. Kebijakan ini tidak memaksa orang Tionghoa untuk menjadi warga negara Indonesia. Dilakukannya kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan persamaan hak

dan perlindungan hukum terhadap orang Tionghoa peranakan yang berada di Indonesia seperti tertuang dalam naskah undang-undang atau peraturan tata tertib.

Landasan pemikiran di atas, membuat penulisan ini mengambil konsep sosial, dan hukum dengan mengambil fakta sosial, dan hukum sebagai kajian, yaitu perjanjian dwikewarganegaraan. Perjanjian dwikewarganegaraan berkaitan dengan memberikan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah setelah Indonesia merdeka. Pemerintah ingin menata kembali kebijakan-kebijakan yang diambil mengenai persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang diperuntukkan bagi warga negara keturunan asing khususnya keturunan etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Hal itu berhubungan erat dengan masalah sosial dan hukum orang-orang Tionghoa yang menjadi Warga Negara Indonesia dengan cara asimilasi (pembauran), sehingga penelitian ini diharapkan menjadi penulisan sejarah sosial dan hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dalam memahami Proposal Penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan mencakup garis besar isi. Secara sistematis Proposal Penelitian ini berisikan lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi, metode dan pendekatan penelitian.

BAB II EKSISTENSI ETNIS TIONGHOA DI GLODOK

Pada bab ini membahas letak geografis Jakarta dan perkembangan secara umum dari mulai eksistensi etnis Tionghoa di Jakarta khususnya di Glodok, hingga perkembangannya sampai adanya permasalahan kewarganegaraan ganda.

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Pada bab ini membahas *Nederlandschap*: Kewarganegaraan Belanda, Sistem Kewarganegaraan Setelah Merdeka (1949-1951), Perjanjian Dwikewarganegaraan antara Republik Rakyat Tionghoa dan Indonesia tahun 1955, dan pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tahun 1960-1962.

BAB IV DAMPAK PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN RI-RRT TAHUN 1955-1969 DI GLODOK

Pada bab ini membahas dampak-dampak yang ditimbulkan dari perjanjian dwikewarganegaraan seperti dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang jawaban dari masalah perjanjian dwikewarganegaraan RRT-RI tahun 1955-1969.

BAB II

EKSISTENSI ETNIS TIONGHOA DI GLODOK

Batavia¹ merupakan ibukota negara Indonesia. Di Batavia mengalami banyak perubahan yang luar biasa, terutama beberapa dasawarsa sesudah perang dunia II, seluruh tahap yang dilalui kota telah meninggalkan jejak morfologisnya. Sejarah kota dapat dilihat dalam struktur masa kini Jakarta, seperti tampak di kota lama (Kota), Pecinan (Glodok), Meester Cornelis (Jatinegara) dan hingga kini mengalami perluasan-perluasan dengan konsep perencanaan JABODETABEK (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Peter J.M. Nas dan Kees Grijns mengemukakan, secara morfologis Jakarta telah melewati lima tahap perubahan, mulai dari pembangunan kota lama (Batavia), perluasan kota hingga daerah Weltevreden (Menteng), penyatuan Master Cornelis (Jatinegara) dengan Jakarta, perluasan pinggiran kota ke Kebayoran, dan pelebaran kawasan perkotaan dengan pembentukan kota-kota satelit.²

A. Jakarta Sebelum Tahun 1950

Jakarta merupakan dataran rendah dari bagian pantai utara Jawa Barat. Wilayah ini terletak pada 6° 12' Lintang Selatan, 106° 48' Bujur Timur. Sebelah utara merupakan daerah pantai yang berawa-rawa dengan ketinggian tanah maksimal 7 meter. Pada lokasi tertentu bahkan ada yang letaknya di bawah

¹ Batavia merupakan kota Jakarta pada masa Hindia Belanda. Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*, (Jakarta: Depdikbud, 1987), hlm. 7.

² Peter J. M. Nas dan Kees Grijns, "Jakarta-Batavia: Sebuah Sampel Penelitian Sosio Historis Mutakhir", *Jakarta Batavia : Esai Sosio-Kultural* (Jakarta : Banana dan KITLV, 2007), hlm. 5-9.

permukaan laut. Sebelah selatan merupakan daerah yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian tanah mencapai kurang lebih 50 meter di atas permukaan laut.³

Bendirinya kota Jakarta pada tahun 1619, disesuaikan dengan konsep “kota ideal” pada masa itu, dimana konstruksi kota disamakan dengan kota-kota di Eropa. Konsep pembangun kota Jakarta bersifat metropolis dengan memakai gaya arsitektur Eropa. Kota Batavia⁴ dibangun di atas wilayah kerajaan Jayakarta, (*Koninkrijk Jacatra*). Kota ini juga disebut sebagai kota Benteng, dimana kota dikelilingi tembok-tembok tebal yang juga difungsikan sebagai benteng kota. Pada poros kota dibangun sebuah jalan yang menghubungkan antara Benteng dengan balai kota, dan menjamin pemandangan di pusat kota. Batavia dibangun atas sistem kanal segi empat yang disinari oleh kemegahan kastil Batavia.⁵

Pendirian kota Jakarta berkaitan erat dengan kepentingan politik Pemerintah Hindia Belanda, yakni menguasai monopoli perdagangan di kepulauan Nusantara. Dalam perkembangannya, Jakarta menjadi pusat aktivitas perdagangan. Kemajuan kota Jakarta tidak dapat dilepaskan dari para saudagar Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda mengajak orang-orang Tionghoa bekerja sama, sehingga mereka mau pindah ke Jakarta. J.P. Coen merangkul peranakan Tionghoa dari Pelabuhan Banten, yakni Sauw Beng Kong untuk tinggal di

³ Edi Sedyawati dkk, *op, cit.*, hlm. 20.

⁴ Nama Batavia, diambil dari nama suku nenek moyang bangsa Belanda yakni Batavir. *Ibid.*, hlm. 39-42.

⁵ Kastil Batavia adalah simbol budaya yang merepresentasikan kemegahan kota, lihat. Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh: Pemukiman Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia* (Yogyakarta : LkiS, 2004), hlm. 78-89.

Jakarta.⁶ J.P. Coen juga memberikan kompensasi istimewa terhadapnya, untuk memperlancar aktivitas perdagangannya. Dalam perjalanan pembangunan kota Jakarta mengalami kekurangan tenaga kerja, dan berkat Sauw Beng Kong kebutuhan akan tenaga kerja dapat dipenuhi. Ia merupakan makelar tenaga kerja Tionghoa.⁷ Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan kantor cabangnya yang berada di Tiongkok, untuk mempermudah pengiriman para migran. Para kuli-kuli (buruh) tersebut, diculik dan dibawa ke Jakarta untuk dijadikan budak kemudian diperkerjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum kota.⁸

Jakarta dibangun sebagai kota perdagangan. Kota ini ditujukan sebagai markas besar VOC yang difungsikan untuk menampung barang-barang perdagangan. Sehingga Jakarta dikenal dengan “*het magazijn derzelve producten*” (gudang barang-barang produksi sendiri). Akan tetapi dalam perkembangannya Jakarta menjadi kota konsumtif. Hal ini dikarenakan Jakarta mendapat penyangganya terutama tidak dari hasil buatan kota dan dijual ke luar kota, akan tetapi lebih banyak ditopang atas dasar tuntutan hukum seperti pajak, dan sewa tanah.⁹ Produksi barang-barang dagangan bukan lagi disediakan oleh kota, melainkan dari daerah *ommelanden* (pinggiran dan pedalaman) Jakarta. Kota hanya berfungsi tempat transaksi dan penyimpanan barang dagangan sebelum

⁶ Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta : Elkasa, 2002), hlm. 92-95.

⁷ Leonard Blusse, *op.cit.*, hlm. 99-100.

⁸ Mereka adalah orang-orang merdeka, sebab wilayah mereka tidak dikuasai oleh bangsa Mancu. lihat, Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau Di Indonesia* (Jakarta : Garba Budaya, 1998), hlm. 46.

⁹ Leonard Blusse, *op, cit.*, hlm. 37-39.

dieksport dan dipasarkan kembali ke wilayah-wilayah pedalaman di Nusantara. Jakarta berperan sebagai pusat kota bagi daerah-daerah pedalaman, dan mengambil alih pasar perdagangan-perdagangan di *ommelanden*. Dari keterangan di atas maka pendirian kota Jakarta mempunyai beberapa fungsi kota: *pertama*, sebagai benteng pertahanan dan markas besar VOC; *kedua*, pusat perdagangan; dan *ketiga*, sebagai pusat pemerintahan daerah-daerah *ommelanden*, seperti Meester Corneliss, Kebayoran, dan daerah-daerah sekitar Jakarta.¹⁰ Menurut J.S. Furnival mengemukakan bahwa pada masa awal pembentukannya, Jakarta telah dapat dikatakan sebagai kota, dimana terdapat unsur urban dan kemajemukan dari pendudukannya.¹¹

Kota Jakarta dapat tumbuh karena kota-kota sub-urban disekelilingnya yang disatukan ke dalam karesidenan Jakarta. Perkembangan kota mulai terlihat dengan dibangunnya infrastruktur kota seperti jalan, ruang publik, seperti: dari taman-taman kota, pasar, tempat-tempat penginapan, dan tempat-tempat hiburan. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan pemukiman-pemukiman penduduk. Bangunan-bangunan rumah yang mencirikan tipikal Eropa mulai terkikis digantikan dengan bangunan-bangunan dengan konsep tropis atau minimalis dan seragam. Pada awalnya pemukiman-pemukiman tersebut dinamakan dengan nama “kampung” bergeser menjadi nama-nama distrik yang didasarkan oleh tata letak administratif kewilayahan. Pemukiman-pemukiman yang terus berkembang tidak lagi mencirikan suatu etnik tertentu, akan tetapi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ J.S. Furnivall, *Netherlands-India : A Study of Plural Economy* (Cambridge : Cambridge University Press, 1939), hlm. 9-14.

telah berbaur, khususnya pemukiman-pemukiman pribumi. Sifat-sifat pengelompokan dalam suatu pemukiman hanya dapat dijumpai pada masyarakat Tionghoa Indonesia, hal ini berkaitan dengan usaha perdagangan dan perekonomian kota.

B. Jakarta Sebagai Kota Pendatang

Sebagai ibukota negara, Jakarta dipandang dari dua segi yang bertentangan. Di satu pihak Jakarta dipandang sebagai faktor utama dalam modernisasi yang menjadi katalisator bagi kemajuan dan pembangunan daerah pedesaan. Dipihak lain Jakarta dipandang sebagai kota yang menjadi kantong yang cemelang dan gemerlapan, dihuni oleh para elit yang mengirikan hati. Jakarta menjadi motivator bagi penduduk untuk melakukan urbanisasi atau bermigrasi ke Jakarta. Pada akhirnya kota Jakarta sebagai daerah yang beraneka macam penduduk berdatangan. Kedatangan mereka secara terus-menerus, tanpa menghiraukan noda-noda yang mereka bawa dan berdampak bagi daerah Jakarta, pada akhirnya arus kedatangan mereka secara kontinuitas dianggap sebagai momok.¹²

Berbagai cara telah diupayakan dan dilakukan guna mengantisipasi peningkatan penduduk akibat migrasi, seperti kebijakan penutupan kota Jakarta bagi para pendatang (urban dan migran). Di sisi lain berbagai penamaan atas *image* Jakarta bermunculan istilah seperti “Jakarta itu Kejam”, bahkan hingga divisualisasikan kekejaman dan ketidakpastian Jakarta dengan judul “sekejam-

¹² Masri Singarimbun, “Urbanisasi: Apakah Itu Suatu Problema”, *Prisma ; Jakarta Siapa yang Punya*, No.5 tahun VI. Edisi Mei-1977, hlm. 3-11.

kejamnya ibu tiri lebih kejam ibukota”. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh bagi arus urbanisasi dan migrasi. Arus tersebut tetap saja semakin meningkat setiap tahunnya. Jakarta tetap menjadi sebuah tempat pengharapan bagi penduduk Indonesia.

Menurut L. Castle, dari masa perkembangan kota Batavia hingga menjadi Jakarta, kota ini mempunyai daya tarik yang luar biasa dan mempunyai pengaruh yang besar dalam perubahan-perubahan sosial. Jakarta dapat disebutkan sebagai *melting plot*, tempat berbagai suku bangsa berbaur. Hal ini dapat terlihat pada peningkatan jumlah penduduknya dan keberagaman penduduknya yang disebabkan oleh arus urbanisasi dan migrasi. Peningkatan jumlah penduduk Jakarta setiap tahunnya mencapai sekitar 2% hingga 5%. Pengidentifikasian penduduk dapat dilihat berdasarkan asal daerah mulai tahun 1960.¹³

Sebagai ibukota, pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, Jakarta mengalami perubahan yang cukup pesat terutama dalam peningkatan jumlah penduduk. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa perubahan dan pembangunan kota Jakarta dikarnakan oleh keberadaan kaum pendatang. Kaum pendatang di Jakarta banyak memberikan bagi pembangunan kota, hal ini dikarenakan jumlah mereka dan status kedudukannya. Pada masa VOC berkuasa di Jakarta kaum pendatang sangat berjasa dalam pembangunan fisik dan pembangunan perekonomian kota.

Banyak dari kaum pendatang tersebut berasal dari bangsa Tionghoa. Koloni-koloni Tionghoa yang memainkan peranan penting dalam pembangunan

¹³ Jakarta berdasarkan suku bangsa tahun 1960. Lihat lampiran 11.

kota di bawah pengawasan kekuasaan VOC. Hal ini dipertahankan oleh penerusnya yakni pemerintah kerajaan Belanda dengan menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung pasca masa pemerintahan kolonial.¹⁴ Pada masa pasca kemerdekaan keberadaan golongan keturunan Tionghoa masih memiliki peranan dalam pembangunan kota Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari peranan pengusaha-pengusaha non-pribumi yang didominasi oleh keturunan Tionghoa menjalankan aktivitas perekonomian kota.¹⁵

Keberadaan kaum pendatang dengan kelompok usia produktif (25-54 tahun) mendominasi mencapai 70% dari jumlah keseluruhan kaum pendatang, dan bersifat konstan. Hal inilah yang pada akhirnya dijadikan sebagai tumpuan dalam mengemukakan sumbangsih para migran dan urban sebagai penyumbang terbesar dari pembangunan kota. Keberhasilan mereka dalam meraih pekerjaan membuat mereka untuk menetap di Jakarta. Dengan menetapnya keturunan Tionghoa, maka keturunan mereka tidak lagi dikatakan sebagai migran. Pada umumnya perpindahan dilakukan dalam usia menginjak dewasa atau dapat dikatakan mereka belum berkeluarga.

Kepergian mereka relatif lebih mudah, walaupun ada beberapa dari mereka yang melakukan migrasi telah berkeluarga. Tidaklah sulit untuk memahami gejala demikian. *Pertama*, dalam usia kurun waktu antara 20-25 tahun, terdapat sebuah keberanian untuk memberontak terhadap lingkungannya, sedang di sisi lain lingkungan sosialnya sendiri belum terlalu mengikat. Oleh

¹⁴ Leonard Bluse, *op.cit.*, hlm. 137-139.

¹⁵ Mochtrar Lubis, "Jakarta kota Penuh Kontras" *Prisma ; Jakarta Siapa yang Punya*, No.5 tahun VI. Edisi Mei-1977, hlm. 32-44.

karena itu, untuk meninggalkan suasana yang telah dikenalnya dengan merantau dan menghadapi ketidak-pastian tidaklah terlalu sukar untuk dijalani para migran. Disamping itu, mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dengan cepat. *Kedua*, pada usia tersebut beban ketergantungan belumlah terlalu berat. Pada umumnya mereka yang melakukan migrasi bersifat individualis atau bersama keluarga kecil mereka (jumlah keluarganya sedikit). *Ketiga*, pada usia tersebut, adalah usia yang mulai masuk dalam bursa pasaran kerja. Dengan demikian mencari pekerjaan adalah alasan pertama untuk melakukan migrasi.¹⁶

Dengan adanya peningkatan jumlah kaum pendatang, maka pemerintah kota Jakarta membangun kerja sama dengan kota-kota disekelilingnya.. Jakarta sebagai pusat kota yang dikelilingi oleh kota-kota satelit dan administratif merupakan titik tumpu bagi kegiatan pembangunan dari setiap walikota. Proses pembangunan pada akhirnya terus berkembang dengan pesat, *master plan* yang dahulu telah direncanakan berubah dan menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan. Perkembangan ekonomi menuntut Jakarta menjadi kota pembangunan di setiap sudut kota tidak lepas dari sasarannya. Akibat pembangunan tersebut terjadi pergeseran pola pemukiman, dimasa kini pemukiman masyarakat telah pindah kepinggiran kota. Bagi mereka yang mampu, mereka tetap tinggal dikota dan menghuni apartemen-apartemen yang telah disediakan oleh para pengusaha dan pengembangnya.¹⁷

¹⁶ Mayling Oey, "Jakarta Dibangun Kaum Pendatang" *Prisma; Jakarta Siapa yang Punya*, No.5 tahun VI. Edisi Mei-1977, hlm. 63-70.

¹⁷ Mochtar Lubis, *loc.cit.*

C. Faktor-Faktor Pendukung Migrasi Etnis Tionghoa ke Jakarta

Migrasi orang Tionghoa ke Hindia-Belanda, khususnya kota-kota besar yang menjadi prioritas utamanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor ekonomi, sosial-politik. Migrasi atau merantau dalam arti luas adalah perpindahan dari daerah asal ke tempat tujuan untuk sementara atau selamanya. Hal ini tidak terkait dengan pembatasan jarak dan sifatnya, dalam artian sukarela atau paksaan. Migrasi terdapat tempat tinggal asal, tempat tujuan, dan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Migrasi terdapat dua pola migrasi, yaitu: migrasi yang bersifat sementara (musiman), dan migrasi yang bersifat permanen. Dengan melihat pola migrasi tersebut, maka para migrasi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa termasuk kedalam migrasi permanen.¹⁸

Ketika pertama kali orang Tionghoa bermigrasi ke Indonesia, mereka tidak menentukan dimana wilayah konsentrasi pemukimannya. Secara garis besar banyak dari peneliti yang mengemukakan bahwa interaksi sosial antara bangsa Tionghoa sudah ada sejak pra-sejarah, yakni dengan ditemukannya peninggalan kebudayaan Dongson di Indonesia.¹⁹ Hubungan tersebut terus berlanjut hingga masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, tepatnya hubungan dengan kerajaan Sriwijaya, dan Majapahit dalam hubungan religi, ekonomi dan politik. Dari

¹⁸ Lahirnya “kaum peranakan” adalah suatu bukti dari bangsa Tionghoa yang merantau, mayoritas bersifat permanen. Lihat, Everet S. Lee, *Suatu Teori Migrasi*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 5-7.

¹⁹ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya: Jaringan Asia Jilid II*, *op,cit*, hlm. 15.

adanya hubungan tersebutlah dapat dikatakan bahwa migrasi bangsa Tionghoa ke Indonesia sudah ada sejak jaman pra-sejarah. Pada pertengahan Abad XVIII hingga awal abad XX migrasi Tionghoa tidak lagi didominasi oleh kaum lelaki, akan tetapi jumlah mereka sebanding dengan kaum perempuan.

Kedatangan mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, seperti faktor psikologis, ekonomi dan politik negeri Tiongkok yang tidak stabil, sedangkan faktor eksternalnya adalah kebutuhan akan tenaga kerja di Hindia-Belanda. Faktor psikologis diistilahkan dengan faktor pembentukan dan perkembangan rumah tangga (keluarga). Keputusan migrasi disebabkan karena kebutuhan akan kaum perempuan dari darah yang sama, untuk melanggengkan status quo pemerintah Hindia Belanda. Hal ini terbukti dengan adanya penculikan-penculikan kaum perempuan dan dikirim melalui berbagai jaringan rumah-rumah pelacuran di laut Cina Selatan. Di sisi lain, keputusan migrasi mereka karena inisiatif dari diri mereka sendiri (sukarela), hal ini dikarenakan mereka menghindari kawin paksa, dalam pandangannya migrasi adalah suatu cara menuju kebebasan.²⁰

Meningkatnya jumlah migran kaum perempuan, membawa pengaruh pada perkembangan kebudayaan Tionghoa. Hal ini dikarenakan kaum perempuan adalah pemegang kendali keluarga dan menjadi penentu dari keutuhan sebuah budaya. Meningkatnya migran kaum perempuan berkaitan erat dengan proses

²⁰ Bersamaan dengan migrasi kaum perempuan Tionghoa, Pemerintah kolonial juga membuat kebijakan mengenai migrasi kaum perempuan Eropa, lihat. Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya: Jaringan Asia Jilid II*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 246.

pengukuhan kembali semangat Kong Hoe Tjoe. Dalam hal ini banyak para ahli yang menyebutnya dengan proses pen-Tionghoa-an kembali (*rezenifikasi*).²¹

Faktor ekonomi, terlihat dari kemerosotan ekonomi negeri Tiongkok karena banyak dari para pejabatnya yang melakukan korupsi dan bertindak sewenang-wenang. Di sisi lain kemerosotan ekonomi terjadi karena kekalahan Tiongkok pada perang Tiongkok melawan invansi Jepang pada tahun 1894. Hal ini menambah keyakinan untuk melakukan migrasi dengan harapan mendapat penghidupan yang layak. Ditemukannya lahan-lahan pertambangan oleh pemerintah Hindia Belanda di negara-negara koloninya, maka secara langsung mereka membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak untuk melakukan proses penggalian dan pertambangan. Orang-orang Tionghoa adalah tenaga kerja yang cukup terampil, ulet, dan rajin, maka dari itu banyak dari pemerintah kolonial yang mempercayainya. Di sisi lain, sebagian besar pengusaha Eropa, terutama Belanda sangat mempercayai kerja orang-orang Tionghoa.

Orang Tionghoa tidak ditempatkan hanya pada sektor pertambangan, tetapi ditempatkan di sektor perkebunan-perkebunan untuk menjadi buruh tani pada perkebunan pemerintah kolonial maupun para kaum peranakan yang mempunyai *potia*, atau *pachter* (hak atas pengolahan tanah). Selain terkenal

²¹ Melihat konsep patrilineal dan Kong Hoe Tjoe, kaum perempuan dapat dikatakan “tidak berarti apapun”, ajaran Xiaong lebih menitik beratkan pada hubungan antara anak dengan ayahnya. Akan tetapi, kedudukan kaum perempuan dalam keluarga menjadi penting, dimana kaum perempuan yang memegang kendali rumah tangga dan memberikan pelajaran terhadap anak-anaknya. Dengan kedatangan migran kaum perempuan, maka membuat sempurna, sebuah keluarga, dimana tidak ada kepincangan, lihat. Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas : Praktek Kolonial di Hindia-Belanda, 1900-1942* (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 23.

sebagai pekerja yang ulet dan terampil, mereka juga terkenal sebagai tenaga kerja yang murah.²² Sebagian besar, para migran Tionghoa bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan-perkebunan milik Belanda dan perkebunan milik elit-elit peranakan. Sebagian kecil dari orang Tionghoa menekuni usaha dagang. Bagi mereka yang menekuni usaha dagang, terlebih dahulu mereka bekerja sebagai pedagang kelontong pada para agen-agen (distributor) milik peranakan. Hasilnya dari perilaku yang menghargai kekayaan, kehematan, kepercayaan pada diri sendiri dan keberanian dalam berspekulasi yang disertai dengan rasa optimis yang tinggi, membawanya pada taraf kehidupan yang tinggi. Ciri khas yang menonjol dari orang Tionghoa adalah mereka tinggal di rumah-rumah yang difungsikan sebagai tempat tinggal dan juga toko.²³

Faktor politik, bagi orang Tionghoa yang melakukan migrasi dikarenakan faktor politik biasanya tersangkut kasus dengan perpolitikan Tiongkok, seperti para aktivis pemberontakan Taiping. Banyak dari mereka yang menjadi aktivis Pemberontakan Taiping, dan pergolakan anti-Manchuria. Selain itu dan juga para utusan dari perkumpulan politik mengkonsolidasikan orang Tionghoa yang menetap di negeri rantau. Banyak dari mereka yang membangun kekuatan politik dan ekonomi guna mendukung pergerakan politik di negeri leluhur. Mereka bergabung dengan agen-agen rahasia yang telah tumbuh subur dan melakukan

²² Banyak dari para kuli kontrak didatangkan dari daerah Hakka dan Kanton, lihat. Jan Breman, *Menjinakan Sang Kuli : Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatra Timur Pada Awal Abad ke-20* (Jakarta : KITLV dan Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. iv-viii.

²³ Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia : Suatu masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa* (Jakarta : PT. Gramedia, 1979), hlm. 11-12.

infiltrasi dalam asosiasi-asosiasi masyarakat Tionghoa yang telah ada. Banyak dari mereka diperlukan guna merekrut dan menjaga untuk tetap memberikan pandangan mengenai nasionalisme.²⁴

Adapun konsentrasi masyarakat Tionghoa berdasarkan suku bangsa yang tersebar di Indonesia, sebagai berikut : pertama, *Hakka* tersebar di Aceh, Sumatra Utara, Batam, Sumatra Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Ambon dan Jayapura. Kedua, *Hainan* tersebar di Riau (Pekanbaru and Batam), dan Manado (Sulawesi Tengah). Ketiga, *Hokkien* tersebar di Sumatra Utara, Pekanbaru, Padang, Jambi, Sumatra selatan, Bengkulu, Jawa (terutama di Jakarta), Bali (Denpasar dan Singaraja), Banjarmasin (Kalimantan Barat), Kutai, Sumbawa, Manggarai, Kupang, Makassar, Kendari, Manado, dan Ambon. Keempat, *Cantonese*, tersebar di Jakarta, Makassar dan Manado. Kelima, *Hokchia*, tersebar di Jawa (Bandung, Cirebon, dan Surabaya), dan Banjarmasin. Keenam, *Teochew* tersebar di Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan barat (Pontianak dan Ketapang). Dengan berdirinya kota-kota perdagangan seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya, banyak dari mereka yang bermigrasi ke kota-kota tersebut, terlebih Jakarta. Hal ini dikarenakan Jakarta sebagai pusat perdagangan, kota ini pun sebagai pusat pemerintahan.²⁵

²⁴ Denys Lombard, *Loc.cit.*

²⁵ Hasil wawancara dengan Sukiman Hartono yang menerangkan persebaran suku-suku etnis Tionghoa di Indonesia pada tanggal 14 Desember 2011.

D. Etnis Tionghoa di Batavia

Sebelum Belanda membangun Batavia (kini Jakarta) tahun 1619, orang-orang Tionghoa sudah tinggal di sebelah Timur muara Ciliwung. Orang Tionghoa tersebut mendiami wilayah itu tidak jauh dari pelabuhan Sunda Kelapa yang berkembang menjadi kota pusat perdagangan. Mereka menjual arak yang bermutu baik.²⁶ Orang Tionghoa perantauan diberi kesempatan berdagang di wilayah Nusantara. Mereka juga diberi fasilitas untuk memonopoli pelaksanaan rumah pegadaian dan memungut pajak. Akan tetapi, Pemerintah Hindia Belanda juga membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa.

Pada tahun 1619, tepatnya tanggal 11 Oktober Gubernur Jan Pieterszoon Coen mengangkat Souw Beng Kong sebagai kapiten pertama (administratur) untuk penduduk Tionghoa di Batavia. Souw Beng Kong merupakan seorang saudagar besar yang berada di Banten. Coen membujuk Souw Beng Kong hijrah ke Batavia. Coen membangun perkampungan di muara Kali Ciliwung yang merupakan pemukiman orang Tionghoa. Souw Beng Kong memegang jabatan sebagai kapiten sampai pada tahun 1645. Kemudian ia digantikan oleh seorang insinyur air Phoa Beng Gam pada tahun 1645-1663. Di tahun 1648, kapiten Phoa meluruskan kali Ciliwung yang sebelumnya berkelok-kelok.

Di tahun 1690 etnis Tionghoa mencoba mengadu nasib di Batavia. Banyak dari mereka yang mendapat pekerjaan di perkebunan-perkebunan tebu, pabrik-pabrik gula, dan perusahaan-perusahaan perkayuan. Pada waktu itu perusahaan didirikan pada lahan-lahan pemerintahan di luar kota yang disewakan atau dijual

²⁶ Willard A. Hanna, *Hikayat Jakarta* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 2.

kepada orang Tionghoa kaya dalam kota.²⁷ Akhirnya akibat dari migrasi, sebagian dari ribuan orang Tionghoa menjadi gelandangan, dan sebagian kelompok kejahatan-kejahatan kecil, adapula yang mengadakan kekacauan-kekacauan. Pemerintah Hindia Belanda melakukan usaha untuk megurangi arus migran orang Tionghoa yaitu wajib lapor dalam waktu 14 hari kepada kapten Tionghoa (Ni Hoe Kong). Selain itu, nahkoda *jung* yang memasukkan orang Tionghoa didenda, awak *jung* dilarang menginap, dan membatasi jumlah penumpang (*jung* besar hanya boleh membawa 100 penumpang dan *jung* kecil 80 orang).

Di tahun 1740, Gubernur Jenderal Adriaan Valkenier dengan persetujuan Dewan Hindia (Raad van Indie) mengeluarkan keputusan yang intinya semua orang Tionghoa yang dicurigai (meskipun memiliki surat-surat yang sah) ditangkap dan dikirim ke Srilanka untuk dipekerjakan di perkebunan. Kebijakan demikian ternyata membawa resiko. Pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas itu melakukannya dengan cara yang sangat ceroboh, dan tidak berprikemanusiaan. Ratusan sampai ribuan orang Tionghoa ditangkap dan dideportasikan. Masyarakat Tionghoa yang berprofesi pengembara dan penjahat, tetapi juga pekerja-pekerja sederhana dan rajin ditangkap, dirantai dan seringkali dibunuh. Orang Tionghoa yang kaya dan berkedudukan baik pun tak luput dari penangkapan tersebut.²⁸ Terdengar kabar ketika orang Tionghoa yang akan di kirim ke Srilanka, bukan untuk dipekerjakan melainkan ditenggelamkan ke laut sebelum sampai ke Srilanka. Hal itu menjadi kemarahan orang Tionghoa, mereka membentuk

²⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

kelompok yang besar kemudian melengkapi diri dengan senjata-senjata yang dirampas dari penjaga Belanda dan akan mengancam akan menyerang kota.²⁹

Pemberontakan di tahun 1740 terjadi diduga berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduknya yang pesat dan dipicu merosotnya harga gula. Hal ini membuat banyak pabrik tutup, sehingga jumlah buruh banyak yang tidak tertampung. Akibatnya, kriminalitas, pemerasan, korupsi, dan suap untuk surat izin tinggal makin merajalela. Kerusuhan yang terjadi menyebabkan perekonomian Batavia hancur. Kondisi ini membuat pemerintah Hindia Belanda membujuk orang Tionghoa untuk bertempat tinggal dan membuka usaha mereka kembali di Batavia. Orang-orang Tionghoa ditempatkan di dalam wilayah atau kampung khusus yang dikenal dengan nama Glodok yang tidak jauh dari Statdhuis (Balai Kota) dengan maksud agar mudah diawasi.³⁰

Di tahun 1854, masyarakat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu *Europeanen*, *Vreemde Oosterlingen*, dan *Inlander*. Permasalahan pembagian kelompok masyarakat ini menjadi penting karena Pemerintah Hindia Belanda memberikan peraturan berpakaian, berpenampilan, dan tempat tinggal. Dari status hukum, pemerintah Belanda juga menetapkan Undang-Undang yang melarang suatu kelompok untuk memasuki tempat-tempat tertentu dan memberi perlakuan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Asep Kambali, *Menelusuri Jejak Tionghoa di Jakarta*, dalam Kompasiana.<http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/10/menelusuri-jejak-tionghoa-di-jakarta/> Diakses pada tanggal 14 April 2012.

hukum yang berbeda pada setiap kelompok. Dalam penampilan, *komprang*³¹ menjadi identik dengan orang-orang peranakan Tionghoa. Selain mengenakan *komprang*, orang-orang Tionghoa juga memakai sepatu Tiongkok dan baju tanpa leher *Thungsa* atau *Twikim*.³² *Inlander* menggunakan pakaian kebaya untuk perempuan atau pakaian penduduk pribumi lainnya sesuai dengan suku masing-masing. Keturunan Arab dan India memakai sorban dan jubah sementara keturunan Eropa mengenakan pakaian model jas dan celana *pantolon*.³³ Selain dibedakan dalam status hukum dan penampilan, warganegara turunan asing juga ditempatkan pada tempat tinggal yang berbeda dengan kelompok lain. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan *wijkenstelsel*³⁴ atau peraturan pemukiman di tempat-tempat yang telah ditentukan dan *passenstelsel*³⁵ sebagai surat jalan untuk meninggalkan wilayah kelompok-kelompok yang sudah ditentukan.

³¹ *Komprang* adalah celana sangat longgar, Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 454.

³² Beny G Setiono, *op. cit.*, hlm. 231.

³³ Firman Lubis, *Jakarta 1950-an Kenangan semasa Remaja*, (Jakarta: Masup, 2008), hlm. 94-95.

³⁴ *Wijkenstelsel* adalah sistem tempat tinggal. Untuk mencegah berbaurnya orang Tionghoa dengan warga setempat, pemerintah Hindia Belanda mengharuskan orang Tionghoa tinggal di sebuah wilayah khusus yang ditentukan. Pemukiman khusus Tionghoa itu disebut *Chineesche Camp*, Kampung Tionghoa (di Batavia).

³⁵ *Passenstelsel* adalah Sistem Pas. Untuk membatasi mobilitas orang Tionghoa, oleh pemerintah Hindia Belanda orang Tionghoa diharuskan meminta pas (semacam paspor) kepada residen atau kapten Tionghoa, jika ingin berpergian ke luar tempat tinggalnya. Dalam pas diterangkan tempat tujuan, jumlah orang yang pergi, nama dan alamat orang yang dituju, berapa lama dan sebagainya. Sesampainya di tempat tujuan, seseorang harus meminta cap dari residen atau kapten Tionghoa setempat.

Pada sensus 1930, perbedaan masih berdasarkan ras dan agama. Penyebutan untuk golongan kedua berubah menjadi *Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen*. Orang-orang Tionghoa dipisahkan dari keturunan Arab dan India. Perubahan ini disebabkan oleh tumbuhnya semangat nasionalisme Cina dan pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap orang-orang Jepang yang memiliki status yang sama dengan orang Eropa.³⁶ Keterangan di atas mulai menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan dan identitas tentu saja menjadi salah satu persoalan penting setelah Indonesia merdeka. Sampai pada tahun 1957 ketika Indonesia sudah merdeka. Mereka masih dikategorikan sebagai warganegara turunan asing.

³⁶ Leo Suryadinata, "Kwee Hiang Tjiat: Nasionalis Tionghoa Tokoh Asimilasi", *PRISMA NO.7*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 75.

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan tentang penggolongan orang-orang Tionghoa yang disamakan statusnya dengan orang-orang pribumi, setingkat lebih rendah dari orang-orang Eropa. Dalam hal hukum mereka dianggap sebagai kawula Belanda. Akan tetapi dalam kenyataannya, orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda digolongkan sebagai orang asing, bahkan untuk tujuan statistik mereka digolongkan sebagai Orang Timur Asing yang dibedakan dari Orang-orang Eropa dan Pribumi.¹

A. *Nederlandschap*: Kewarganegaraan Belanda

Pada abad ke 20, penggolongan yang diberlakukan di Hindia Belanda ini sesungguhnya melukai perasaan orang-orang Tionghoa. Saat rasa nasionalisme Tionghoa tumbuh, maka baik orang-orang Tionghoa yang di negeri Tiongkok maupun yang berada di Laut Cina Selatan menuntut dihapusnya penggolongan tersebut. Pemerintah Manchu pada waktu itu mulai menekan pemerintah Hindia Belanda untuk dapat menempatkan konsul-konsulnya di negeri koloni guna menghapus segala bentuk diskriminasi hukum bagi orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Melihat kondisi tersebut pemerintah Tiongkok pada tahun 1909 mengumumkan undang-undang kewarganegaraan yang menganut asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan yang ditentukan dari garis keturunan. Apabila seseorang yang dilahirkan orangtua dari warganegara Tiongkok, berarti ia

¹ Gouw Giok Siong, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Jakarta: Keng Po, 1958), hlm. 5.

merupakan warganegara dari Negara Tiongkok. Asas ini berlaku kepada seluruh rakyat Tiongkok yang berada di luar Negeri Tiongkok. Undang-undang tersebut yang kemudian menjadi inti pokok masalah dwikewarganegaraan ketika satu negara menganut azas kelahiran dan negara lain menganut azas keturunan bagi orang-orang Tionghoa di perantauan.

Pemerintah Belanda maupun pemerintah Tiongkok sama-sama memiliki hak yuridis atas orang-orang Tionghoa yang terlahir di Hindia Belanda. Masalah ini kemudian dibawa ke meja perundingan antara pemerintah Tiongkok dan Belanda. Perundingan tersebut menghasilkan penandatanganan Perjanjian Konsuler tahun 1911. Hakikat perjanjian itu adalah bahwa pemerintah kekaisaran Tiongkok mengakui bahwa orang Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda selama di negeri Belanda dan wilayah kekuasaannya tunduk pada undang-undang Belanda. Orang Tionghoa yang keluar dari wilayah kekuasaan Belanda artinya mereka bebas menentukan kebangsaannya. Sebaliknya Belanda menyetujui pembukaan konsulat Tiongkok di Hindia Belanda yang akan bertindak sebagai perwakilan dagang. Perjanjian konsuler tersebut berlaku untuk lima tahun dan akan diperbaharui setiap tahun.

Meskipun telah ada perjanjian konsuler, namun pada kenyataannya pemerintah RRT tetap melindungi keturunan Tionghoa di perantauan. Hal ini dapat diketahui dari contoh kasus Oen Keng Hian, seorang pegawai bank Belanda di Pulau Jawa. Pada tahun 1926, Oen menggelapkan uang dalam jumlah besar dan melarikan diri ke Tiongkok. Atas permintaan konsul Belanda, Oen ditahan di Shanghai. Kasus ini menimbulkan perselisihan antara pemerintah Belanda dan

pemerintah RRT yang mepermasalahkan status kewarganegaraan Oen. Pemerintah Belanda beranggapan bahwa Oen adalah kawula kerajaan Belanda, maka ia harus diadili di Jawa. Pemerintah RRT bersikeras bahwa Oen adalah warga Negara Tiongkok yang hanya dapat diadili di Tiongkok. Argumentasi pemerintah RRT adalah bahwa Oen belum pernah menyatakan melepas kewarganegaraan Tiongkok-nya, maka ia tetap warga Negara RRT. Akhirnya Oen diadili oleh pengadilan campuran dan dapat keluar dari tahanan dengan membayar uang tanggungan.²

Perjanjian konsuler di atas kemudian membawa dampak pada saat Indonesia merdeka, yaitu kewarganegaraan ganda. Timbulnya kewarganegaraan ganda ini karena perbedaan sistem penentuan kewarganegaraan yang dianut oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Pemerintah Indonesia menganut asas *ius soli*, sedangkan pemerintah Tiongkok menganut asas *ius sanguinis*. Adanya dua asas tersebut menjadikan etnis Tionghoa di perantauan mendapatkan status dwikewarganegaraan. Pemerintah Tiongkok tetap berpegang teguh pada Undang-undang Kewarganegaraan Tiongkok yang ditetapkan pada tahun 1929. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tidak ada cara bagi seorang Tionghoa untuk meninggalkan kewarganegaraan Tionghoa kecuali mendapat izin dari menteri dalam negeri Tiongkok. Menteri hanya dapat memberikan izin bila yang bersangkutan telah menjalankan wajib militer untuk Angkatan Bersenjata Tiongkok.

² Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT.Temprint, 1984), hlm. 122.

B. Sistem Kewarganegaraan Indonesia Setelah Merdeka (1949-1951)

Pada tanggal 10 April 1946, dikeluarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1946, mengenai warga negara dan penduduk Negara. Undang-undang tersebut berisikan sebagai berikut: pertama, Orang asli merupakan warganegara Indonesia. Kedua, seseorang yang lahir dari keturunan dan diam di negara Indonesia sedikitnya 5 tahun berturut-turut tidak termasuk dalam poin pertama. Ketika mereka telah berumur 21 tahun dan memiliki warga negara lain, ia harus menyatakan keberatan menjadi warganegara Indonesia. Ketiga, Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia bisa melakukannya dengan cara naturalisasi. Keempat, Anak yang lahir dan disahkan dengan cara yang sah oleh bapaknya, maka ia mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Kelima, Anak yang lahir dalam waktu 300 hari mempunyai kewarganegaraan Indonesia, ketika bapaknya berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia. Keenam, Anak yang hanya diakui oleh ibunya dengan cara sah, yang pada waktu lahirnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Ketujuh, Anak yang diangkat secara sah oleh seorang warga negara Indonesia. Kedelapan, Anak yang lahir di negara Indonesia, yang oleh bapak ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah. Kesembilan, Anak yang lahir di negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan orang tuanya.³

Pada tahun 1947, Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara Republik Indonesia diubah dan ditambah sebagai berikut: pertama, Pasal 1, didefinisikan bahwa, orang yang berasal dari keturunan Negara

³ Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 55-56.

lain yang lahir di Indonesia dan kediaman selama sedikitnya lima (5) tahun berturut-turut, dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin akan menjadi warganegara Indonesia. Kedua, titik pada pasal 1 bab I, diganti dengan titik koma dan ditambahkan satu ayat yang menyatakan badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia.⁴

Berdasarkan pasal-pasal Konferensi Meja Bundar (KMB), semua orang Tionghoa kelahiran Indonesia merupakan kawula Belanda. Mereka bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa berbuat apa-apa, atau mereka bisa memperoleh kedudukannya sebagai warga Negara Tiongkok dengan menolak resmi kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu dua tahun (1949-1951).⁵

Departemen Kehakiman Republik Indonesia memperkirakan banyak orang Tionghoa kelahiran Indonesia telah menolak kewarganegaraan Indonesia. Mereka kebanyakan adalah kaum totok. Sebagian besar adalah anak-anak dari ayah kelahiran Tiongkok, anak-anak yang pilihkan kewarganegaraannya dilakukan oleh orang tuanya. Sampai pada akhirnya dari pasal-pasal KMB hampir tidak memecahkan masalah kewarganegaraan orang Tionghoa.

Masa awal pemerintahan demokrasi liberal, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengawasan orang asing, yang termasuk dalam Undang-

⁴ *Ibid.*, hlm.70.

⁵ Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1979), hlm. 16.

Undang Pengawasan Orang Asing Nomor 9 tahun 1953.⁶ Menteri Kehakiman membentuk organisasi guna melakukan pengawasan bagi orang asing, mengenai tugas dan kekuasaannya diatur oleh pemerintah. Orang asing yang berada di Indonesia berkewajiban memberikan keterangan mengenai dirinya. Apabila melanggar, pemerintah berhak untuk mengurung mereka dalam suatu tempat, melarang mereka berpergian, dan mengeluarkan mereka dari negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Perubahan pemerintahan Hindia Belanda beralih menjadi kedaulatan Republik Indonesia, berdampak pada perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang melakukan fusi dan membentuk Badan Permusyawaratan Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa (Baperwatt). Perkumpulan ini didirikan pada bulan Maret 1954 di Jakarta.⁸ Baperwatt berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Istilah warga keturunan Tionghoa, kini diganti menjadi Indonesia. Tujuan organisasi ini ditujukan tidak hanya pada masyarakat keturunan Tionghoa, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Fungsinya adalah untuk membantu dan memberikan sumbangan kepada usaha rakyat dan pemerintah untuk mewujudkan hukum negara yang demokratis serta konsep kewarganegaraan.⁹

⁶ Undang-Undang Darurat tanggal 16 Oktober 1953, Nomor 9 Lembar Negara 1953 no. 64.

⁷ *Ibid.*

⁸ Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm.62.

⁹ “kata Pengantar” dalam Berita Baperki (Djakarta: Baperki. 1954), hlm.1.

Baperki menganggap konsep kewarganegaraan bertumpu pada konsep politis bukan etnis saja. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam etnis dan suku bangsa. Peranakan Tionghoa merupakan sebagai bagian dari etnis, yang sejajar dengan etnis-etnis yang lainnya, dan merupakan warga negara Indonesia.¹⁰ Organisasi ini menanyakan status kedudukan mengenai kewarganegaraan mereka, hal ini dikarenakan pada waktu berlakunya RIS kedudukan mereka disamakan dengan warga negara Indonesia, seperti berikut ini:

...orang asing yang kekawulaan Belanda, bukanlah orang-orang Belanda jang orang dewasa jang menjelang penjerahan kedaulatan dan jang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Republik Indonesia Serikat, mendapat kebangsaaan Indonesia, tapi berhak menolaknya dalam waktu jang ditetapkan itu; jika dalam hal ini menjelang waktu penyerahan kedaulatan bangsanya tidak lain lagi dari kebangsaan Belanda, maka mereka mendapat kembali kebangsaannya itu. Jika pada saat itu mereka mempunyai kebangsaaan asing pula maka sesudah menolak kebangsaan Indonesia mereka hanyalah mendapat kembali kebangsaan Belanda, jikalau mereka pada waktu itu menyatakan keterangan guna itu.¹¹

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, dilandaskan pada asas *ius soli* dan sistem pasif.¹² Adapun mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai berikut:

“Warga Negara Indonesia terdiri dari orang Asli yang bertempat tinggal didaerah di Indonesia dan orang-orang yang tidak dalam

¹⁰ *Ibid.*, hlm.2.

¹¹ Pasal 5 Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat dalam Lembaran Negara tahun 1946 no.16290.

¹² Sistem pasif, lihat. Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm.117.

kelompok tersebut di atas, tetapi yang lahir didaerah-daerah teritorial Indonesia, dan telah tinggal selama lima tahun terakhir, secara berturut-turut, serta mereka yang berumur 21 tahun, dengan syarat orang-orang tersebut tidak menolak kewarga-negaraaan Indonesia, karena menjadi warga negara lain.”¹³

Diberlakukannya sistem pasif untuk mempercepat proses pemindahan kekuasaan dari Belanda kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Tionghoa peranakan digunakan untuk dukungan moril, sebab secara politik mereka berorientasi pada Indonesia.¹⁴ Masa pemberlakuan sistem pasif undang-undang mengacu pada Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia, menggunakan UU kewarganegaraan tahun 1947. Peraturan ini menjelaskan mengenai hak memilih dan menolak kebangsaan Indonesia bagi orang yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan kawula negara Belanda.¹⁵ Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan mengenai cara pemilihan dan penolakan kebangsaan Indonesia, dengan cara lisan maupun tulisan, yang diberikan pada: *pertama*, hakim perdata harian bisa orang yang bersangkutan, yang daerah hukumnya meliputi daerah orang tersebut tinggal. *Kedua*, hakim perdata tersebut di atas, bupati atau pejabat Pamong Praja setingkat bupati. *Ketiga*, Komisaris Agung Republik Indonesia Serikat pada pemerintahan Kerajaan Belanda. *keempat*, wakil Diplomatik atau Konsul Republik Indonesia Serikat, atau

¹³ Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia, menggunakan UU kewarganegaraan tahun 1947.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ (Per. Pem. No. 1. Tanggal 31 Januari 1950) Lembar Negara tahun 1950 no.14378.

pejabat lain yang disertai mengurus kepentingan Indonesia pada sesuatu negara asing. *Kelima*, Pengadilan negeri (*landgerecht*).

Pasca Konferensi Asia-Afrika mengadakan perjanjian dengan Peking, mengenai permasalahan Tionghoa Peranakan di Indonesia mengakibatkan meningkatnya pengaruh komunisme di Asia. Kewarganegaraan ganda tersebut menjadi konsekuensi bagi para peranakan Tionghoa. Ketentuan perjanjian menyatakan bahwa, orang dewasa yang berkewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan dari Tiongkok. Orang yang berkewarganegaraan ganda tetapi mengabaikan ketentuan untuk memilih kewarganegaraan dalam waktu peralihan selama dua tahun, pada akhirnya hanya mempunyai kewarganegaraan RRT.

Rancangan undang-undang tersebut timbul dari memuncaknya ketidakpuasan terhadap akibat-akibat perumusan KMB. Hasil Konferensi Meja Bundar tahun 1949, dikatakan bahwa orang-orang Tionghoa yang semula kawula Negara Belanda diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraannya. Mereka akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara otomatis atau memperkuat kewarganegaraan Tiongkok dengan penolakan secara resmi kewarganegaraan Indonesia. Kesempatan untuk memilih ini diberikan selama dua tahun dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1951.¹⁶ Selama periode tersebut banyak peranakan Tionghoa yang dituntut sebagai warganegara yang baik oleh pemerintah Indonesia maupun RRT.

¹⁶ Mely G. Tan, *Loc, cit.*

C. Perjanjian Dwikewarganegaraan: Indonesianisasi Terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionggok.

1. Pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan

Usaha-usaha pemerintah RI untuk mewujudkan Perjanjian Dwikewarganegaraan ini diawali pada masa kabinet Ali yang disampaikan kepada Parlemen pada tahun 1953. Pada saat itu dikemukakan usul untuk membuat undang-undang kewarganegaraan yang akan membawa akibat terhadap status hukum orang-orang Tionghoa perantauan di Indonesia. Pada bulan Februari 1954 rancangan itu telah siap, namun karena belum ada pembicaraan dengan pihak RRT mengenai aspek-aspek tertentu dari undang-undang yang diusulkan tersebut, maka undang-undang yang diusulkan itu belum dapat diberlakukan.

Orang keturunan Tionghoa yang tidak melakukan penolakan terhadap kewarganegaraan Indonesia ternyata secara hukum tetap memiliki kewarganegaraan Tionggok. Isi perjanjian KMB tersebut tidak menyelesaikan masalah kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Kabinet Ali berkesimpulan bahwa keadaan tersebut harus segera diperbaiki. Tidak ada satu pemerintah pun yang siap untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan orang Tionghoa sebelum kabinet Ali Sastroamidjojo.

Pemerintah RRT tetap menjalankan politik kebudayaan guna memelihara kesetiaan para migran untuk selalu setia pada bangsa dan negeri leluhurnya. Keuntungan yang mereka peroleh dari berdagang di negeri orang digunakan untuk membangun negeri leluhurnya. Pemerintah RRT

menggunakan para migran untuk menyebarkan ideologinya.¹⁷ Dijalankannya politik kebudayaan RRT tersebut maka pemerintah RI menyesuaikan perubahan-perubahan di dalam hubungannya. Beberapa negara Asia Tenggara menekan pemerintah RRT untuk mengubah masalah-masalah yang tidak berkenan bagi negara lain. Sehubungan dengan tersebut, minoritas Tionghoa digunakan demi keuntungan bagi pemerintah RRT. Pemerintah RRT dapat melepaskan tuntutananya terhadap kewarganegaraan Tiongkok yang lahir di luar negeri. Hal itu merupakan suatu dorongan bagi beberapa negara Asia Tenggara untuk memajukan hubungannya dengan RRT.

Masalah di atas juga dikemukakan oleh Duta Besar Mononutu setibanya di Peking. Kesempatan Dubes RI untuk mengajukan pemecahan masalah kewarganegaraan orang Tionghoa mendapat tanggapan positif dari Perdana Menteri Chou En Lai. Menurut Mononutu, pemimpin Tiongkok itu menyatakan bahwa dengan menyetujui untuk membicarakan masalah kewarganegaraan saja sudah merupakan suatu langkah besar, karena akan melepaskan politik tradisional Tiongkok. Pemerintah RRT juga mengemukakan bahwa bila perjanjian dengan Jakarta berhasil maka akan diperluas dengan negara-negara lain secara bilateral.

Pada tanggal 24 November dan 23 Desember 1954 dikirim suatu tim khusus ke Peking untuk melakukan perundingan pertama. Perundingan ini diakhiri dengan persetujuan formal mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tanggal 22 April 1955 tepat pada waktu Konferensi

¹⁷ Hidajat, Z.M, *Manusia dan Kebudayaan Cina di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1993), hlm. 70.

Asia-Afrika. Sikap keras pemerintah Tiongkok terhadap status dwikewarganegaraan orang-orang Tionghoa peranan ini berubah pada pertengahan tahun 1955 saat tukar-menukar pendapat antara Chou En Lai dan Ali Sastroamidjojo I. Chou mengatakan bahwa merupakan hak pemerintah Indonesia untuk memutuskan siapa yang boleh menjadi warganegara Indonesia dan siapa yang tidak boleh bagi orang-orang dari golongan Tionghoa.¹⁸

Tukar menukar pendapat antara Chou En Lai dan Ali Sastroamidjojo dilanjutkan dalam perundingan antara Jakarta dan Peking. Pada tanggal 22 April 1955, bersamaan dengan berakhirnya Konferensi Asia-Afrika, perjanjian mengenai dwikewarganegaraan ditandatangani. Maksud perjanjian tersebut adalah untuk memberikan pemisahan yang tegas antara warganegara Indonesia dengan warganegara RRT, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan ke arah tercapainya suatu proses asimilasi, untuk menjadi bangsa yang homogen.¹⁹

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk memilih salah satu di antara dua kewarganegaraan dalam waktu dua tahun setelah perjanjian itu mulai berlaku. Ketentuan ini dikenakan bagi mereka yang sudah dewasa, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagi anak yang belum dewasa kewarganegaraan mereka ditentukan oleh kedua orang tuanya. Seorang warganegara RI yang telah menikah dengan warganegara RRT, maka masing-

¹⁸ Leo Suryadinata, *Loc. cit.*

¹⁹ Leo Suryadinata, *Ibid*, hlm. 118.

masing tetap memiliki kewarganegaraan yang dimilikinya ketika sebelum menikah. Kecuali bila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan yang lain.

Pelaksanaan pemilihan kewarganegaraan menggunakan sistem aktif. Sistem aktif ini, seseorang harus menentukan pilihannya dengan menyatakan menerima satu kewarganegaraan dan melepas kewarganegaraan lain dihadapan petugas negara. Pada awalnya pemerintah Tiongkok menghendaki digunakannya sistem pasif, yaitu penerimaan kewarganegaraan secara otomatis tanpa adanya pernyataan di depan pengadilan, seperti yang sudah berjalan sampai saat itu. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menolaknya dan menghendaki sistem aktif. Sistem aktif, yaitu penerimaan atau pelepasan suatu kewarganegaraan yang harus dilakukan dengan membuat pernyataan di depan pengadilan. Pemerintah Indonesia tidak mempercayai kepada etnis Tionghoa, karena mereka tidak hanya secara ekonominya, melainkan mereka juga tak dapat berasimilasi. Akhirnya pemerintah melakukan sistem aktif ini untuk menunjukkan kesetiaan pada negara dan kesungguhan tersebut guna membatasi kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia.²⁰

Pemerintah Tiongkok menyetujui usul pemerintah Indonesia yang mulai menggunakan sistem aktif. Menurut pemerintah RRT, sistem pasif yang telah dilaksanakan selama ini sebenarnya memberikan hasil kurang lebih sama dengan sistem aktif. Kesediaan pemerintah Tiongkok menggunakan sistem aktif tidak lepas dari masalah-masalah etnis Tionghoa di luar negeri. Sejak

²⁰ *Ibid.*

pemerintahan Tiongkok terdahulu masalah etnis Tionghoa tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Perjanjian dengan pemerintah Indonesia ini merupakan salah satu kesempatan bagi pemerintah RRT untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Ketentuan-ketentuan di atas dimuat dalam Undang-undang No.2 tahun 1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaan (PP No.20 tahun 1959 dan PP No.5 tahun 1961). Undang-undang dwikewarganegaraan mensyaratkan bahwa penolakan kewarganegaraan Tiongkok harus dilakukan di Pengadilan Negeri di Indonesia, atau di kedutaan-kedutaan atau di konsulat-konsulat Indonesia. Setiap orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda harus menolak kewarganegaraan Tiongkok dalam periode antara 20 Januari 1960 sampai dengan 20 Januari 1962. Di luar periode itu dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.²¹

Usaha-usaha dari RI dan RRT dalam mewujudkan perjanjian ini yaitu pertukaran nota Perjanjian dwikewarganegaraan antara Perdana Menteri kedua negara pada tanggal 3 Juni 1955 di Peking. Nota tersebut mengatur tentang kewarganegaraan rangkap yang harus dipilih salah satu. Menlu RRT Tjen Ji mengatakan bahwa penandatanganan mengenai pertukaran ratifikasi telah disahkan oleh kedua pihak menurut prosedur undang-undang masing-masing. Hal ini dilakukan mengingat para perantau Tionghoa mempunyai dwikewarganegaraan tidak wajar. Status tersebut bukan hanya merugikan perantau Tiongkok tetapi ada kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang memusuhi persahabatan kedua negara untuk

²¹ Gouw Giok Siong, *op,cit.*, hlm. 170.

mengadu domba. Pemerintah Tiongkok bersikap aktif dan sungguh-sungguh berusaha untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan.

Perjanjian tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia membentuk panitia yang dilantik pada tanggal 25 Januari 1960 oleh Menteri Luar Negeri Subandrio. Panitia ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan dengan bijaksana agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. Perjanjian dwikewarganegaraan tersebut diratifikasi dalam undang-undang No.2 tahun 1958 dan disahkan di Jakarta pada 11 Januari 1958. Undang-undang No.2 tahun 1958 ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan yang ada pada waktu itu dan mencegah timbulnya dwikewarganegaraan di kemudian hari. Masalah dwikewarganegaraan diselesaikan dengan cara menghilangkan salah satu kewarganegaraan yang serempak dimiliki seseorang. Pada hakikatnya dalam perjanjian tersebut diatur dan ditentukan siapa saja orang Tionghoa di Indonesia yang diakui berstatus WNI dan siapa saja yang berstatus warga negara RRT. Kedua belah pihak menyepakati hal-hal berikut ini:

- a. Suatu golongan yang mempunyai dwikewarganegaraan dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap lagi, karena menurut pendapat Pemerintah Indonesia kedudukan sosial politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya telah melepaskan kewarganegaraan RRT-nya.
- b. Mereka yang berkewarganegaraan rangkap selain butir a, harus memilih dengan kehendak sendiri. Salah satu kewarganegaraan yang dipilih harus

mereka pertahankan. Ketentuan tersebut menyatakan mereka yang tidak melakukan pilihannya berarti menolak menjadi warga negara asing. Suami/istri yang berkewarganegaraan rangkap menentukan pilihannya masing-masing. Selama anak belum dewasa, kewarganegaraannya mengikuti pilihan bapak/ibunya dan setelah dewasa anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Pasal X Perjanjian dwikewarganegaraan menentukan bahwa apabila seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara RRT, masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan asal. Akan tetapi, dengan pengecualian salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari partnernya. Apabila ia memperoleh kewarganegaraan partnernya, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya.²²

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 2 tahun 1958. Peraturan tersebut antara lain menjelaskan bahwa mereka yang melepas kewarganegaraan RRT, harus membuat pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis. Pernyataan tersebut berupa “surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan RRT untuk tetap menjadi warga negara RI”. Mereka yang membuat pernyataan lisan akan diberi “surat catatan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan

²² Ketentuan di atas merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yang diatur dalam Undang-undang No.62 tahun 1958. Lihat lampiran 5.

RRT untuk tetap menjadi warga negara Indonesia”.²³ Selanjutnya diatur siapa saja orang Tionghoa yang terkena dan dianggap mempunyai dwikewarganegaraan dan mereka diharuskan membuat pernyataan melepaskan diri dari warga negara RRT.

Pasal 12 Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 menyebutkan bahwa ada berbagai kelompok Warga Negara Indonesia yang dikelompokkan sebagai Warga Negara Indonesia tunggal. Orang Tionghoa yang telah bebas tidak memilih kewarganegaraan di Pengadilan Negeri dan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, yaitu mereka yang pernah membela nama Republik Indonesia serta mereka yang mengikuti Pemilu 1955.²⁴ Orang yang telah bersumpah setia kepada Indonesia karena menjadi anggota badan pemerintah, anggota angkatan bersenjata, veteran Angkatan Darat, dan orang yang secara resmi mewakili Indonesia dalam fungsi-fungsi Internasional lebih dari satu kali, maka dibebaskan dari keharusan memberikan pernyataan kesetiaan lagi.²⁵

Bagi orang Tionghoa yang berkewarganegaraan ganda disediakan sejumlah formulir pernyataan. Enam jenis formulir bagi orang-orang Tionghoa yang dianggap mempunyai dwikewarganegaraan. Lima dari enam jenis formulir tersebut dituangkan pada PP No.20 tahun 1959 (formulir I-V),

²³ Hasil wawancara dengan Hendra Tan pada tanggal 14 Desember 2011.

²⁴ Wawancara dengan Hendra Tan pada 14 Desember 2011. Hal ini senada juga dikemukakan oleh Dahana dalam wawancara tanggal 9 Desember 2011.

²⁵ Leo Suryadinata, *op. cit.* hlm. 125. Hal tersebut juga diceritakan oleh Wanandi dan Riyanto.

sedangkan satu jenis formulir lainnya (formulir VI) adalah perwujudan dari PP No.5 tahun 1961. Masing-masing formulir tersebut yang menunjukkan latar belakang pemohon dan merupakan indikator penting untuk menelusuri keabsahan keterangan kewarganegaraan RI, khususnya dalam rangka menentukan status kewarganegaraan para keturunan mereka di kemudian hari. Surat pernyataan keterangan ini merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT ini dituangkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1958. Pada tanggal 11 Januari 1958, undang-undang tersebut diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 dengan masa opsi mulai tanggal 20 Januari 1960 sampai 20 Januari 1962 yang telah menyelesaikan permasalahan dwikewarganegaraan RI-RRT.

2. Indonesianisasi Terhadap Warganegara Indonesia Keturunan Tiongkok

Undang-Undang untuk kewarganegaraan ganda ini, diperuntukkan bagi masyarakat Tionghoa peranakan. Menurut Skinner, pada tahun 1960, di Jakarta diperkirakan sekitar 317.270 jiwa, masyarakat Tionghoa peranakan memilih kewarganegaraan Indonesia, dan sekitar 349.857 jiwa, memilih kewarganegaraan Tiongkok, atau tidak berkewarganegaraan (*stateless*).²⁶

²⁶ Bagi yang tidak kewarganegaraan, mereka menggabungkan diri dengan pihak nasionalis Cina, yakni Taiwan. Akan tetapi bagi Indonesia, Taiwan tidak diakui, sebab pemerintahan RRT berada di Peking, lihat. Donal E. Wilmott, *The Nationals Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958*, (Ithaca: Cornell University, Modern Indonesia Project, 1961), hlm. 143.

Dilihat dari kasus diatas, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958.

Dalam Undang-Undang Nomor. 62 tahun 1958,²⁷ menjelaskan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana menyatakan bahwa warganegara Republik Indonesia, sebagai berikut: pertama, orang yang berdasarkan perundangan atau peraturan yang berlaku, telah menjadi kewarganegaraan Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan. Kedua, orang yang lahir mempunyai hubungan hukum dengan kewarganegaraan ayahnya, seorang warga negara Indonesia. Ketiga, anak yang telah berumur 300 hari dari ayah yang berkewarganegaraan Indonesia, walau sang ayah meninggal dunia. Keempat, orang yang waktu lahir memiliki ibu Indonesia dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan kewarganegaraan ayahnya. Kelima, orang yang memiliki ibu berkewarganegaraan dan ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegaraanya. Keenam, orang yang lahir di Republik Indonesia dan kedua orang tuanya tidak diketahui. Ketujuh, orang yang diketemukan di wilayah republik Indonesia, selama tidak diketahui oleh ayahnya. Kedelapan, orang yang lahir di Republik Indonesia dan kedua orang tuanya tidak diketahui kewarganegaraanya. Kesembilan, orang yang lahir di Indonesia, dan tidak mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya. Kesepuluh, orang yang memperoleh kewarganegaraan.²⁸

²⁷ Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nomor. 62 tahun 1958. Koleksi Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Lihat lampiran 5.

²⁸ Lebih lengkap lihat lampiran 5.

Pasal dua berikutnya disebutkan bahwa untuk menjadi warganegara RI anak yang diangkat secara sah oleh orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, dan memiliki pernyataan yang sah oleh pengadilan negeri. Pasal tiga, disebutkan bahwa anak diluar perkawinan dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia atau anak dari perkawinan yang sah, tapi dalam perceraian hakim memutuskan hak asuh berada dalam tanggungan ibu. Permohonan yang diajukan, diatur pasal lima syarat-syarat permohonan: pertama, telah berusia 21 tahun. Kedua, telah menetap dan tinggal di Indonesia selama 5 tahun, hingga 10 tahun di Indonesia. Ketiga, menikah dengan perempuan berkewarganegaraan Indonesia. Keempat, cukup mengerti sejarah Indonesia dan dapat berbahasa Indonesia. Kelima, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Keenam, mempunyai mata pencaharian tetap. Ketujuh, tidak mempunyai kewarganegaraan dan akan kehilangan kewarganegaraan. Kedelapan, membayar biaya administrasi.²⁹

Diberlakukannya undang-undang Kewarganegaraan no. 62 tahun 1958, maka Indonesia menerapkan *ius soli* (berdasarkan asas tempat kelahiran) dan juga sistem aktif, yaitu sistem yang mensyaratkan adanya penerimaan bagi Tionghoa lokal dan juga secara naturalisasi terhadap peranakan Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia. undang-undang No.

²⁹ *Ibid.*

62 tahun 1958 ini, mengalami sebuah peningkatan yang cukup dratis dari kalangan Tionghoa peranakan untuk menjadi Warga Negara Indonesia.³⁰

Di sisi lain, Departemen Kehakiman, memutuskan identifikasi stateless (orang yang tidak berkewarganegaraan),³¹ yaitu: pertama, mereka yang tidak menjadi warga negara suatu negara manapun. Kedua, mereka yang memegang kewarganegaraan suatu negara yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia.³² Negara yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, seperti Taiwan, maka dari itu bagi mereka (orang Tionghoa) yang menggunakan paspor Taiwan, dianggap sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan.

Pelaksanaan Perjanjian dwi kewarganegaraan disyaratkan untuk selesai pada awal tahun 1962. Semua orang dewasa yang terkena dengan perjanjian itu harus menyatakan pilihan mereka. Sekalipun dibutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum semua pengajuan diproses secara sepenuhnya. Menjelang tahun 1963, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Tionghoa Indonesia telah digolongkan menjadi dua kelompok, yakni

³⁰ Untuk mengetahui jumlah permohonan/naturalisasi pada masyarakat Tionghoa di Indonesia di DKI Jakarta per 31 Desember 1960, lihat lampiran 27.

³¹ Berita Negara tahun 1955. No. 234, koleksi Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Lihat lampiran 13. Secara hukum, orang Tionghoa asing, tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan, sebab RRT menganggap bahwa orang Tionghoa yang dipandang oleh pemerintah Indonesia, tidak berkewarganegaraan, pemerintah RRT mengklaim sebagai warga negaranya. Begitu juga sebaliknya, bagi pemerintahan Taiwan, yang mengklaim semua orang Tionghoa adalah warga negara RRT, lihat. Leo Suryadinata, *op. cit.*, hlm. 127.

³² Pengumuman Departemen kehakiman mengenai orang yang tidak berkewarganegaraan, dalam *Sinar Harapan*, 21 Juli 1969, dan *Kompas*, tanggal 22 Juli 1969.

berkewarganegaraan RRT, yang terdaftar sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan (*stateless*). Kedua kelompok ini bersifat statis, dengan kata lain kemungkinan untuk terjadinya pergeseran dari satu kategori ke kategori lainnya adalah relative kecil.

Masyarakat Tionghoa diberikan sebuah perlakuan khusus, dimana mereka diberikan suatu pilihan untuk memilih kewarganegaraan, hingga batas usia mereka dianggap cukup. Menurut Undang Undang No. 62 tahun 1958, hingga batas 21 tahun atau telah menikah, walaupun disatu sisi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia bisa dapat lewat jalur naturalisasi. Bagi sebagian masyarakat peranakan Tionghoa, kewarganegaraan bukanlah suatu masyarakat yang serius, permasalahan pokok adalah mengenai tindak diskriminasi yang akan muncul dari perbedaan tersebut. Orang Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia adalah suatu konsekuensi logis, dengan begitu menjadi WNI berarti sama juga dengan meninggalkan identitas budaya mereka.

Pada tanggal 10 April 1969, Undang-undang No.2 tahun 1958 dicabut dengan Undang-undang No.4 tahun 1969. Pencabutan ini dilakukan karena menurut Titi Sumbung “....perjanjian tersebut, sebagaimana diuraikan oleh seorang pengacara peranakan, tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan karena sebagian besar orang yang berkewarganegaraan ganda telah memilih warga negara Indonesia pada akhir 1961.”³³

³³ Leo Suryadinata, *Ibid.*, hlm. 128-129.

Berdasarkan ketentuan yang baru, mereka yang memiliki status warganegara Indonesia dalam undang-undang no.2 tahun 1958 tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan keturunannya. Selanjutnya mereka tunduk kepada undang-undang no. 2 tahun 1958 mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 1969, Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran No. DTB/16/4 tentang Penyelesaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1958 yang menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan Undang-undang no.2 tahun 1958 tidak dapat dipergunakan lagi mulai tanggal 10 April 1969. Surat edaran tersebut kemudian diikuti oleh Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTC/9/11, tanggal 1 Juli 1969, yang ditujukan kepada semua ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.³⁴ Surat Edaran ini memberikan pedoman kerja, salah satunya adalah Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) bagi orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 7 ayat 2, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang undang no.62 tahun 1958.³⁵

³⁴ Hasil wawancara dengan Sukiman Hartono menambahkan pencabutan atas UU no.2 1958 pada tanggal 14 Desember 2011.

³⁵ Tambahan dari wawancara Sukiman Hartono bahwa Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) masih diharuskan dimiliki oleh orang Tionghoa yang telah menyatakan kesetiaannya yang umurnya diatas 70 tahun, karena digunakan sebagai bukti bahwa orang Tionghoa tersebut telah menjadi Warga Negara Indonesia.

Setelah Perjanjian dwikewarganegaraan tersebut dibatalkan pada 10 April 1969 dengan UU no 4/1969, permasalahan status WNI Tionghoa sudah terselesaikan. Anak-anak WNI Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal. Setelah ia dewasa tidak diperbolehkan lagi untuk memilih kewarganegaraan lain, selain kewarganegaraan Indonesia, dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraan dengan SBKRI.

BAB IV

DAMPAK PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN RI-RRT DI GLODOK TAHUN 1955-1969

Pada tanggal 22 April 1955 telah tercapai perjanjian antara pemerintah RI dan RRT mengenai masalah dwikewarganegaraan. Perjanjian tersebut telah diundangkan pada tanggal 27 Januari 1958 (Lembaran Negara no.5 tahun 1958) dan dilaksanakan secara formal orang keturunan Tionghoa di Indonesia yang memilih dan menentukan kewarganegaraannya diberi waktu selama dua tahun pada 20 Januari 1960-1962 sesuai dengan perjanjian.

A. Bidang Sosial: Asimilasi (Pembauran Dua Kebudayaan)

Perjanjian dwikewarganegaraan ini semula dikatakan tidak menyelesaikan persoalan kewarganegaraan orang Tionghoa, karena pada saat itu masih terdapat kekaburan kewarganegaraan di antara orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Titi Sumbung mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi tentang pelaksanaan Perjanjian dwi kewarganegaraan yaitu:¹

1. Sebagian besar dari mereka telah memilih kewarganegaraan RI dan melepaskan kewarganegaraan RRT.
2. Banyak di antara mereka mengikuti perjanjian ini karena seruan RRT. Beberapa dari mereka juga tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dengan adanya perjanjian tersebut. Secara yuridis formal mereka adalah warga Negara RRT. Mereka yang bersifat apatis dengan kewarganegaraan

¹ Titi Sumbung, "Perjanjian RI-RRT Mengenai Masalah Dwi-Warga-Negara", *Sinar Harapan*, 26 dan 28 Februari 1969.

RRT-nya sebab mereka merasa tidak ada pilihan lain. Pemerintah Indonesia pada saat itu tidak mengakui Republik Tiongkok Taiwan. Orang yang berstatus demikian lebih banyak lagi jumlahnya sekarang. Di bukanya hubungan Indonesia-Taiwan banyak di antara mereka tidak memilih berdasarkan perjanjian. Mereka lebih memilih menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

3. Anak-anak yang belum dewasa, setelah mereka dewasa 18 tahun diharuskan memilih kewarganegaraan meskipun orang tuanya berdasarkan perjanjian ini sudah menjadi orang Indonesia. Keadaan tersebut akan terus berlaku, juga kepada anak-anak yang dilahirkan setelah perjanjian. Perjanjian ini berlaku untuk 20 tahun dan sesudah 20 tahun akan terus berlaku, kecuali salah satu pihak hendak memutuskannya.

Status kewarganegaraan anak-anak keturunan Tionghoa masih belum jelas, yaitu masih berstatus sementara. Anak-anak yang sudah berumur 18 tahun, dalam waktu satu tahun ia harus memilih warga negara RI ataupun RRT. Jika ia memilih kewarganegaraan RI maka ia harus menyatakan melepaskan kewarganegaraan RRT, demikian juga sebaliknya. Dibekukannya hubungan diplomatik antara RI-RRT, pernyataan melepaskan kewarganegaraan RRT sudah tidak mempunyai arti lagi, sedangkan bagi mereka yang mau memilih kewarganegaraan RRT, praktis sudah tidak ada yang menampung lagi dengan kenyataan-kenyataan tersebut sudah jelas bahwa perjanjian tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan, yang ada justru merugikan kepentingan-kepentingan

nasional bangsa Indonesia.² Selain berdampak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia, terbentuknya perjanjian dwikewarganegaraan pada tahun 1955, tentunya menimbulkan dampak bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di Glodok. Baik dampak dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan disyaratkan untuk selesai pada awal tahun 1962. Semua orang dewasa yang terkena dengan perjanjian itu harus menyatakan pilihan mereka. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum semua pengajuan diproses secara sepenuhnya. Menjelang tahun 1963, sebagian besar masyarakat Tionghoa Indonesia digolongkan menjadi dua kelompok, yakni berkewarganegaraan RRT, dan yang terdaftar sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan (*stateless*). Kedua kelompok ini bersifat statis, dengan kata lain kemungkinan untuk terjadinya pergeseran dari satu kategori ke kategori lainnya adalah relative kecil.

Peraturan yang mencegah batas-batas kewarganegaraan tersebut adalah anak-anak keturunan Tionghoa yang orang tuanya mempunyai kewarganegaraan ganda. Mereka diberikan sebuah perlakuan khusus, dimana mereka diberikan suatu pilihan untuk memilih kewarganegaraan, hingga batas usia mereka dianggap cukup. Menurut Undang Undang No. 62 tahun 1958, hingga batas 21 tahun atau telah menikah, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat melewati jalur naturalisasi. Bagi sebagian masyarakat peranakan Tionghoa, kewarganegaraan bukanlah suatu masyarakat yang serius. Permasalahan

² *Ibid.*

pokoknya adalah mengenai tindak diskriminasi yang muncul dari perbedaan tersebut. Di satu sisi dengan menjadi WNI berarti sama juga dengan meninggalkan identitas budaya mereka, kalangan ini disebut dengan kalangan pluralis. Di sisi lain terdapat kalangan pembauran, dimana mereka menganjurkan untuk melebur pada masyarakat Indonesia atau yang biasa disebut dengan asimilasi.

Orang-orang Tionghoa menjadi penduduk pribumi dalam kaitannya dengan agama, kebiasaan dan cara hidup, dan melupakan ke-Tionghoa-an mereka. Di Jakarta golongan peranakan Tionghoa dapat bertahan hanya empat generasi, hal ini mungkin dapat menunjukan bahwa “orang-orang Tionghoa telah terasimilasi secara tuntas kedalam masyarakat Indonesia, hingga menjadi masyarakat Indonesia asli. Sedang disisi lain, seiring dengan perjalanan sejarah dan juga perubahan-perubahan besar dalam masyarakat Indonesia, terdapat sebuah ketahanan budaya, dimana masih adanya golongan peranakan di Indonesia.

Dimuat juga dalam artikel Ong yang berjudul “Persoalan minoritas-mayoritas” sebagai berikut menyatakan bila di suatu Negara terdapat soal minoritas, maka akan menyebabkan ketegangan. Antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas, meletusnya diskriminasi, prasangka dan konflik antar kedua golongan tersebut, terlihat dalam krisis. Golongan minoritas adalah golongan yang dalam cara-cara hidupnya, perekonomian atau dalam lain-lain hal belum diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat mayoritas. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan kedua golongan tak saling mengenalnya. Misalnya sebagai kaum pedagang, Hal ini sangat tidak benar, sebab kenyataanya dengan

adanya diferensiasi pekerjaan mereka telah menyebar dan memasuki beragam macam pekerjaan. Hal ini bertambah lagi dengan prasangka-prasangka negatif, seperti pedagang Tionghoa tidak jujur, dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya. undang-undang dan hukum untuk imigran yang baru datang belum demikian jelas dan tak ditaati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gambaran yang mengasosiasikan anggota minoritas dengan satu standar tertentu mempunyai dasar tetapi tidaklah terlalu benar seluruhnya. Hal ini juga ditimbulkan dari warisan masa lalunya.³

Golongan minoritas tertentu mempertahankan kedudukannya sebagai minoritas, mereka dapat loyal terhadap Indonesia, tetapi masih mempertahankan cara-cara hidup mereka, adat dan tradisi. Dalam hal ini, mungkin konflik dapat dihindarkan, akan tetapi dalam keadaan krisis, berbagai konflik akan timbul, sedangkan diskriminasi tidaklah dapat dihilangkan. Satu-satunya jalan adalah asimilasi atau peleburan, atau dengan kata lain menjadi masyarakat Indonesia “asli”, akan tetapi asimilasi bukan berarti harus bergama Islam, seperti yang dikumandangkan oleh kelompok integrasi, melainkan menghilangkan identifikasi sebagian anggota golongan minoritas, salah satunya mungkin dengan jalan mengganti nama. Pasca penggantian nama mungkin dapat bertambah lebih maju

³ Hubungan antara elit-elit peranakan dengan kolonial belanda melahirkan sebuah persengkongkolan, yang menjadikan sebuah korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi tradisi dalam aktifitas dagang mereka, lihat. Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh :Pemukiman Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC* (Yogyakarta : LKiS, 2004), hlm. 136-137.

kembali, yakni dengan integrasi dalam lapangan ekonomi, politik dan lain-lain. Pendeknya, segala eksklusifisme minoritas harus dihapuskan.⁴

Tulisan dari Onghokham ini, dapat terlihat bentuk asimilasi, dalam arti mereka menghilangkan eksklusifisme, dan menganjurkan kepada kelompok mayoritas untuk menerima demi membantunya keberlangsungan proses asimilasi. Ong juga menambahkan bahwa pemisahan kelompok Tionghoa sering disebabkan oleh kaum minoritas itu sendiri, dengan mempertahankan identitas kelompok yang eksklusif. Dalam pandangannya, kendala dalam proses asimilasi yang berlangsung di Indonesia, sangat terlihat jelas sekali, halangan terbesar berasal dari kaum minoritas itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kontruksi masyarakat pada masa Hindia Belanda terhadap masyarakat Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda menciptakan sebuah anggapan bahwa perbaikan kedudukan berasal dari Tiongkok. Pada akhirnya asimilasi dijadikan senjata bagi sebagian kaum minoritas untuk tetap mempertahankan identitas mereka.

Perintah untuk membuat rencana mengadakan asimilasi orang Indonesia keturunan Tionghoa, kedalam masyarakat mayoritas. Asimilasi ini dilakukan dengan cara tidak menganggap minoritas sebagai suatu kelompok tersendiri. Didirikannya sekolah campuran dan menganjurkan kaum minoritas untuk mengubah nama-nama mereka menjadi Indonesia. Langkah yang tepat menuju persatuan dapatlah dicapai melalui asimilasi, sehingga sifat eksklusifisme kaum minoritas akan lenyap. Asimilasi ini membuka peluang kembali bagi perkawinan

⁴ Onghokham, "Asimilasi Golongan Peranakan", dalam *Star Weekly*, no. 12, tahun XII, Februari 1960.

campur (*amalgamatie*), dengan demikian maka asimilasi akan tercapai secara biologis, ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya.⁵

Kebijakan asimilasi itu berdampak setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno, yaitu peraturan *stelsel aktif*⁶ dihilangkan. Warga Negara Tionghoa berbondong-bondong mengurus statusnya di Pengadilan Negeri.

Dalam survey yang dilakukan di Glodok menurut keterangan Hendra Tan mengenai kebijakan asimilasi orang Tionghoa pada saat itu tidak diperbolehkan melakukan pembauran dengan perkawinan campur (karena dianggap illegal dan kawin campur diharamkan). Berbeda sekali dengan pernyataan Ong Ho Kham dalam *star weekly* sebelumnya bahwa asimilasi membuka peluang bagi perkawinan campur.⁷ Menurut Ong Ho Kham, ini merupakan salah satu jalan agar tidak ada diskriminasi dan konflik lagi terhadap orang Tionghoa.

Di tahun 1978, Menteri Kehakiman mengeluarkan peraturan bahwa orang Tionghoa diwajibkan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Ada yang mampu memiliki SBKRI, dan tidak sedikit keturunan Tionghoa terkatung-katung karena tidak memiliki SBKRI. Orang Tionghoa yang mengurus SBKRI berakhir buntu. Mereka hidup selama 3 generasi tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Kalaupun ada yang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Stelsel aktif* adalah Warga Negara Asing (WNA) yang tidak memilih kewarganegaraan/diam saja otomatis menjadi WNI. *Stelsel pasif* adalah menuntut WNA untuk mengajukan atau mengurus dokumen untuk menjadi WNI.

⁷ Wawancara dengan Hendra Tan, pada saat itu ia masih menggunakan *stelsel aktif*.

mendapatkannya, harga dokumen tersebut sangat menguras harta.⁸ Sebelum tahun 1969, permohonan naturalisasi hampir tidak pernah diproses. Maka di masa Soeharto untuk melakukan naturalisasi lebih besar daripada sebelumnya. Di samping prosedurnya begitu rumit dan biayanya sangat tinggi. Dalam majalah *tempo* mengungkapkan bahwa seseorang yang menginginkan jalan naturalisasi memerlukan sedikitnya 14 dokumen untuk mengajukan permohonan dan membayar sekitar antara Rp 30.000,- sampai Rp 100.000,- (kira-kira US\$ 75-250).⁹ Hal tersebut juga diutarakan oleh Hendra Tan, sekitar tahun 1968 jumlah uang untuk proses naturalisasi dinaikan menurut keputusan Menteri Kehakiman. Sehingga seluruh biaya yang di keluarkan antara sekitar Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-.¹⁰ Sebenarnya banyak orang Tionghoa yang ingin menjadi warga Negara Indonesia karena alasan praktis, karena WNI lebih menikmati hak istimewa daripada orang asing. Orang Tionghoa yang tidak berkewarganegaraan (*stateless*) tentu akan minta menjadi warga Negara Indonesia apabila prosedurnya dipermudah dan biayanya diturunkan. Akan tetapi, pemerintah Soeharto memperkeras pengawasan dan permohonan tersebut.¹¹

Salah satu korban dari ketidakpastian ini adalah Gan Siok Hian yang akhirnya hidup terkatung-katung. Dia bersama suaminya bahkan sempat divonis

⁸ Im Suryani dan Selo Cahyo Basuki, “Naturalisasi yang Terbata-bata (Pelaksanaan UU Kewarganegaraan yang Baru pun Belum Komprehensif Di Lakukan)”, *Koran Jakarta*, 18 April 2010 , hlm 5.

⁹ “14 Surat untuk I Putus Asa”, *Tempo*, 17 Agustus 1974, hlm. 2.

¹⁰ Wawancara dengan Hendra Tan menyatakan bahwa jalur naturalisasi memang sangat rumit.

¹¹ Wawancara dengan Sukiman Hartono dan Iwan S.

pengadilan karena dianggap menggunakan KTP palsu. Tudingan itu diterimanya sampai dua kali. Gan Siok memang berdarah Tionghoa. Bahkan ia tidak malu mengakui leluhurnya. Namun mereka sudah hidup di Indonesia. Bahasa Indonesianya pun lancar dan fasih seperti pribumi pada umumnya. Ia membela bahwa ia seorang Warga Negara Indonesia, ketika di tahun 1960 ia telah melalui jalur naturalisasi. Bukti itu diperkuat dengan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan RRT menjadi WNI yang dimilikinya. Saudara Gan Siok yang bernama Liem Ie Sien juga menyatakan untuk usaha mengurus naturalisasi kerap dihambat. Keinginan untuk dapat menetap di suatu tempat saja tidak bisa. Karena mereka tidak juga bisa mengontrak rumah karena dianggap tidak punya dokumen yang legal.¹²

Pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia yaitu masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Bersamaan dengan perubahan politik tersebut muncul larangan menggunakan istilah Tionghoa. Toko atau perusahaan, bahasa Tionghoa juga sama sekali dilarang untuk diajarkan dalam bentuk formal atau informal.

Kelompok asimilasi menganjurkan untuk anak-anak Tionghoa agar diubah menjadi nama Indonesia. Dalam *star weekly* mengungkapkan selama anjuran tersebut tidak ada unsur paksaan, dan menggunakan nama atas dasar sukarela maka pilihan nama Indonesia adalah wajar. Keluarga yang mengganti nama anak-

¹² Im Suryani dan Selo Cahyo Basuki, *Loc, cit.*

anak mereka dengan nama Indonesia tidak hanya terdapat di Jakarta, tetapi juga di luar kota Jakarta berbuat demikian.¹³

Drs. Tan Tek Hian dari Bank Negara Indonesia memiliki anak yang belum lama ini di lahirkan, di beri nama Indonesia yaitu Iskandar Engguat. Alasan beliau memberikan nama Indonesia adalah “kita kaum peranakan harus menyesuaikan diri. Penyesuaian diri ini haruslah menuju ke arah asimilasi”. Drs. Tan menerangkan bahwa nama Iskandar itu adalah nama pemandian (Baptis). Iskandar adalah nama Indonesia bagi Alexander. Menurut Drs. Tan mengenai pemberian nama itu “kita masih dalam masa peralihan. Tapi, apabila nama Engguat harus di hapuskan, maka anak saya akan memakai nama Iskandar.”tambahnya. Sama pendiriannya dengan Drs. Tan Tek Hian, keluarga Poey Tjhoen Gie dan Tan Po An, yang masing-masing menamakan anak-anak mereka Chandrawati Ayling dan Hadisutrisno Tionghan. Nama Ayling dan Tionghan ini masing masih menggunakan nama asing dalam satu kata.¹⁴

B. Bidang Ekonomi: Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959

J.S. Furnival, mengemukakan bahwa sejak berdirinya kota Batavia, masyarakat Batavia adalah masyarakat yang majemuk, dimana mereka menjalankan aktivitas ekonomi secara masing-masing, dengan menggunakan

¹³ “Tentang Soal Nama Indonesia Untuk Anak-Anak Peranakan”, *Star Weekly*, Jakarta, 20 Februari 1960.

¹⁴ *Ibid.*

sistem modern yang tumbuh bersama-sama dengan sistem tradisional.¹⁵ Sistem modern dijalankan oleh bangsa Eropa dan sistem tradisi yang dijalankan oleh penduduk lokal. Hal tersebut dibutuhkan orang ketiga yakni golongan Tionghoa yang sebagai perantara antara pemerintah Hindia Belanda dengan penduduk lokal.¹⁶ Pasca kemerdekaan Indonesia mengalami perubahan dalam aktifitas ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa semua warganegara berkedudukan sama dimata hukum dan pemerintah menjamin hak-hak mereka tanpa membedakan asal-usul rasial. Pada tahun 1946, Hatta (wakil presiden RI) mengemukakan bahwa orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia mendapat kedudukan dan hak sama dengan orang Indonesia asli. Mengenai prospek kesempatan kerja, mereka akan mendapatkan kedudukan dan pekerjaan, semata-mata berdasarkan kemampuan dan kepandaian masing-masing.¹⁷

Kedatangan Hindia Belanda dalam menguasai Indonesia disektor perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Tionghoa. Akan tetapi, bukan berarti bahwa sektor keuangan, industri manufaktur, transportasi, industri pertanian, dan lain-lain merupakan hal yang baru bagi mereka. Sebagian besar dari mereka menggeluti sebagai pedagang yang termasuk kedalam perdagangan perantara. Posisi perdagangan perantara sangatlah

¹⁵ J.S. Furnivall, *Netherlans India: A Study of Plural Ekonomi* (Cambrigde : Cambrigde University Press. 1939), hlm. 11-12.

¹⁶ Ong Eng Die, "Peranan Orang Tionghoa Dalam Perdagangan", dalam Mely G. Tan (ed.), *Golongan Tnis Tionghoa Di Indonesia : Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa* (Jakarta: P.T. Gramedia.1979), hlm. 30-66.

¹⁷ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT.Temprint, 1984), hlm . 134-135.

menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, dan juga bagi pemerintah kolonial, seperti yang dikemukakan oleh, Didi Kwartadana bahwa, posisi perantara adalah posisi yang menghubungkan antara penguasa dengan yang dikuasi, dari segi ekonomi mereka sebagai jembatan perhubungan dari distribusi barang-barang. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan posisi perantara sebagai mesin pencetak uang bagi penguasa.¹⁸

Lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah perubahan pada sektor ekonomi, terjadi pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda dan asing. Pedagang-pedagang Tionghoa bergerak masuk ke dalam dan menguasai peranan puncak, walau perusahaan-perusahaan negara memonopoli banyak bidang. Pasca nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing, maka ruang gerak golongan Tionghoa semakin luas.¹⁹ Kemerdekaan Indonesia juga sebagai kemerdekaan menjalankan aktivitas ekonomi bagi rakyatnya, terutama kaum pribumi.

Pada tanggal 19-23 Maret 1956 organisasi pengusaha pribumi yang dipimpin oleh Mr. Assaat, menggelar Konggres Importir Nasional Seluruh Indonesia, mengemukakan bahwa kedudukan pengusaha Tionghoa makin lama, semakin kuat dalam lapangan ekonomi, pendek kata dalam sektor perekonomian golongan Tionghoa mempunyai kedudukan yang kuat dan berkuasa. Berbeda

¹⁸ Didi Kwartanada, “. . . *Indonesia, the largest country in the world with a Chinese problem*” dalam, www.forumbudayationghoa.blogspot.

¹⁹ J.A.C. Mackie, “Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina Indonesia dan Muangthai” dalam, J. Chusman dan Wang Gungwu (ed.), *Perubahan Identitas dan Etnis Cina Indonesia di Asia Tenggara* (Jakarta : Grafiti, 1991), hlm. 45.

dengan golongan *inlander* (pribumi) secara sosial maupun ekonomi berada dilandasan atau bawah.²⁰

Pelaksanaan program benteng tidak mencapai tujuannya, untuk menciptakan kelas wiraswasta pribumi yang tangguh. Faktor yang mengakibatkan kegagalan tersebut terletak pada kurang pengalaman pribumi dalam sektor perdagangan dan perniagaan. Kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan oleh sebagian dari kelompok elit pribumi untuk memupuk kekayaan pribadi atau menghimpun dana-dana politik. Industri tekstil yang berkembang di Jakarta, pada akhirnya yang menjalankan perusahaan adalah golongan Tionghoa, karena banyak modal yang dikeluarkan. Pengusaha pribumi hanya memegang lisensi monopoli impor bahan mentah, hal inilah yang pada akhirnya membuat aktivitas perekonomian Tionghoa tetap tangguh. Disisi lain terjadi destorsi, akan tetapi terdapat penumpukan modal dan keterampilan usaha bagi pribumi, walaupun itu dalam skala yang kecil.²¹

Sektor perdagangan perantara, pedagang-pedagang perantara pribumi kalah bersaing dengan perdagangan perantara Tionghoa yang telah teruji kemampuannya. Sebagian besar pedagang perantara didominasi oleh pedagang Tionghoa hal ini terlihat dari pusat-pusat perdagangan grosir dipusat-pusat perbelanjaan mangga dua dan pasar pagi. Kuatnya oposisi dan inflasi terus

²⁰ warganegara Indonesia asli harus mendapat perlindungan khusus dalam usaha-usaha mereka dibidang ekonomi dari ada persaingan orang-orang asing pada umumnya dan orang-orang Tionghoa pada khususnya.

²¹ Nurhadiantomo, “kewiraswastaan Pri dan Non-pri: Perbandingan Pertumbuhan dan Perkembangan”, dalam *Radar Bogor*, tanggal 10 maret 1999. hlm .2. kolom: 2-4.

menerus dari golongan peranakan Tionghoa, memaksa pemerintah mengadakan penilaian kembali pada program benteng tersebut.²²

Program benteng telah mengakibatkan timbulnya “importir-importir aktentas”, dimana orang Indonesia asli yang tidak punya harta benda lain kecuali aktentas kantor. Satu-satunya tujuan importir adalah untuk mendapatkan ijin milik alat pembayaran luar negri (*foreign change*), sedang masyarakat Tionghoa, yang menyelenggarakan perusahaan. Kerja sama antara mereka dikenal dengan “sistem ali-baba”²³, dimana pribumi yang memberikan modal sedang perjalanan perusahaan dikendalikan oleh golongan Tionghoa. Hal ini pada akhirnya menimbulkan citra buruk bagi golongan Tionghoa. Pembagian hasil yang diperoleh perusahaan tidaklah adil dan merugikan, karena orang Tionghoa menerima sebagian besar dari laba sedangkan, orang pribumi yang dijadikan pintu masuk untuk dapat maju kedepan tidaklah mendapatkan apa-apa dalam hal pengalaman bekerja.²⁴

Penerapan “Program Benteng” tidak membawa hasil, seperti pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi secara dratis dikalangan pengusaha pribumi. Akan tetapi, program tersebut tidak berarti tidak bermanfaat sama sekali pada aktifitas perekonomian pribumi. Di tahun 1957 dengan adanya nasionalisasi, perekonomian Indonesia semakin menjadi dilema, disatu sisi pemerintah harus

²² *Ibid.*

²³ Ali adalah orang pribumi, sedang baba adalah golongan Tionghoa. Dalam sebuah karikatur yang dikeluarkan oleh golongan assaat, mengenai pengecohkan yang dilakukan oleh pengusaha Tionghoa terhadap pribumi, lihat, “Ali & Baba dalam *Udjana*, No. 46, tanggal 18 Mei 1966. Kolom karikatur.

²⁴ Leo Suryadinata, *op, cit*, hlm. 137.

menanggung beban utang luar negeri untuk mengganti kerugian dari nasionalisasi, sedang disisi lain sumber daya manusia, yang masih terlalu sedikit. Hal inilah yang menjadi celah bagi non pribumi untuk masuk dalam perekonomian Indonesia menyokong perusahaan-perusahaan besar tersebut. Untuk memajukan perekonomian makro haruslah diimbangi dengan peningkatan perekonomian dalam skala mikro. Pemerintah mengeluarkan peraturan, yang melarang bagi pedagang-pedagang eceran warga negara asing untuk menjalankan aktifitasnya di daerah Kecamatan dan Kawedanan.

Pada akhirnya tanggal 16 November 1959, kabinet mengundang peraturan tersebut, dalam Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959.²⁵ Mengenai batasan wilayah perdagangan eceran bagi warga negara asing, dan pelarangan melakukan aktivitas ekonominya di daerah-daerah Kecamatan dan kawedanan. Peraturan ini sebenarnya dimaksudkan terhadap orang Tionghoa yang bersanding status WNA (Warga Negara Asing/RRT). Mengenai poin pokoknya adalah sebagai berikut: *Pertama*, pelarangan dan batasan bagi pedagang eceran warga negara asing yang mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang tersebut. *Kedua*, pedagang asing melakukan penyebrangan, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang kepada konsumen. *Ketiga*, melakukan perdagangan

²⁵ Pada awalnya peraturan merupakan kepanjang-tanganan dari Gerakan Assaat, dan lalu menteri perdagangan, Rachmat M. membuat peraturan tersebut, lihat, Leo Suryadinata, *op,cit*, hlm. 140.

pengumpulan, yaitu membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada pedagang perantara selanjutnya.²⁶

Tapi dalam kenyataannya Peraturan Pemerintah tersebut berimbas pada semua warga Tionghoa yang berdagang di pedesaan tak terkecuali, tidak peduli WNA atau WNI. Usaha pedagang eceran orang Tionghoa ini tak luput dari penutupan. Pedagang hanya boleh berdomisili di tempat tinggalnya. Sedangkan tempatnya berjualan selama ini tidak dibenarkan digunakan untuk usaha dan semua barang-barangnya yang berada di dalam tempatnya berjualan harus diserahkan kepada koperasi.²⁷ Pramoedya Ananta Toer juga menyatakan, peraturan tersebut didesain untuk mengakhiri bentuk perdagangan eceran di daerah pedalaman yang berada ditangan orang-orang Tionghoa.²⁸ Kegiatan perdagangan eceran asing akan ditampung oleh koperasi, dan prioritas telah diberikan pada Dewan Koperasi Indonesia untuk menggantikan 15% dari aktiva modal asing yang terkena peraturan tersebut. Dengan keterlibatan militer dalam pelaksanaan tersebut pada berganti menjadi sebuah tindakan kekerasan, yang

²⁶ Peraturan Presiden. NO. 10, Tahun 1959, dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 128, tahun 1959.

²⁷ “Penduduk Cina Dipulangkan: PP no.10 dan masalah pemulangan Hoakiao”, *Indonesia* 1960, hlm. 39.

²⁸ Lihat Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia* (Jakarta : Garba Budaya, 1998), hlm. 5, dan 67-68.

berakhir dengan kontak fisik dikedua belah pihak. Selain itu dengan adanya tindakan tersebut menumbuhkan kembali semangat anti-Tionghoa.²⁹

Tindak kekerasan yang menyelimuti pelaksanaan Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959, pada akhirnya memperburuk hubungan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sehingga kedutaan besar Tiongkok meminta kepada semua orang-orang Tionghoa untuk tidak meninggalkan rumah, hingga Peking menemukan pemecahan masalah tersebut.³⁰

Tentu saja PP no.10 tahun 1959 ini tidak berlaku di Jakarta dan kota-kota besar. Saat itu Jakarta di penuhi warung Tionghoa, belum banyak warung Pribumi.³¹ Hubungan jual beli antara pedagang Tionghoa dengan pribumi sangat baik. Cina Town di Glodok menjadi pusat perdagangan yang dikuasai etnis

²⁹ Kebijakan dan intruksi yang dijalankan tanpa persiapan-persiapan, tanpa ada kemampuan untuk menciptakan suatu tindakan yang membuktikan adanya kehormatan dan nilai intelektual dan nilai kepemimpinan. Beberapa insiden kekerasan terjadi di daerah Jawa Barat, kolonel Kosasih, menerapkan peraturan perarangan pemukiman bagi orang-orang Tionghoa dan memindahkannya secara paksa, Kosasih juga menembak dua orang perempuan Tionghoa, yang tak mau beranjak dari rumahnya di Cimahi. Atas peristiwa itu Kolonel Kosasih dimutasikan ke Sumatra. *Ibid.*, hlm. 5-6, dan 65.

³⁰ Dengan adanya insiden yang dilatarbelakangi oleh Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959, RRT menuduh pemerintah Indonesia melanggar perjanjian mengenai Kewarganegaraan rangkap, dimana disebutkan pula bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi kepentingan warga negara RRT. Dengan tuduhan tersebut, melalui menteri luar negeri, Subandrio menjawab, bahwa Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959, diterapkan karena untuk mendirikan perekonomian sosialis dan untuk melindungi warga negara Indonesia dari kegiatan ekonomi Tionghoa perantau yang melakukan tindakan kapitalistis dan monopolitis yang disertai dengan berbagai macam manipulasi dan spekulasi. Selain itu juga menuduh RRT mencampuri urusan dalam negeri RI. Disisi lain melihat PP tersebut PKI membela pedagang eceran, dengan menyatakan bahwa musuh bagi bangsa Tionghoa adalah kolonialisme dan imperialisme barat bukannya pedagang-pedagang eceran Tionghoa, lihat. Leo Suryadinata, *op. cit.*, hlm.142,dan 186.

³¹ Alwi Shahab, "Dari Dekrit sampai PP", *Republika* 3 Juli 2005.

Tionghoa. Uang yang beredar di pusat perdagangan Glodok saat itu lebih dari 60% dari jumlah uang yang beredar di Indonesia.³²

Selama adanya PP no.10 tahun 1959, orang Tionghoa di Glodok mengungsi ke kampung Selam (Islam) yang berada di daerah Krukut, Jakarta Pusat dan Pekojan, Jakarta Barat. Dampak dari PP no.10 tahun 1959 di daerah mengundang rasa kecewa dan keprihatinan orang Tionghoa di Glodok.

“Saya perhatikan, dalam kenyataan pelaksanaan PP no.10 tahun 1959 itu berbeda-beda sesuai kebijaksanaan Kodam setempat, dan anehnya pemerintah pusat juga tidak banyak memperhatikan atau tidak berkemampuan mengendalikan untuk menegor atau meluruskan pelaksanaan yang tidak benar, tidak sesuai dengan PP no.10 tahun 1959 yang dikeluarkan.”³³

Dari pernyataan di atas, Hendra Tan menambahkan beberapa daerah yang terkena PP tersebut tidak sesuai. Ia menceritakan bahwa PP no.10 tidak akan terlupakan karena adanya eksodus besar-besaran. Pemulangan kembali ke Tiongkok dipaksa total. Saat itu, Pemerintah RRT segera mengirimkan sebuah kapal untuk mengangkut mereka ke daratan Tiongkok. Walaupun Cina Town tidak terkena dalam PP, untuk keamanan mereka juga menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960.³⁴

Pernyataan mengapa tentang PP no.10 tahun 1959 banyak repatriasi, oleh Sukiman Hartono dengan penjelasannya sebagai berikut:

³² *Ibid.*

³³ Hasil wawancara dengan Hendra Tan sangat kecewa dengan kebijakan Soekarno yang mengeluarkan PP no.10 tahun 1959.

³⁴ Wawancara dengan Hendra Tan.

“Masalah pertama yang patut diingat, bahwa PP no.10 tahun 1959 dikeluarkan tidak sampai setahun setelah disahkannya UU no.62 tahun 1958 (yang menetapkan orang Tionghoa secara aktif memilih atau menentukan kewarganegaraan, untuk melepas kewarganegaraan Tiongkok dan bersumpah setia pada RI untuk menjadi WNI). Jadi, dalam kenyataan di tahun 1960 pelaksanaan PP no.10 itu, banyak orang Tionghoa yang belum sempat melakukan pemilihan, dengan pergi ke kota-kota besar untuk maju ke depan Pengadilan Negeri menyatakan sumpah setia pada RI menjadi WNI. Oleh karena itu, banyak sebagian dari orang Tionghoa dengan sendirinya menjadi Warga Negara Asing yang terkena ketentuan PP no.10 tahun 1959.

Kedua, berdasarkan ketentuan, PP no.10 tahun 1959 hanya melarang pengusaha pedagang eceran asing diluar Ibukota daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan, dalam pelaksanaannya yang saya ketahui di Jawa Barat tidak hanya dilarang melakukan usaha dagang eceran, tapi berubah menjadi semua warga asing yang dilarang hidup dan tinggal akibatnya banyak yang pergi ke RRT.”

Disatu pihak berubah menjadi WNA karena tidak sempat mengurus SBKRI, dipihak lain menjadi dongkol dan marah karena perlakuan kejam pemerintah RI ketika itu. Ada satu keputusan yang kejam dikeluarkan Pemerintah, begitu banyak warga (lebih dari ratusan ribu orang Tionghoa yang tergusur) yang tidak bersalah dan berdosa, mata pencahariannya dicabut begitu saja. Jelas ini semua tidak dipikirkan dengan baik dan bijaksana, hanya terdorong dengan ingin mempercepat proses “Indonesianisasi” usaha perdagangan didaerah.³⁵

Peraturan no.10 tahun 1959 ini dimaksudkan untuk menyehatkan perekonomian nasional, namun menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan RRT. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Subandrio dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di Jakarta, pemerintah Peking

³⁵ Tambahan Sukiman Hartono bahwa PP no. 10 tahun 1959 kecerobohan pemerintah dalam proses Indonesianisasi.

mendesak peninjauan kembali PP no.10 dan permintaan itu ditolak.³⁶ Selanjutnya di depan sidang parlemen, Menteri Subandrio menegaskan, sama sekali tidak didapatkan anasir-anasir anti Tionghoa dalam hubungan pelaksanaan PP no.10. Pelaksanaan PP no.10 tersebut, selain merupakan dimulainya nasionalisasi dan sosialisasi di bidang ekonomi, juga merupakan bagian pelaksanaan dalam revolusi Indonesia.

Saat peraturan ini diterapkan, sekitar 500 ribu pengusaha keturunan Tionghoa terimbas.³⁷ Dalam *Harian Waspada* menyatakan terdapat sekitar 25.000 kios milik pedagang asing yang umumnya terkena PP no.10.³⁸ Menanggapi himbauan Pemerintah Peking, sekitar 199 ribu yang mendaftar, namun hanya 102 ribu yang berangkat ke Tiongkok menggunakan kapal yang dikirim oleh pemerintah RRT. Ketegangan berkurang setelah Perdana Menteri RRT Chou En Lai menemui Presiden Soekarno.

C. Bidang Politik: Masyarakat Tionghoa dalam Politik

Di Indonesia jumlah minoritas terbesar diduduki oleh masyarakat Tionghoa. Jumlah mereka semakin menambah bukan karena populasi yang dihasilkan oleh angka kelahiran mereka di Indonesia, melainkan karena migrasi. Dalam waktu yang singkat Persatuan Tionghoa telah berkembang pesat, jumlah

³⁶ “Penduduk Cina Dipulangkan: PP no.10 dan masalah pemulangan Hoakiao”, *Indonesia* 1960, *Loc, cit.*

³⁷ “Terusir dari Kampung Sendiri”, *Majalah Tempo* edisi 13-19 Agustus 2007, hlm. 96-97.

³⁸ “Penduduk Cina Dipulangkan: PP no.10 dan masalah pemulangan Hoakiao”, *Indonesia* 1960, *Loc, cit.*

anggotanya telah melebihi dari 10.000 orang dari 27 cabang yang tersebar di kepulauan Indonesia. Selain berharap untuk mendapatkan perlakuan yang sederajat, Persatuan Tionghoa juga berharap kepada pemerintahan Indonesia untuk dapat menjalin kerja sama dengan pemerintahan Tiongkok. Karena hubungan yang baik antar negara berdampak baik juga kepada mereka dikemudian hari, dimana mereka mendapatkan keuntungan hubungan ekonomi.

Beberapa masyarakat Tionghoa peranakan yang mencoba aktif dalam partai-partai politik Indonesia mengharapkan adanya sebuah pemisahan yang jelas. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah, karena ada beberapa dari kaum peranakan yang juga ingin mempertahankan keTionghoa-annya, seperti Siauw Giok Tjan, Yap Tien Hien, Thio Thiam Tjong, dan lain sebagainya.³⁹ Menurut Skinner, pendirian Persatuan Tionghoa lebih didorong untuk mendapatkan persamaan hak sebagai warga negara Indonesia bagi masyarakat Tionghoa. Di sisi lain mereka juga mencoba untuk berinfiltrasi pada partai politik.

Perselisihan pandang membuat para pemimpin meninggalkan Partai Demokrat Tionghoa Indonesia, Yap Tjwan Bing dan Tjoa Sie Wie pada akhirnya bergabung dengan Partai Nasional Indonesia, sedangkan Thoe Tin Jan bergabung dengan partai katolik, Tan Po Goan dan Tan Boean Aan bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia.⁴⁰ Pasca penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, dan tidak ada lagi Republik Indonesia Serikat, pada akhirnya

³⁹ Wawancara dengan A. Dahana, di Pusat Studi Cina-Universitas Indonesia, tanggal 9 Desember 2011. Hal senada juga dikemukakan oleh X-Ling, dalam wawancara tanggal 12 Desember 2011.

⁴⁰ *Ibid.*

perkumpulan-perkumpulan Tionghoa melakukan fusi dan membentuk Badan Permusyawaratan Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang dikenal dengan Badan Permusyawaratan Warganegara Turunan Tionghoa (Baperwat) pada bulan Maret 1954 di Jakarta.⁴¹

Dengan berkembangnya Baperki, maka mayoritas masyarakat Tionghoa mengajukan permohonan terhadap setiap pengadilan negeri di Jakarta untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan, Baperki sangat realistis, dimana mereka mengupayakan agar masyarakat Tionghoa menjadi bagian tersendiri, dalam artian disamakan dengan suku-bangsa yang ada di Indonesia. Baperki banyak menarik perhatian masyarakat peranakan Tionghoa, yang terkemuka dan berbeda cara pandangnya. Dalam perkembangannya banyak dari intelektual peranakan Tionghoa. Baperki sebagai perkumpulan politik berorientasi pada komunisme dan pro-Soekarno. Dalam pandangannya Siauw, mengemukakan bahwa minoritas peranakan Tionghoa adalah suatu kenyataan sosial.

Salah satu tokoh politik di Jakarta adalah Lauw Chuan Tho. Ia menjadi tokoh penggerak asimilasi, ekonom, dan penyebar agama Islam. Lauw Chuan Tho lahir 22 April di Jakarta. Ia mengikuti pendidikan sekolah Belanda dan tamat di tahun 1949, Ia melanjutkan studi di Univesiteit van Rotterdam dan meraih gelar Drs. pada 1959. Saat kuliah di Belanda, Ia masuk Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) pada 1951.

Ia pulang ke Indonesia pada 1960, dan menulis di star weekly tentang gerakan asimilasi. Ia juga ikut menandatangani Piagam Asimilasi yang di lakukan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 62.

di Bandungan, Ambarawa, Jawa Tengah tahun 1961, dan mendirikan Penyuluhan Asimilasi sebagai pendahulu LPKB dan kemudian Bakom PKB. Gerakan asimilasi di kalangan orang Tionghoa Indonesia dimulai pada tanggal 21 Maret 1960, ketika sepuluh tokoh terkemuka dari golongan Tionghoa peranakan di Indonesia menandatangani piagam asimilasi yang mendukung asimilasi sebagai solusi masalah orang Tionghoa Indonesia.⁴²

Sepuluh orang tersebut adalah Onghokham, Auwyang Peng Koen, Injoo Beng Goat, Lauw Chuan Tho (Junus Jahja), Kwee Hwat Djien, Tjung Tin Jan, Tjia Djie Siong, Tan Biang Seng, TanteKhian.⁴³ Mereka mengemukakan bahwa masalah Tionghoa di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi dalam segala hal. Misalnya melalui perkawinan campur antara orang Tionghoa Indonesia dengan orang Indonesia.

Dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, presiden Soekarno membenarkan usaha-usaha gerakan asimilasi yang berusaha menghilangkan eksklusivisme orang Tionghoa Indonesia dengan jalan berasimilasi ke dalam tubuh bangsa Indonesia. Dibentuklah LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) yang di ketuai oleh Sindhunata dan ditugaskan Pemerintah RI untuk menangani penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia. LPKB memfokuskan gerakan asimilasinya pada bidang pendidikan, ekonomi dan hukum.

⁴² Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia-Asimilasi VS Intergrasi*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembaruan, 1999), hlm. 26-27.

⁴³ Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. xi.

Setelah pemerintah Presiden Soekarno berakhir dan diganti oleh pemerintah Orde Baru, LPKB membantu pemerintah Orde Baru dalam mengatasi masalah Tionghoa di Indonesia. Pada tahun 1967, LPKB dibubarkan kemudian dibentuk Badan Komunikasi (Bakom) dibawah Departemen Dalam Negeri RI. Tugas Bakom sama seperti LPKB yakni menekankan asimilasi total. Pada 1973 Lauw Chuan Tho mengganti namanya menjadi Junus Jahja. Pada tahun 1974 Ia diangkat sebagai anggota Bakom (Badan Komunikasi) di DKI Jakarta. Pada 1979, Ia meninggalkan agama Kristen dan menjadi Islam.⁴⁴

D. Bidang Pendidikan: Sekolah-sekolah Tionghoa ditutup

Pada masa awal pembentukannya *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) banyak dimotori oleh kaum peranakan, mereka mulai sadar pada sistem kepercayaan. Banyak dari kaum peranakan yang mengetahui mengenai Kong Hoe Tjoe dari literatur barat pada masa mereka bersekolah di Eropa. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi dorongan tersendiri untuk mempelajari Kong Hoe Tjoe. Seiring dengan pembentukan THHK terjadi gerakan pembaharuan Kong Hoe Tjoe di Tiongkok. Dengan adanya gerakan tersebut membuka peluang bagi kaum peranakan untuk mengeksplorasi Kong Hoe Tjoe.

Tiong Hoa Hwee Koan atau rumah perkumpulan Tionghoa adalah sebuah organisasi yang didirikan tanggal 17 Maret 1900 oleh beberapa tokoh keturunan Tionghoa di Jakarta (waktu itu bernama Batavia). Mereka menginginkan masyarakat Tionghoa yang sudah bergenerasi hidup di Hindia Belanda mengenal

⁴⁴ Sam Setyautama dan Suma Miharja, *Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 159.

kebudayaan Tionghoa sehingga mereka bisa bersatu sebagai satu kelompok masyarakat yang dihormati oleh Hindia Belanda. Proses pengenalan kebudayaan atau pencarian identitas yang ditempuh oleh para pendiri *Tiong Hoa Hwee Koan* adalah penyebarluasan ajaran Kong Hu Tjoe. Selain itu mereka juga mendirikan lembaga pendidikan yang bernama *Tiong Hoa Hwe Tong* (THHT). Sesuai dengan visi misi THHK,⁴⁵ lembaga pendidikan THHT juga mempunyai tujuan untuk memajukan generasi penerus masyarakat Tionghoa Indonesia. Dalam sistem pengajarannya mereka menggunakan perpaduan antara kurikulum barat dengan kurikulum Tiongkok, yang bertujuan untuk memodernisasi masyarakat Tionghoa tanpa harus melupakan budaya leluhurnya.

Pada tahun 1901, *Tiong Hoa Hwee Koan* mendirikan sekolah Tionghoa yang disebut *Tiong Hoa Hak Tong*. Sekolah ini merupakan sekolah swasta modern pertama, bukan saja di Batavia, tapi juga di Hindia Belanda. Berdirinya sekolah ini merupakan reaksi masyarakat Tionghoa di Batavia terhadap pemerintah Hindia Belanda yang tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak-anak Tionghoa. Sekolah yang merupakan sekolah swasta modern pertama di Hindia Belanda ini tidak mengenal tingkatan-tingkatan kelas, dan semua umur bisa bercampur. Para murid yang berasal dari warga Tionghoa dan pribumi kaya ini diajarkan aljabar, aritmatika, adat istiadat dan budaya.⁴⁶ Akibat perkembangan yang pesat dari sekolah THHK, pemerintah Hindia Belanda khawatir banyak

⁴⁵ Visi dari berdirinya THHK, lihat Nio Joe Lan, *Riwayat 40 tahun Tiong Hoa Hwee Koan-Batavia* (Batavia : THHK. 1940), hlm. 202.

⁴⁶ Wawancara dengan X-Ling menjelaskan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di Pa Hoa.

anak-anak yang berminat dengan sekolah ini. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Hollandsch Chineeseche School* (HCS), yaitu sekolah berbahasa Belanda bagi anak Tionghoa. Pada perkembangan selanjutnya Sekolah THHK Patekoan ini disingkat menjadi Pa Hoa.⁴⁷

Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, sekolah Pa Hoa ditutup. Pada awal tahun 1942 tersebut gedung sekolah Pa Hoa dijadikan tempat untuk tawanan perang oleh tentara Jepang. Kemudian di bulan Juli 1942, tentara Jepang memberikan izin pembukaan kembali sekolah Pa Hoa bertempat di Jalan Mangga Besar. Pada tahun 1943, dengan izin tentara Jepang sekolah Pa Hoa mendapat pinjaman gedung bekas sekolah HCS di Jalan Pinangsia. Ternyata dua gedung sekolah tersebut di Jalan Mangga Besar dan di Jalan Pinangsia tidak cukup untuk menampung siswa yang ingin belajar di sekolah Pa Hoa. Sekolah paho memperoleh tambahan gedung di Gang Petasan yang kemudian dipindahkan ke Jalan Ketapang. Dengan demikian sekolah Pa Hoa memiliki tiga gedung yakni gedung di Jalan Mangga Besar, Jalan Pinangsia, Jalan Ketapang. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, tentara Jepang mengosongkan dan mengembalikan gedung sekolah Pa Hoa di Jalan Patekoan (yang sekarang Jalan Perniagaan).⁴⁸ Akan tetapi, untuk sementara waktu sekolah Pa Hoa berhenti beroperasi demi keamanan. Pada tanggal 1 Oktober 1945, sekolah Pa Hoa dibuka

⁴⁷ Wawancara dengan A. Dahana menceritakan perkembangan sekolah Pa Hoa.

⁴⁸ Wawancara dengan Hendra Tan menceritakan sekolah Pa Hoa yang terletak di Glodok.

kembali dan menghapus bahasa Jepang dari daftar kurikulum kemudian diganti kembali dengan bahasa Inggris.

Di tahun 1946, sekolah Pa Hoa mengalami kesulitan uang sehingga sekolah Pa Hoa di Jalan Ketapang dikembalikan kepada pemiliknya. Para siswa dipindahkan ke gedung sekolah Pa Hoa di Jalan Patekoan dan di Jalan Mangga Besar. Pada tahun 1948, situasi ekonomi semakin stabil. Pada bulan Juli 1950, jumlah guru, pegawai dan siswa sekolah Pa Hoa sangat banyak. Maka, untuk menampung siswa SD sampai SMA sekolah Pa Hoa membuka kelas pagi dan kelas petang. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia menghentikan subsidi kepada sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa. Dengan peningkatan pertumbuhan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 1 tahun 1952, mewajibkan kepada sekolah-sekolah Tionghoa untuk mendaftarkan diri pada kementrian pendidikan dan memasukan pelajaran bahasa Indonesia pada kegiatan belajar mengajar, yang mulai diajarkan mulai dari kelas tiga sekolah dasar, dengan kuota minimal empat jam seminggu.⁴⁹

Pada tahun 1957, pemerintah menerbitkan peraturan tentang pendidikan. Menteri Pertahanan Djuanda, menetapkan peraturan mengenai pelarangan Warga Negara Indonesia masuk dalam sekolah asing, dan melarang pendirian sekolah-sekolah baru. Dengan adanya peraturan tersebut berdampak bagi sekolah-sekolah

⁴⁹ Kementrian Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudayaan, *Pengawasan Pengadjaran Asing* (Djakarta : KPPK,1950), hlm. 50-56.

Tionghoa dan tenaga pengajarnya, mereka yang memakai bahasa pengantar Tionghoa, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri pendidikan.⁵⁰

Kemudian pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia. Bersamaan dengan perubahan politik itu, sekolah Tionghoa di larang di Indonesia. Sehingga semua anak Tionghoa di Indonesia diharuskan menerima pendidikan seperti anak Indonesia yang lain secara nasional. Pada 6 April 1966, THHK Pa Hoa diambil alih oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan SK Penguasa Pelaksana Dwikora daerah Jakarta Raya (pepelrada Djaya/0.1/s/kep/1966 pada tanggal 14 Februari 1966). Pada 1 Agustus THHK Pa Hoa Jl.Perniagaan no.31 resmi menjadi SMA Negeri 19 Jakarta.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan A. Dahana.

BAB V

KESIMPULAN

Sebelum tahun 1955 orang Tionghoa berdomisili di Indonesia menganut peraturan kewarganegaraan RRT yaitu *ius sanguinis* atau berdasarkan keturunan. Dalam Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia, orang Tionghoa tersebut pada saat itu sudah dianggap menjadi Warga Negara Indonesia. Terjadilah *bipatriide* (orang yang mempunyai dua kewarganegaraan atau lebih) terhadap orang Tionghoa yang bersangkutan. Dilaksanakannya perundingan antara pemerintah RI dan RRT dalam rangka menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan. Perundingan tersebut membuahkan Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT di tandatangani pada 22 April 1955 oleh Menteri Luar Negeri Sunario dan Chou En Lai. Setelah perjanjian ditandatangani kemudian di tuangkan dalam Undang-undang no. 2 tahun 1958 pada 11 Januari 1958 dan di implementasikan dengan Peraturan Pemerintah no.20 tahun 1959. Sampai pada pelaksanaannya 20 Januari 1960 - 20 Januari 1962 etnis Tionghoa diberi kesempatan untuk memilih antara warganegara Indonesia atau warganegara Tiongkok.

Mereka yang berdwikewarganegaraan tidak mengambil langkah tersebut, maka akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya setelah usainya pelaksanaan tersebut. Perjanjian dwikewarganegaraan ini juga berdampak bidang sosial, bidang ekonomi, serta politik di Cina Town Glodok. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, etnis Tionghoa yang ingin melakukan pemilihan kewarganegaraan diharuskan datang ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam

proses tersebut etnis Tionghoa di Glodok dipersulit prosedurnya untuk mencapai naturalisasi. Di samping prosedurnya begitu rumit dan biayanya sangat tinggi. Sedikitnya orang Tionghoa harus mengajukan 14 dokumen untuk mengajukan permohonan dan membayar sekitar antara Rp 30.000,- sampai Rp 100.000,-. Sebenarnya banyak orang Tionghoa yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia karena alasan praktis, karena WNI lebih menikmati hak istimewa daripada orang asing. Orang Tionghoa yang tidak berkewarganegaraan (*stateless*) tentu akan minta menjadi WNI apabila prosedurnya dipermudah dan biayanya diturunkan.

Etnis Tionghoa yang masih dikatakan eksklusif harus dihapuskan dengan cara asimilasi. Asimilasi ini membuka peluang kembali bagi perkawinan campur. Kelompok asimilasi menganjurkan untuk anak-anak Tionghoa agar diubah menjadi nama Indonesia. Penggantian nama ini telah dilakukan hampir seluruh orang Tionghoa di Glodok yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia. Selama anjuran tersebut tidak ada unsur paksaan dan menggunakan nama atas dasar sukarela maka pilihan nama Indonesia adalah wajar. Mereka mengaku sama sekali tidak keberatan untuk penggantian nama Indonesia tersebut. Masalah Tionghoa di Indonesia sudah diminimalisir dengan dikeluarkannya undang-undang no.12 tahun 2006 yang telah memberikan harapan baru dalam penyelenggaraan kebijakan hukum kewarganegaraan di Indonesia. undang-undang ini memberikan dampak positif bagi seluruh aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan politik warga keturunan.

Peraturan Presiden no. 10 tahun 1959 mengenai batasan wilayah perdagangan eceran bagi warga Negara asing, dan pelarangan melakukan aktivitas

ekonominya di daerah-daerah Kecamatan dan Kawedanan. Peraturan ini berimbas pada semua orang Tionghoa yang berdagang di pedesaan tak terkecuali, tidak peduli WNA atau WNI. Peraturan Presiden ini tidak berlaku di Jakarta khususnya di Glodok. Selama adanya PP tersebut, orang Tionghoa di Glodok mengungsi ke kampung Selam (Islam) yang berada di daerah Krukut, Jakarta Pusat dan Pekojan, Jakarta Barat. Dampak dari PP no.10 tahun 1959 tidak akan terlupakan oleh orang-orang Tionghoa karena adanya eksodus besar-besaran, pemulangan kembali ke Tiongkok dipaksa total. Walaupun Cina Town Glodok tidak terkena PP, untuk keamanan mereka juga menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960.

Belum banyak orang Tionghoa yang masuk dalam dunia politik tapi setelah adanya *nation building* orang Tionghoa mulai bermunculan dalam berbagai partai. Ironisnya orang Tionghoa yang bernaung dalam politik tidak terlalu memperhatikan kewajiban mereka yang seharusnya menjadi tumpuan hidup masyarakat Tionghoa dalam mencari keadilan. Salah satu tokoh politik di Jakarta adalah Lauw Chuan Tho yang memperhatikan nasib orang Tionghoa di Indonesia. Ia menjadi tokoh penggerak asimilasi dan menandatangani Piagam Asimilasi yang dilakukan di Bandung, Ambarawa, Jawa Tengah tahun 1961.

Orang-orang Tionghoa yang telah bersumpah setia kepada Indonesia ketika menjadi anggota badan pemerintahan. Anggota Angkatan Bersenjata, veteran Angkatan Darat, dan orang yang secara resmi mewakili Indonesia dalam fungsi-fungsi Internasional, dibebaskan dari keharusan untuk memberikan pernyataan kesetiaan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- ANRI, *Peraturan Pemerintah* No.45 Tahun 1954 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia.
- ANRI, *Peraturan Presiden* No. 10 Tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar Ibukota Daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan. (dalam Lembar Negara RI No. 128 tahun 1959).
- ANRI, *Peraturan Pemerintah* no.11 tahun 1960 tentang penegasan berlakunya PP no. 20 tahun 1959.
- ANRI, *UU* No. 2 tahun 1958 tentang persetujuan antara RI-RRT mengenai dwikewarganegaraan. (dalam Lembar Negara RI No. 5 tahun 1958).

Buku dan Artikel

- Ankersmith, F.R., *Releksi tentang Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Azyumardi Arza, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Predana Media, 2003.
- Blusse, Leonard, *Persekutuan Aneh: Pemukiman Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia*, Yogyakarta : LkiS, 2004.
- Breman, Jan, *Menjinakan Sang Kuli : Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatra Timur Pada Awal Abad ke-20* Jakarta : KITLV dan Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Castles, Lance, *The Ethnic Profile of Jakarta*, Ithaca: Modern Indonesia Project Cornell University, 1967.
- Coppel, Charles A (terj.), *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Departemen Kehakiman RI, *Berita Negara* No. 234 Tahun 1955 tentang permohonan/naturalisasi masyarakat Tionghoa di DKI Jakarta tahun per 31 Desember 1960.
- Departemen Kehakiman RI, *UU* No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. (dalam Lembar Negara RI No. 113 tahun 1958).

- Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*, Jakarta: Depdikbud, 1987.
- Firman Lubis, *Jakarta 1950-an Kenangan semasa Remaja*, Jakarta: Masup, 2008.
- Furnivall, J.S, *Netherlands-India : A Studi of Plural Economi*, Cambridge : Cambridge University Press, 1939.
- Gouda, Frances, *Dutch Cultere Overseas : Praktek Kolonial di Hindia-Belanda, 1900-1942*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Gottschalk, Louis, *Understanding History*, (terj.) Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1989.
- Gouw Giok Siong, *Warga Negara dan Orang Asing*, Jakarta: Keng Po, 1958.
- Greif, Stuart W (terj.), *WNI: Problematik Orang Indonesia asal Cina*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Hanna, Willard A, *Hikayat Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Harsono, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Helius Sjamsudin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Hidajat, Z.M. *Manusia dan Kebudayaan Cina di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1993.
- Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia: Asimilasi VS Integrasi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembaruan, 1999.
- Kementrian Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudayaan, *Pengawasan Pengadjaran Asing Djakarta* : KPPK, 1950.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005.
- Lee, Evereet S, *Suatu Teori Migrasi*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1987.
- Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: PT.Temprint, 1984.
- _____, "Kwee Hiang Tjiat: Nasionalis Tionghoa Tokoh Asimilasi", *PRISMA NO.7*, Jakarta: LP3ES, 1984.

- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya: Jaringan Asia Jilid II*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Mackie, J.A.C., “Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina Indonesia dan Muangthai” dalam, J. Chusmandan Wang Gungwu (ed.), *Perubahan Identitas dan Etnis Cina Indonesia di Asia Tenggara*, Jakarta : Grafity, 1991.
- Masri Singarimbun, “Urbanisasi: Apakah Itu Suatu Problema”, *Prisma ; Jakarta Siapa yang Punya*, No.5 tahun VI. Edisi Mei, 1977.
- Mely G. Tan (ed), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia, 1979.
- Mochtrar Lubis, “Jakarta kota Penuh Kontras” *Prisma; Jakarta Siapa yang Punya*, No.5 tahun VI. Edisi Mei, 1977.
- Muhammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: Fasco, 1957.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Nio Joe Lan, *Riwayat 40 tahoen Tiong Hoa Hwee Koan-Batavia*, Batavia : THHK. 1940.
- Oey, Mayling, “Jakarta Dibangun Kaum Pendatang” *Prisma; Jakarta Siapa yang Punya*, No.5 tahun VI. Edisi Mei, 1977.
- Ong Eng Die, “Peranan Orang Tionghoa Dalam Perdagangan”, dalam Mely G. Tan (ed.), *Golongan Tnis Tionghoa Di Indonesia : Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: P.T. Gramedia.1979.
- Ong Hok Kham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Peter, J. M. Nas dan Grijns, Kees, “Jakarta-Batavia: Sebuah Sampel Penelitian Sosio Historis Mutakhir”, *Jakarta Batavia : Esai Sosio-Kultural*, Jakarta : Banana dan KITLV, 2007.
- Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau Di Indonesia*, Jakarta : Garba Budaya, 1998.
- Sam Setyautama, dan Suma Miharja, *Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi*, Jakarta: Gramedia, 1987.

_____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Sasmojo, *Menyelesaikan Masalah Dwikewarganegaraan RI-RRT*, Jakarta: Djambatan, 1959.

Setiono, Benny G, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta : Elkasa, 2002.

Slamet Martosudiro, *Penyelesaian Masalah Cina Perantauan: Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional*, *PRISMA*, (Jakarta: LP3ES, 1973.

Soemarno Sosro, “Jakarta bukan hanya bagi yang berduit”, *Prisma ; Jakarta Siapa yang Punya*, No.5 tahun VI. Edisi Mei, 1977.

Statistik Indonesia: Statistical Year Book of Indonesia 1961.

Statistik Indonesia: Statistical Year Book of Indonesia 2001.

Sukisman WD, *Masalah Cina di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penelitian Cina di Indonesia, 1975.

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik :Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: Pustaka LP3ES. 1990.

Wilmott, Donal E, *The Nationals Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958*, Ithaca: Cornell University, Modern Indonesia Project, 1961.

Surat Kabar

Indonesia, 1960, hlm. 39.

Koran Jakarta, 18 April 2010. hlm 5.

Radar Bogor, 10 maret 1999. hlm .2. kolom: 2-4.

Republika, 3 Juli 2005.

Star Weekly, no. 12, Tahun XII, Februari 1960.

_____, 20 Februari 1960.

Sinar Harapan, 26 Februari 1969.

_____, 28 Februari 1969.

Tempo, 17 Agustus 1974, hlm 2.

_____, edisi 13-19 Agustus 2007, hlm.96-97.

Udjana, No. 46, tanggal 18 Mei 1966. Kolom karikatur.

Skripsi dan Thesis

Amorettya Minayora. 2008. Masalah Identitas Tionghoa Indonesia Muslim di Jakarta. *Skripsi*. Jakarta: UI.

Faizatush Sholikhah. 2010. Terpaksa Menjadi Asing: Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI) dan Pencarian Identitas Kebangsaan Indonesia Pasca Kolonial. *Thesis*. Yogyakarta: UGM.

Rina Herlina. 2005. Hubungan Diplomatik Indonesia-RRC (1950-1967). *Skripsi*. Yogyakarta: UNY.

Internet

Asep Kambali, *Menelusuri Jejak Tionghoa di Jakarta*, dalam Kompasiana. <http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/10/menelusuri-jejak-tionghoa-di-jakarta/>.

Didi Kwartanada, “. . . *Indonesia, the largest country in the world with a Chinese problem*” dalam, www.forumbudayationghoa.blogspot.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**DAFTAR RESPONDEN**

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat
1.	A. Dahana	58 tahun	Dosen	Kompleks Perumahan Dosen UI, Blok : B. No. 45 Sawangan -Depok
2.	X-Ling (Liem Tjoe Tek)	63 tahun	Pelukis	Jl. Pasar Pagi III. No. 21 Ps. Pagi Jakarta-Utara.
3.	Hendra Tan	66 tahun	Wirausaha	Pasar Pagi, Glodok, Jakarta
4.	Sukiman Hartono	51 tahun	Anggota Komunitas Glodok	Petak 9, Jakarta Barat
5.	The BianNio	55 tahun	Haksu	Jln. Pangeran Jayakarta III. No. 16 Glodok-Jakarta
6.	Iwan. S	63 tahun	Pensiun	Pasar Pagi, Glodok, Jakarta
7.	Sunardi	74 tahun	Pensiun	Jl. Perniagaan no.7, Jakarta Barat
8.	Lisa Santoso	68 tahun	Wirausaha	Pasar Pagi, Glodok, Jakarta
9.	Richard Wanandi	77 tahun	Anggota Komunitas Glodok	Petak 9, Jakarta Barat
10.	Riyanto	63 tahun	Departemen Kehakiman RI	Cililitan, Jakarta Timur
11.	Widi Sanusi	59 tahun	Departemen Kehakiman RI	Cililitan, Jakarta Timur

LAMPIRAN 2

**PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1954 TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG
BERADA DI INDONESIA**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN PEMERINTAH No. 45 TAHUN 1954

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia;

Mengingat : pasal 3 Undang-undang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No.64);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke-60 pada tanggal 14 Djuli 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING
JANG BERADA DI INDONESIA.

B A B I.

TENTANG HUBUNGAN MENTERI KEHAKIMAN DENGAN ALAT-ALAT
KEPOLISIAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI JANG TUGASJA
BERSANGKUTAN DENGAN ORANG ASING.

Pasal 1.

- (1) Tiap-tiap instansi Pemerintah yang mempunyai tugas kepolisian dan tiap-tiap organisasi yang tugasnja bersangkutan dengan orang asing, dalam hal pengawasan orang asing bekerja menurut petunjuk Menteri Kehakiman dan memberi segala keterangan yang dianggap perlu olehnja.
- (2) Tiap-tiap instansi atau organisasi tersebut dalam ayat 1 yang mengetahui atau diberitahu tentang tingkah laku seorang asing yang mentjurigakan harus dengan segera memberitahukannja kepada Menteri Kehakiman.
- (3) Instansi-instansi dan organisasi-organisasi tersebut dalam ayat 1 harus saling membantu dalam menunaikan tugasnja.

B A B II.

TENTANG BIRO PENGAWASAN ORANG ASING.

Pasal 2.

- (1) Untuk membantu Menteri Kehakiman dalam menjalankan tugas pengawasan orang asing maka pada Kementerian Kehakiman diadakan suatu biro dengan nama Biro Pengawasan Orang Asing dibawah pimpinan Kepala Bagian Hukum Kriminil dan Ketentaraan.
- (2) Pada biro tersebut dalam ayat 1 dapat ditempatkan pegawai-pegawai yang diberi kekuasaan pemeriksaan dan/atau penjelidikan.
- (3) Pegawai-pegawai itu menurut sjarat-sjarat yang akan ditetapkan bersama oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman dapat djuga diberi kuasa untuk menahan dengan ketentuan bahwa tahanan itu harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam waktu sepuluh hari.

B A B III

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B A B III.

TENTANG KEWADJIBAN ORANG ASING MELAPORKAN DIRI.

Pasal 3.

- (1) Tiap-tiap orang asing yang mendapat kartu idzin masuk di Indonesia harus melaporkan diri kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya segera setelah ia mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman.
- (2) Apabila seorang asing yang dimaksud dalam ayat 1 pindah, maka ia sebelum itu harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang lama tentang waktu kepindahannya dan kemana ia akan pindah, dan dalam tujuh hari setelah tiba ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang baru ia harus melaporkan diri kepada kantor polisi setempat.
- (3) Mereka yang telah melaporkan diri diberi keterangan dari kantor polisi yang menerima laporan itu.

Pasal 4.

Orang asing yang telah melaporkan diri menurut pasal 3 ayat 1 yang telah berumur enambelas tahun, harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya apabila ia meninggalkan tempat itu lebih dari tigapuluh hari dengan memberitahukan alamat-alamatnya dalam waktu itu.

B A B IV.

TENTANG TEMPAT PENGINAPAN DAN MEMBERI KESEMPATAN MENGINAP.

Pasal 5.

- (1) Pada tiap-tiap tempat penginapan harus diadakan daftar tamu orang asing tersendiri, dimana harus ditulis nama, kelamin, umur, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, tanggal datang, asal dan tujuan serta tandatangan tiap-tiap tamu yang menginap disitu.
- (2) Pengurus tempat penginapan atau wakilnya harus meyakinkan diri bahwa sitamu adalah sungguh-sungguh orang yang diterangkan dalam daftar tamu, dengan berhak untuk minta diperlihatkan paspor atau surat pengenalan lainnya dari tamu itu.
- (3) Tiap-tiap orang asing yang telah berumur enambelas tahun dan tinggal disuatu tempat penginapan harus mengisi suatu formulir, menurut tjontoh A yang dilampirkan pada peraturan ini, dalam dua rangkap dengan dibubuhi tandatangannya.
- (4) Formulir-formulir itu disediakan oleh pengurus tempat penginapan tersebut.

Pasal 6.

- (1) Selain formulir tersebut dalam pasal 5 ayat 3 setelah diisi harus segera disampaikan kepada kantor polisi setempat dan selain lagi harus disimpan oleh pengurus tempat penginapan sampai satu tahun.
- (2) Formulir tersebut serta daftar tamu harus setiap waktu dapat diperiksa oleh seorang anggota polisi atau seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.



Pasal 7.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7.

Jang dimaksud dengan tempat penginapan dalam peraturan ini ialah tiap-tiap ruangan jang disediakan untuk menginap dengan dipungut bajaran.

Pasal 8.

Tiap-tiap orang jang memberi kesempatan menginap kepada seorang asing harus memberitahukan kepada kantor polisi setempat dalam tempo duapuluh empat djam sedjak kedatangan orang asing itu.

B A B V.

TENTANG PENGENALAN DIRI, PENAHANAN DAN PENILIKAN.

Pasal 9.

- (1) Tiap-tiap orang asing harus memperlihatkan surat keterangan polisi jang telah diterimanja atau paspornja atau surat pengenalanja, apabila diminta oleh seorang anggota polisi, seorang pegawai imigrasi atau seorang anggota tentara jang sedang bertugas.
- (2) Apabila orang asing itu tidak dapat memperlihatkan surat-surat termaksud dalam ayat 1, maka ia harus memberi keterangan tjukup sehingga ia tidak perlu memperlihatkan surat-surat keterangan atau paspornja tersebut.
- (3) Apabila seorang asing tidak memenuhi apa jang ditentukan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, maka ia oleh pedjabat tersebut ayat 1 dapat ditahan atau ditempatkan dibawah penilikan polisi, imigrasi atau tentara.
- (4) Dalam waktu empatpuluh delapan djam pedjabat jang menahannja atau jang menempatkan orang asing itu dibawah penilikan memberitahukan penahanan atau penilikan ini kepada Menteri Kehakiman jang akan menyelesaikan selanjutnja.

B A B VI.

TENTANG HUKUMAN PIDANA.

Pasal 10.

Barang siapa dengan sengaja atau karena kealpaannja melanggar pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4, pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, pasal 6 ayat 1 dan 2 dan pasal 8 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.



B A B VII.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B A B VII.
P E N U T U P.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Agustus 1954.

P. H. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

Ali Sastroamidjojo

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEHAKIMAN,

Djody Gondokusumo

DJODY GONDOKUSUMO

MENTERI LUAR NEGERI,

Sunario

SUNARIO

MENTERI DALAM NEGERI,

Hazairin

HAZAIRIN

MENTERI PERTAHANAN,

Iwa Kusumasumantri

IWA KUSUMASUMANTRI

Diundangkan
pada tanggal 31 Agustus 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

Djody Gondokusumo

DJODY GONDOKUSUMO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 45 TAHUN 1954

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING JANG BERADA DI INDONESIA.

PENDJELASAN UMUM.

1. Untuk melaksanakan tugas jang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-undang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No.64), Menteri Kehakiman membutuhkan bantuan sepenuhnya dari tiap-tiap pegawai kepolisian dan organisasi baik sipil maupun militer jang tugasnja bersangkutan dengan orang asing:
 - a. dengan memberi segala keterangan kepadanja jang olehnja dianggap perlu untuk pengawasan orang asing;
 - b. dengan mendjalankan segala sesuatu dalam lingkungan pekerjaannja jang diminta oleh Menteri Kehakiman;
 - c. dengan segera memberitahukan kepadanja segala sesuatu jang mereka mengetahuinja atau diberitahukannya tentang tingkah laku seorang asing jang mentjurigakan;
 - d. dengan mewadjabkan mereka saling membantu dalam menunaikan tugasnja; (lihat pasal 1).
2. Disamping bantuan termaksud dalam bab 1, Menteri Kehakiman membutuhkan juga sebuah staf pegawai atasan dan pegawai-pegawai bawahan jang akan membantu beliau dalam segala hal mengenai pengawasan orang asing. Untuk itu maka pada Kementerian Kehakiman diadakan satu biro dengan nama Biro Pengawasan Orang Asing dibawah pimpinan Kepala Bagian Hukum Kriminil dan Ketentaraan.

Agar supaja Menteri Kehakiman dapat mendjalankan tugasnja dengan sempurna epektip, sebaik-baiknya dan setjepat-tjepatnja, djika perlu dengan menjimpang dari djalan menurut tjara jang ditentukan dalam bab 1, misalnja dalam hal laporan-laporan jang diterima oleh Menteri Kehakiman bertentangan satu sama lain atau kepadanja diberikan andjuran-andjuran, saran-saran jang bertentangan satu dengan jang lain atau sesuatu laporan dianggap "tendentieus", sehingga satu dan lain harus di "check" kebenarannya, maka untuk itu Menteri Kehakiman harus mempunyai kekuasaan sepenuhnya atas pegawai-pegawai jang mempunyai kekuasaan pemeriksaan dan/atau penjelidikan dan dengan memenuhi sesuatu sjarat, punja kekuasaan juga untuk menahan.

Berhubung dengan itu maka pasal 2 diadakan.
3. Selanjutnja untuk mempermudah pengawasan terhadap orang asing itu, maka diadakan beberapa ketentuan-ketentuan dengan antjaman hukuman misalnja:
 - a. tiap-tiap orang asing jang mendapat kartu idzin masuk di Indonesia harus melaporkan diri kepada kantor polisi dari tempat tinggalnja atau tempat kediamannya segera setelah ia mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman; (pasal 3 ayat 1).
 - b. apabila seorang asing jang dimaksud sub a pindah, maka ia sebelum itu harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnja atau tempat kediamannya jang lama tentang waktu kepindahannya dan kemana ia akan pindah, dan dalam tujuh hari setelah tiba ditempat tinggalnja atau tempat kediamannya jang baru ia harus melaporkan diri kepada kantor polisi setempat; (pasal 3 ayat 2).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. orang asing yang telah melaporkan diri menurut sub a yang telah berumur enambelas tahun, harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya apabila ia meninggalkan tempat itu lebih dari tigapuluh hari dengan memberitahukan alamat-alamatnya dalam waktu itu; (pasal 4).
 - d. pada tiap-tiap tempat penginapan harus diadakan daftar tamu orang asing tersendiri, dimana harus ditulis nama, kelamin, umur, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, tanggal datang, asal dan tujuan serta tandatangan tiap-tiap tamu yang menginap disitu; (pasal 5 ayat 1).
 - e. pengurus tempat penginapan atau wakilnya harus meyakinkan diri bahwa sitamu adalah sungguh-sungguh orang yang diterangkan dalam daftar tamu, dengan berhak untuk minta diperlihatkan paspor atau surat pengenalan lainnya dari tamu itu; (pasal 5 ayat 2).
 - f. tiap-tiap orang asing yang telah berumur enambelas tahun dan tinggal disuatu tempat penginapan harus mengisi suatu formulir, menurut tjontoh A yang dilampirkan pada peraturan ini dalam dua rangkap dengan dibubuhi tandatangannya; (pasal 5 ayat 3).
 - g. sehelai formulir tersebut dalam pasal 5 ayat 3 setelah diisi harus segera disampaikan kepada kantor polisi setempat dan sehelai lagi harus disimpan oleh pengurus tempat penginapan sampai satu tahun; (pasal 6 ayat 1).
 - h. formulir tersebut serta daftar tamu harus setiap waktu dapat diperiksa oleh seorang anggota polisi atau seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman; (pasal 6 ayat 2).
 - i. tiap-tiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada seorang asing harus memberitahukan kepada kantor polisi setempat dan tempo duapuluh empat jam sedjak kedatangan orang asing itu; (pasal 8).
- (lihat pasal 10).

Selain dari itu ada ketentuan-ketentuan lain, yang walaupun tidak mengandung antjaman hukuman, tetapi memuat antjaman tahanan atau penempatan dibawah penilikan polisi. Ketentuan itu misalnja berlaku terhadap seorang asing yang tidak dapat memperlihatkan surat keterangan polisi atau paspornja atau surat pengenalannya atau tidak dapat memberi keterangan tjukup. (pasal 9).

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas kepolisian misalnja dimaksudkan pegawai-pegawai polisi dari Djawatan Kepolisian Negara, dari Pamongpradja, anggota-anggota Angkatan Perang, yang mempunyai tugas kepolisian.

Dengan organisasi-organisasi yang tugasnja bersangkutan dengan orang asing misalnja dimaksudkan, pelbagai dinas reserse, penjelidik aliran masjarakat, "intelligence service" atau dengan nama apapun djuga yang tugasnja bersangkutan dengan orang asing.

Mereka kesemuanja dalam mendjalankan tugas mengenai orang asing harus bekerdja menurut petunjuk Menteri Kehakiman. Ini untuk menghindarkan tindakan bersimpang-siur antara alat-alat kekuasaan negara, yang akibatnja sangat merugikan baik moreel maupun materieleel bagi orang asing yang bersangkutan, maupun Pemerintah kita dimata dunia internasional. ("het eene drogargument is dit: het buitenland heeft

geen

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

geen reden tot beklag, als wij aantoonen zijn orderdane en belangen niet slechter te hebben bejegend dan wij het onze eigen orderdane doen. Wil een land of een overzeesch gebied voor eigen orderdane en belangen beneden zulk een (internationale) standaard blijven, dat is zijn zaak; maar vreemde orderdane en belangen hebben daaronder niet te lijden". van Vollenhoven Staatsrecht Overzee hal 241).

Tentang kerugian jang diderita oleh orang asing karena kelalaian kita, Pemerintah kita dapat dituntut kerugian oleh Pemerintah asing jang bersangkutan.

Pasal 2.

(lihatlah pendjelasan umum)

Pasal-pasal 3, 4, 5 dan 6.

(lihatlah pendjelasan umum)

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

(lihat pendjelasan umum).

Pasal-pasal 9 dan 10.

(lihat pendjelasan umum).

Pasal 11.

Tidak perlu pendjelasan.

---oooOooo---



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 645.

LAMPIRAN 3

**PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 1960 TENTANG
PENEGASAN MULAINYA BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH
NO.20 TAHUN 1959 TENTANG PENEGASAN UNDANG-UNDANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI
DWIKEWARGANEGARAAN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH No.11 TAHUN 1960 ✓

TENTANG

PENEGASAN MULAINYA BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH
No.20 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI
SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan sudah berlaku semendjak tanggal penukaran surat-surat pengesahan di Peking pada tanggal 20 Djanuari 1960;
- b. bahwa sudah ditetapkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1959 tentang pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok;
- Menimbang pula : bahwa perlu dipertegas, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut juga sudah mulai berlaku pada tanggal 20 Djanuari 1960;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang No.2 tahun 1958 (Lembaran Negara No.5 tahun 1958) juncto Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1959 (Lembaran Negara No.32 tahun 1959);
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 16 Februari 1960.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENEGASAN MULAINYA BERLAKU PERATURAN
PEMERINTAH No.20 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1959 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan berlaku mulai tanggal 20 Djanuari 1960.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 20 Djanuari 1960.



Agar.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1960.

MENTERI KEHAKIMAN,

SAHARDJO.
SAHARDJO.



LEMBARAN NEGARA No.26 TAHUN 1960.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

ATAS.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1960

TENTANG

PENEGASAN MULAINJA BERLAKU PERATURAN
PEMERINTAH NO.20 TAHUN 1959.

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1959 tidak menjebut didalamnya, bilamakah Peraturan itu mulai berlaku.

Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditetapkan, sebelum Perdjandjian, yang pelaksanaannya diatur olehnya, mulai berlaku.

Dengan sendirinya Peraturan Pemerintah pelaksanaan itu dimaksud untuk berlaku bersama-sama dengan Perdjandjian yang bersangkutan.

Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka dengan Peraturan Pemerintah ini dipertegas, bahwa Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1959 tersebut mulai berlaku bersama-sama dengan Perdjandjian itu, ja'ni pada tanggal 20 Djanuari 1960.-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.1955.

LAMPIRAN 4

**PERTUKARAN BERKAS ANTARA PERDANA MENTERI ALI
SASTROAMIDJOJO DAN PERDANA MENTERI CHOU EN LAI
MENGENAI DWIKEWARGANEGARAAN**

**PERTUKARAN NOTA ANTARA JANG MULIA
PERDANA MENTERI ALI SASTROAMIDJOJO
DAN JANG MULIA PERDANA MENTERI CHOU
EN-LAI TERTANGGAL 3 DJUNI 1955**

(Lampiran Undang-undang No 2 tahun 1958)

Peking, 3 Djuni 1955

Jang Mulia Mr Ali Sastroamidjojo
Perdana Menteri Republik Indonesia
PEKING

Jang Mulia,
Pada tanggal 22 April 1955 Republik Rakjat Tiongkok dan Republik Indonesia telah menandatangani Perdjangjian mengenai soal Dwikewarganegaraan. Pada waktu Jang Mulia mengundjungi Republik Rakjat Tiongkok, kedua Pemerintah kita telah bertukar pikiran lebih landjut sepe-nuhnja di Peking tentang tudjuan dan tjara pelaksanaan Perdjangjian ini dan telah mentjapai persesuaian faham jang sekarang saja njatakan lagi sebagai berikut :

1. Tudjuan dari Perdjangjian mengenai soal Dwikewarga-negaraan tersebut diatas, ialah menjelesaikan soal Dwikewarganegaraan antara Republik Rakjat Tiongkok dan Republik Indonesia, suatu masalah jang kita warisi dari djaman jang lampau dan penjelesaian masalah itu adalah sesuai dengan kepentingan rakjat kedua negara. Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, kedua Peme-rintah menjetudjui dalam melaksanakan Perdjangjian tersebut diatas, untuk mengambil segala tindakan-tindakan jang seperlunja dan memberikan segala kelonggaran, sehingga segenap orang jang mempunjai Dwikewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraan-nja menurut kehendak sendiri.
2. Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia menjetudjui, bahwa diantara mereka jang serempak berkewarganegaraan Republik Indonesia

dan Republik Rakjat Tiongkok terdapat suatu golongan yang dapat dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai Dwikewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan, bahwa mereka dengan sendirinya (setjara implisit) telah melepaskan kewarganegaraannya Republik Rakjat Tiongkok.

Orang-orang yang termasuk golongan tersebut diatas, karena mereka mempunyai hanya satu kewarganegaraan, tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perdjangjian Dwikewarganegaraan.

Djika dikehendakinya, seputjuk surat keterangan tentang hal itu dapat diberikan kepada orang-orang sedemikian itu.

3. Untuk menghindarkan sesuatu salah faham mengenai ketentuan tentang berlakunya jangka waktu 20 tahun dalam pasal XIV Perdjangjian Dwikewarganegaraan tersebut diatas, kedua Pemerintah menjetudjui tafsiran yang berikut, jaitu orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraannya sesuai dengan Perdjangjian tersebut diatas, tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir.
4. Agar supaya Perdjangjian tersebut diatas dilaksanakan dengan memuaskan, kedua Pemerintah menjetudjui membentuk di Djakarta suatu Panitia Bersama yang terdiri dari wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok. Tugas Panitia Bersama itu ialah memperbintjangkan dan merentjanakan tjara pelaksanaan Perdjangjian Dwikewarganegaraan tersebut diatas.
5. Sebelum jangka waktu dua tahun yang ditetapkan untuk memilih kewarganegaraan berakhir, kedudukan yang sekarang ini dari pada orang-orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan tidak akan berubah sampai dan setelah mereka melakukan pilihan kewarganegaraannya sesuai

*dengan ketentuan-ketentuan Perdjudjian tersebut diatas.
Kami mempergunakan kesempatan ini untuk menjatakan
kepada Jang Mulia hormat kami jang setinggi-tingginja.

ttd. *Chou En-lai*
PERDANA MENTERI DEWAN NEGARA
REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK

NOTA DJAWABAN JANG MULIA PERDANA MENTERI ALI SAS-
TROAMIDJOJO ATAS NOTA JANG MULIA PERDANA MENTERI
CHOU EN-LAI TANGGAL 3 DJUNI 1955

Peking, 3 Djuni 1955

Jang Mulia Chou En-lai
Perdana Menteri Dewan Negara
Republik Rakjat Tiongkok
PEKING

Jang Mulia,
Kami menjatakan bahwa kami telah menerima nota Jang
Mulia tertanggal 3 Djuni 1955, jang berbunji sebagai berikut :
„Pada tanggal 22 April 1955 Republik Rakjat Tiongkok
dan Republik Indonesia telah menandatangani Perdjudjian
mengenai soal Dwikewarganegaraan. Pada waktu Jang Mulia
mengundjungi Republik Rakjat Tiongkok, kedua Pemerintah
kita telah bertukar pikiran lebih landjut sepenuhnya di Peking
tentang tudjuan dan tjara pelaksanaan Perdjudjian ini dan
telah mentjapai persesuaian faham jang sekarang saja njata-
kan lagi sebagai berikut :

1. Tudjuan dari Perdjudjian mengenai soal Dwikewarga-
negaraan tersebut diatas, ialah menjelesaikan soal Dwi-
kewarganegaraan antara Republik Rakjat Tiongkok dan
Republik Indonesia, suatu masalah jang kita warisi dari
djaman jang lampau dan penjelesaian masalah itu adalah
sesuai dengan kepentingan rakjat kedua negara. Untuk

mentjapai tudjuan tersebut diatas, kedua Pemerintah menjetudju dalam melaksanakan Perdjangjian tersebut diatas, untuk mengambil segala tindakan-tindakan seperlunya dan memberikan segala kelonggaran sehingga segenap orang jang mempunjai Dwikewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya menurut kehendak sendiri.

2. Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia menjetudju bahwa diantara jang serempak berkewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok terdapat suatu golongan, jang dapat dianggap mempunjai hanja satu kewarganegaraan dan tidak mempunjai Dwikewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinja (setjara implisit) telah melepaskan kewarganegaraannya Republik Rakjat Tiongkok.

Orang-orang jang termasuk golongan tersebut diatas, karena mereka hanja mempunjai satu kewarganegaraan, tidak diwadjibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perdjangjian Dwikewarganegaraan.

Djikalau dikehendakinja, seputjuk surat keterangan tentang hal itu dapat diberikan kepada orang-orang sedemikian itu.

3. Untuk menghindarkan sesuatu salah faham mengenai ketentuan tentang berlakunya djangka waktu 20 tahun dalam pasal XIV Perdjangjian Dwikewarganegaraan tersebut diatas, kedua Pemerintah menjetudju tafsiran jang berikut, jaitu orang-orang jang sekali telah memilih kewarganegaraannya sesuai dengan Perdjangjian tersebut diatas, tidak akan diwadjibkan memilih lagi setelah djangka waktu 20 tahun itu berachir.
4. Agar supaja Perdjangjian tersebut dilaksanakan dengan memuaskan, kedua Pemerintah menjetudju membentuk di Djakarta suatu Panitia Bersama jang terdiri dari

wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok. Tugas Panitia Bersama itu ialah memperbintjangkan dan merentjangkan tjara pelaksanaan Perdjangjian Dwikewarganegaraan tersebut diatas.

5. Sebelum djangka waktu dua tahun jang ditetapkan untuk memilih kewarganegaraan berachir, kedudukan jang sekarang ini dari pada orang-orang jang mempunyai Dwikewarganegaraan tidak akan berubah sampai dan setelah mereka melakukan pilihan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perdjangjian tersebut diatas.

Djika hal-hal tersebut diatas memperoleh pernjataan setuju dari Jang Mulia, maka nota ini dan djawaban Jang Mulia akan merupakan suatu persesuaian faham jang telah ditjapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok tentang pelaksanaan Perdjangjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan dan akan mulai berlaku pada waktu bertepatan dengan waktu mulai berlakunya Perdjangjian tersebut diatas.

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia kami membenarkan hal-hal jang tertera didalam nota Jang Mulia, nota Jang Mulia dan djawaban kami atas nota itu merupakan persesuaian faham jang telah ditjapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok tentang pelaksanaan dari Perdjangjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan dan akan mulai berlaku pada waktu jang bertepatan dengan waktu mulai berlakunya Perdjangjian tersebut diatas.

Kami mempergunakan kesempatan ini untuk menjatakan kepada Jang Mulia hormat kami jang setinggi-tingginya.

ttd. Ali Sastroamidjojo

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Sumber : Sasmojo, *Menyelesaikan Masalah Dwikewarganegaraan RI-RRT*, (Jakarta: Djambatan, 1959), hlm. 29-33. Lihat juga dalam Lembar Negara RI no. 5 tahun 1958, atau Undang-undang no.2 tahun 1958.

LAMPIRAN 5

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 62 TAHUN 1958
Tentang
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**Menimbang:**

Bahwa perlu diadakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat:

- a. Pasal 5 dan pasal 144 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Warga Negara Republik Indonesia ialah:

- a. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945 sudah Warga Negara Indonesia;
- b. Orang yang pada waktu lahir mempunyai hubungan hukum dengan kekeluargaan dengan ayahnya, seorang Warga Negara Republik Indonesia, sejak mulai adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin dibawah 18 tahun;
- c. Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apa bila ayahnya meninggal dunia adalah Warga Negara Republik Indonesia.
- d. Orang yang pada waktu lahirnya, ibunya Warga Negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
- e. Orang yang pada waktu lahirnya, ibunya Warga Negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;
- f. Orang terlahir dalam wilayah Republik Indonesia, selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
- g. Orang terlahir dalam wilayah Republik Indonesia, selama tidak diketahui kedua orang tuanya.

- h. Seseorang yang ditemukan didalam wilayah Republik Indonesia, jika orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan dan kewarganegaraan orang tuanya tidak diketahui;
- i. Orang yang lahir dalam wilayah Republik Indonesia, yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayahnya atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah dan ibunya itu;
- j. Orang yang mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan Undang-Undang ini.

Pasal 2

- 1. Anak asing yang berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, dan apabila pengangkatan tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Negri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
- 2. Pernyataan sah oleh Pengadilan Negri termasuk harus dimintakan kepada orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 (satu) tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 3

- 1. Anak diluar perkawinan dari seorang ibu warga-negara Republik Indonesia anak dari perkawinan yang sah, tapi dalam perceraian, dan oleh hakim diserahkan pada asuhan oleh hakim kepada ibunya yang warganegara Republik Indonesia, yang kewarga-negaraannya turut ayahnya yang seorang warga-negara asing, boleh mengajukan kepada menteri kehakiman untuk memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, apabila setelah ia memperoleh kewarga-negaraan Indonesia, ia tidak memiliki kewarga-negaraan lain atau menwentukan pernyataan penanggalan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hokum dengan Negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Negara yang bersangkutan.
- 2. Permohonan tersebut diatas harus diajukan dalam waktu 1 (satu) tahun, sesudah orang tersebut berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negri atau Perwakilan Republik Indonesia dan Negara yang bersangkutan.
- 3. Menteri Kehakiman menolak atau mengabulkan persetujuan tersebut, dengan persetujuan Dewan Menteri.
- 4. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu, mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 4

- 1. Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal didalan wilayah Republik Indonesia, yang ayahnya atau ibunya, apabila ia tidak mempunyai hubungan hokum dengan kekeluargaan dengan anaknya, juga lahir didalam wilayah Republik Indonesia, boleh mengajukan permohonan

kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menyampaikan kewarganegaraan lain yang mungkin dimiliki sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dinegara asalnya atau sesuai dengan perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Negara yang bersangkutan.

2. Permohonan tersebut diatas harus diajukan 1 (satu) tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya.
3. Menteri Kehakiman menolak atau mengabulkan persetujuan tersebut, dengan persetujuan Dewan Menteri.
4. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu, mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 5

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu.
2. Untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan pemohon harus:
 - a. berusia 21 tahun;
 - b. Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah Republik Indonesia itu selama, sedikit-sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
 - c. Apabila ia seorang laki-laki yang kawin – mendapat persetujuan istri (istri-istri)-nya;
 - d. Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan sejarah tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
 - e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
 - f. Membayar kepada Kas Negara uang sejumlah Rp. 500,- sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilan setiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan;
 - g. Mempunyai mata pencaharian yg tetap;
 - h. Tidak mempunyai kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraanya, apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan penanggalan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik indoneesia dan Negara yang bersangkutan.

3. Pemohon untuk kewarganegaraan harus disampaikan secara tertulis dan dibubuhi materai kepada menteri kehakiman melalui pengadilan negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon;
Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal-hal tersebut dalam ayat (2) kecuali yang tersebut dalam huruf d.
Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan bukti-bukti itu akan kebenarannya dan menguji pemohon akan kecakapan berbahasa Indonesia dan akan pengetahuannya tentang sejarah Indonesia.
4. Menteri Kehakiman menolak atau mengabulkan persetujuan tersebut, dengan persetujuan Dewan Menteri.
5. Keputusan menteri kehakiman yang memberikan kewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga hari tanggal Keputusan Menteri Kehakiman tersebut.
Sumpah atau janji setia, itu adalah seperti berikut:
“saya bersumpah (berjanji): bahwa saya akan melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing; bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya; bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan Hukum-Hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh; bahwa saya akan memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun.”
6. Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia termaksud diatas Menteri Kehakiman mengumumkan kewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusan dalam Berita Negara.
7. Apa bila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan, setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman, maka dengan sendirinya keputusan itu menjadi batal.
8. Jumlah uang tersebut dalam ayat (2) dibayarkan kembali, apabila pemohon kewarganegaraan tidak dikabulkan.
9. Jika pemohon kewarganegaraan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6

Pewargakenegaraan dapat juga memberikan dengan alasan kepentingan Negara atau telah berjasa terhadap Negara oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal ini dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 hanya berlaku ketentuan-ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 7

1. Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya

berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana ketewrangan ini tidak boleh dinyatakan.

2. Dengan kekecualiaan tersebut ayat (1), perempuan asing yang kawin dengan dengan warganegara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apa bila dalam satu tahun itu, suaminya tidak menyatakan keterangan untuk meleas kewarganegaraan Republik Indonesianya
Keterangan ini hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, aopabila dengan kehilangan suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
3. Apabila dari salah salah satu dari keterangan tersebut dalam ayat (1) dan (2) sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan.
4. Keterangan-keterangan tersebut harus dinyatakan kepada Pengadilan Negri atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan tersebut itu.

Pasal 8

1. Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia, yang kawin dengan seorang asing, maka kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, apa bila dan pada waktu itu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.
2. Keterangan tersebut dalam ayat (1) harus dinyatakan pada Pengadilan Negri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tingal orang yang menyatakan keterangan itu.

Pasal 9

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia istri tersebut mempunyai kewarganegaraan lain.
2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku pada istrinya, kecuali apa bila istri itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 10

1. Seorang perempuan dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4.
2. Kehilangan kewarganegaraan seorang istri dengan sendirinya berlaku terhadap suaminya, kecuali apabila suaminya itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 11

1. Seorang yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan itu kembali jika dan pada waktu itu setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.
Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
2. Ketentuan ayat (1) tidak berlaku dalam hal orang itu apabila setelah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 12

1. Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan itu lagi, jika pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.
Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
2. Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila orang itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 13

1. Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.
Ketentuan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.
2. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia itu diperoleh dengan kewarganegaraan dari seorang ibu yang telah menjadi janda karena suaminya meninggal maka anak-anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengannya itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia juga setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia.
Ketentuan tentang tempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya yang karena ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 14

1. Bila mana anak yang termasuk dalam pasal 2 dan pasal 13 sampai berumur 21 tahun, aka ia akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia lagi, jika pada wktu ia menyatakan keterangan untuk itu.
Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah anak itu berumur 21 tahun kepada Pengadilan Negri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
2. Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila orang itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 15

1. Kehilangan kewarganegaraan Republlik Indonesia oleh seorang ayah berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah itu, yang belum berumur 18 tahun dan belu kawin, kecuali dengan jika kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.
2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak memunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.
3. Apabila ibu itu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diluarnegri dan ibu itu telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, setelah anak-anak itu bertempat tinggal dan berada diluar negri.

Pasal 16

1. Seorang anak yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya karena ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan itu, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali setelah anak tersebut sampai berumur 18 tahun, jika dan pada waktu itu ia menyatakan keterangan untuk itu.
Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah anak itu berumur 18 tahun kepada Pengadilan Negri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya
2. Ketentuan ayat (1) tidak berlaku dalam hal anak itu-apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain

Pasal 17

Kewarganegaran Republik Indonesia hilang karena:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri, dengan pengertin bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh

kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia, kewarganegaraan Republik Indonesia-nya baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang;

- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- e. Dinyatakan hilang oleh menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal diluar negeri dan dengan hilang dinyatakan hilag kewarganegaraan Republik Indonesianya tidak menjadi tanpa keewarganegaraan;
- f. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari menteri kehakiman.
- g. Tanpa izin terlebih dahulu dari menteri kehakiman masuk dalam dinas Negara asing atau dinas suatu organisasi antar Negara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas Negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warganegara atau abatan dalam inas organisasi antar Negara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan;
- h. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari padanya;
- i. Dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing;
- j. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atas namanya yang masih berlaku;
- k. Lain dari untuk dinas Negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal diluar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara sebelum waktu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi warganegara Republik Indonesia yang berumur dibawah 18 tahun terkecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut diatas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun.

Pasal 18

Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam pasal 17 huruf k memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negri dari tempat tinggalnya dalam satu tahun setelah orang itu bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 19

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan atau diperoleh atas keterangan-keterangan yang tidak benar dapat dicabut kembali oleh instansi yang memberikannya atau oleh instansi yang menerima keterangan itu.

Pasal 20

Barang siapa bukan warganegara Republik Indonesia adalah orang asin.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal I

Seorang perempuan yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/09/1957 dan Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/014/1958 telah diperlakukan sebagai warganegara Republik Indonesia, menjadi warganegara Republik Indonesia, apabila ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II

Seorang yang atau pasal 8, dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal-pasal itu dalam waktu satu tahun sesudah mulai berlakunya Undang-Undang ini, dengan pengertian bahwa suami seorang perempuan yang menjadi warganegara Republik Indonesia termaksud dalam pasal I Peraturan Peralihan tidak dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal 7 ayat (2) lagi. pada saat undang-Undang ini berlaku berada dalam keadaan tertera dalam pasal 7

Pasal III

Seorang perempuan yang menurut perundang-undangan yang sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dengan sendiri warganegara Republik Indonesia, seandainya tidak dalam perkawinan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, jika pada waktu itu ia dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya terputus atau dalam satu tahun dalam Undang-Undang ini berlaku menyatakan keterangan untuk itu kepada Pengadilan Negri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Pasal IV

Seorang yang tidak turut dengan ayahnya atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesiadengan pernyataan menurut

keterangan Undang-Undang yang berlaku sebelum Undang-Undang ini berlaku, karena orang itu, pada waktu ayahnya atau ibunya menyatakan keterangan itu sudah dewasa, sedangkan ia sendiri tidak boleh menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah warganegara Republik Indonesia, jika ia dalam ketentuan ini atau sebelumnya tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh orang tersebut berlaku surut hingga ayah ibunya memperoleh kewarganegaraan itu.

Pasal V

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anak-anak yang antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 oleh orang tuanya ditolak kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, dalam tempo 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dapat mengajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia berusia dibawah 21 tahun; selanjutnya berlaku pasal 4 ayat (3) dan (4).

Pasal VI

Seorang asing yang sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku pernah masuk dalam ketentaraan Republik Indonesia dan memenuhi syarat-syarat yang akan ditentukan oleh menteri Pertahanan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia jika ia menyatakan keterangan untuk itu kepada menteri pertahanan atau kepada pejabat yang ditunjuk olehnya. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut di atas berlaku surut hingga saat orang itu masuk dalam ketentaraan itu.

Pasal VII

Seseorang yang sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dalam dinas tentara asing yang termaksud dalam pasal 17 huruf f atau berada dalam dinas Negara asing atau dinas organisasi antara Negara yang termaksud dalam pasal 17 huruf g, dapat minta izin kepada menteri kehakiman dalam waktu satu tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.

PERATURAN PENUTUP

Pasal I

Seorang warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II

Dalam pengertian kewarganegaraan termaksud semua jenis lindungan oleh sesuatu Negara.

Pasal III

Dalam melakukan Undang-Undang ini, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dianggap turut bertempat tinggal dengan ayah atau ibunya menurut perincian dalam pasal 1 huruf b, c, atau d.

Pasal IV

Barang siapa yang perlu membuktikan bahwa ia seorang warganegara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada pengadilan negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acuan perdata biasa.

Ketentuan ini tidak menguarangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan Undang-Undang lain.

Pasal V

Dari pernyataan-pernyataan yang menyatakan yang menyebabkan diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, oleh pejabat bersangkutan disampaikan salinan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal VI

Menteri Kehakiman Mengumumkan dalam Berita Negara nama-nama orang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal VII

Segala sesuatu yang dilaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal VIII

Undang-Undang ini berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan bahwa aturan-aturan pasal 1 huruf b, sampai huruf j, pasal 2, pasal 17 huruf a, c, dan h, berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 1958

PRESIDEN REPULIK INDONESIA

ttd

SOEKARNO

MENTRI KEHAKIMAN

ttd

G. A. MAENGKOM

Diundangkan
Pada tanggal 1 agustus 1958

MENTRI KEHAKIMAN

ttd

G.A. MAENGKOM

Sumber: Departemen Kehakiman Republik Indonesia

LAMPIRAN 6

Formulir I (Surat Pernyataan untuk menjadi WNI)

(S. 775/4/59)

Pormulir I :

Untuk orang laki-laki yang mempunyai anak belum dewasa yang sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan sah.

Nomor urut,
(Ditulis dan diisi oleh petugas)

Surat pernyataan keterangan
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk
tetap menjadi warganegara Republik Indonesia.

Jang bertanda tangan dibawah ini, saya
Jang tjap (empu) djarinja tertera laki-laki, lahir
di alias pada tanggal
..... ; sekarang bertempat tinggal di
anak dari jang lahir di
kawin sah dengan di
pada tanggal pertalian kawin putus pada tanggal
..... ; mempunyai anak sah/disahkan/diakui/diangkat,
jang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama ;
1. lahir di pada tanggal
2. lahir di pada tanggal
menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewar-
ganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun
untuknja ditolakkan kewarganegaraan Indonesia ;

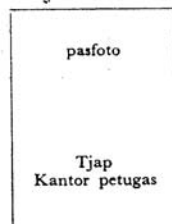
SEKARANG MENJATAKAN KETERANGAN :
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Tandatangan/tjap djari
dinjatakan sah oleh :

....., tanggal
Jang menjatakan keterangan
(tandatangan atau tjap empu djari)
(n a m a)

Keterangan-penerimaan
Ditulis dan diisi oleh petugas.

Diterima di
(tempat kantor petugas)
pada tanggal
oleh
(djabatan petugas)
(tanda tangan petugas)
(nama petugas)



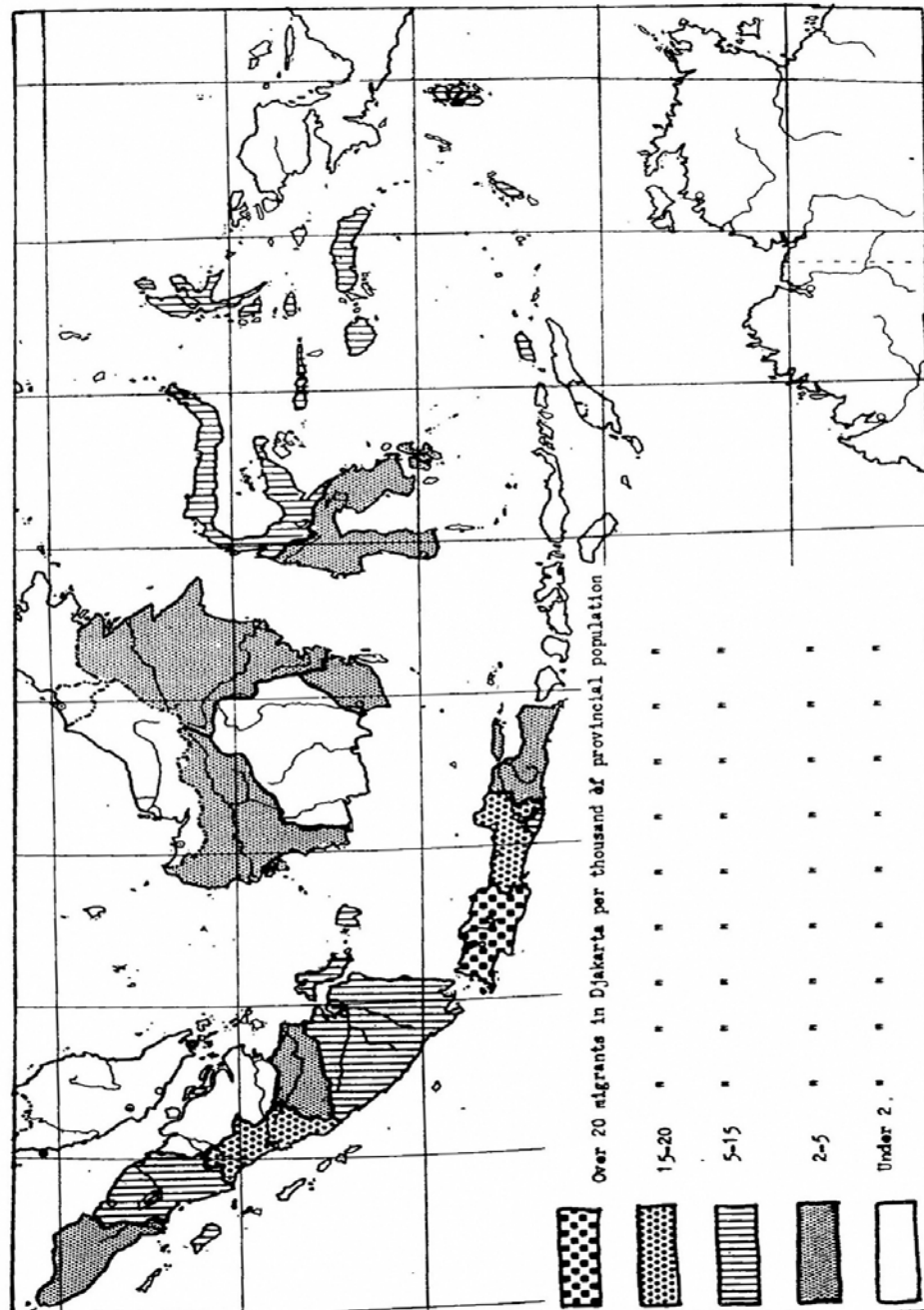
Sumber: Sasmojo, *Menyelesaikan Masalah Dwikewarganegaraan RI-RRT*,
(Jakarta: Djambatan, 1959), hlm. 51.

LAMPIRAN 7**PETA GLODOK JAKARTA**

Sumber : <http://kalika19.multiply.com/journal>
 Keterangan : Peta kawasan Pecinaan di perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat: (1) Sunda Kelapa, (2) Kampung Luar Batang, (3) Museum Maritim Pasar Ikan, (4) Galangan Benteng, (5) Kampung bandan, (6) Kali Besar, (7) Roa Malaka, (8) Taman Fatahilah, (9) Stasiun Kota, (10) Pintu Kecil, (11) Pasar Pagi Perniagaan, (12) Glodok, (13) Pinangsia

LAMPIRAN 8

Peta Intensitas Migrasi ke Jakarta Tahun 1961



Sumber: Lance Castles, *The Ethnic Profile of Jakarta*, (Ithaca: Modern Indonesia Project Cornell University, 1967), hlm. 173. Lihat juga Sensus Penduduk tahun 1961.

LAMPIRAN 9

**KEPUTUSAN PRESEDIIUM KABINET
NO. 127/U/Kep/12/1966**

KETUA PRESEDIIUM KABINET

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka nation dan character building Indonesia, proses asimilasi Warga Negara Indonesia “keturunan asing” dalam tubuh bangsa Indonesia harus dipercepat;
2. Bahwa pergantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia asli akan dapat mendorong usaha asimilasi ini.
3. Bahwa oleh karena itu, bagi Warga Negara Indonesia yang masih memakai nama Cina, yang ingin mengubah namanya yang sesuai dengan nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas yang seluas-luasnya dengan diadakan prosedur yang khusus;

Mengingat:

Undang Undang No. 4 tahun 1961

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERATURAN GANTI NAMA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
YANG MEMAKAI NAMA CINA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Warga Negara Indonesia yang masih memakai nama-nama perseorangan dengan nama keluarga Cina yang ingin mengganti namanya dapat dengan menyatakan keinginannya secara tertulis pada kepala daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk;
2. Nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar, dan tidak boleh melanggar tata susila;
3. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama menteri Kehakiman memberikan tanda penerimaan atas surat pernyataan ganti nama yang dimaksud;
4. Sejak yang bersangkutan menerima surat tanda penerima seperti tersebut dalam ayat 3, ia dapat memakai nama yang baru;
5. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan ia menerima surat tanda penerima seperti yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, tidak terdapat sanggahan atau

gugatan atas pemakaian nama baru itu dari siapapun yang disalurkan melalui Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan maka ia dapat menggunakan nama tersebut dan seterusnya dianggap telah mendapat ijin dari menteri kehakiman seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1961.

BAB II PROSEDUR

Pasal 2

1. Untuk menampung pelaksanaan pergantian nama secara tersebut diatas, diadakan prosedur khusus yang menyimpang dari prosedur biasa untuk jangka waktu tersebut;
2. Pergantian nama menurut ketentuan ini dilakukan dengan cara mengisi pernyataan dalam tiga rangkap, dimana harus dicantumkan : nama lengkap lama, tanggal tempat lahir, serta alamat disamping nama lengkap yang baru dan dari yang bermaksud mengganti namanya;
3. Setiap pernyataan harus dilengkapi dengan Bukti Kewarganegaraan RI yang bersangkutan;
4. Pergantian nama dari anak-anak umur dibawah 18 tahun, dilakukan oleh orang tua atau walinya dalam surat pernyataan yang sama atau surat pernyataan tersendiri;
5. Surat pernyataan iajukan kepada Bupati/ KDH atau Walikota/ KDH setempat untuk didaftar, diberikan nomor untuk didaftar dan disahkan;
6. Satu hlai dikirim ke menteri kehakiman RI, di Jakartamelalui kantor Bupati/Walikota KDH setempat yang bersangkutan
Satu helai pernyataan dikembalikan kepada orang yang bersangkutan, untuk diusahakan perubahan Akte Kelahirandan; jika ada; Akte perkawinan pada Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan;
7. Surat pernyataan yng telah didaftarkan diberi nomor dan disahkan oleh Bpati/Walikota KDH yang bersangkutan mempunyai kekuatan hokum yang sah;

BAB III LAIN-LAIN

Pasal 3

1. Dalam melaksanakan keputusan ini para Bupati, Walikota KDH yang bersangkutan supaya menyediakan fasilitas-fasilitas yang ringan-ringannya kepada para pengganti nama guna memperlancar prosedur;
2. Untk biaya administrasitidak boleh dipungut biaya lebih dari Rp. 25,- untuk setiuap pernyataan;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negri;

4. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1967 sampai dengan 31 Maret 1968.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1966

SEKRETARIAT PRESIDUM
BIRO TATA USAHA
Pd. Kepala Bagian Reproduksi

PRESEDIUM KABINET AMPERA
KETUA

Drs. Soedharto

Soeharto
Jendral TNI

Sumber : ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)

LAMPIRAN 10

INSTRUKSI MENTRI DALAM NEGERI

NO. 6 TAHUN 1969
TENTANG
GANTI NAMA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mensukseskan :
 - a. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 dan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep./12/1966.
 - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 1967 No. 4 tahun 1967.
 Perlu diikutsertakan secara aktif masyarakat luas.
2. Bahwa inisiatif untuk hal harus datang di Gurbenur KDH/Bupati KDH/Walikota KDH.

Mengingat :

1. Sumpah Pemuda 1928.
2. Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep./12/1966
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966
5. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tanggal 28 Januari 1967 No, Pemudes, 51/I/3.JA.2/2/5.

MENGINTRUKSIKAN

Kepada :

1. Gurbenur KDH
2. Bupati KDH
 Seluruh Indonesia

Untuk :

1. member briefing kepada partai-partai politik, organisasi-organisasi massa, dan badan-badan social (diantaranya gereja dan lain sebagainya)
 Camat/Lurah/Kepala Lingkungan/Kepala RW/RK/kepala RT, sesuai pedoman yang terlampir tentang:
 - a. Makna penggantian nama untuk WNI yang masih lazim disebut :Keturunan Cina”.
 - b. Prosedur pergantian nama, seta mengajak Orpol, Ormas, badan-badan sosial dan sebagainya dan mengintruksikan Camat/Lurah/Kepala Lingkungan/Kepala RW/RK/kepala RT untuk member bantuan yang seluas-luasnya kepada mereka yang mengganti namanya dalam hal:
 - a. Memilih nama Indonesia yang tepat.
 - b. Melancarkan prosedur penggantian nama.

2.

- a. Mengadakan hanya dua macam register penduduk, yakni sebuah untuk Warga Negara Indonesia, dan sebuah lagi untuk Warga negar Asing.
- b. Meniadakan, penggolongan-penggolongan dalam golongan Eropa, Timur Asing dan Bumiputra bagi seluruh penduduk Indonesia.
- c. Penggolongan ini-kecuali Boemiputra –tetap berlaku bagi Warga Negara Asing.

Untuk memudahkan briefing ini, kami sertakan pedoman terlampir.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal ditetapkan : 2 Maret 1967

MENTRI DALAM NEGERI

BASUKI RACHMAT
Letjen. TNI

Sumber : ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)

LAMPIRAN 11

Tabel 1. Jakarta berdasarkan suku-bangsa tahun 1960

No.	Asal daerah/suku-bangsa	Jumlah	Presentase
I	Pribumi		
1.	Betawi	655.400 Orang	22,9
2.	Sunda	952.500 Orang	32,8
3.	Jawa dan Madura	737.700 Orang	25,4
4.	Aceh	5.200 Orang	0,2
5.	Batak	28.900 Orang	1,0
6.	Minangkabau	60.100 Orang	2,1
7.	Palembang	34.900 Orang	1,2
8.	Banjar	4.800 Orang	0,2
9.	Makasar/bugis	17.200 Orang	0,6
10.	Manado	21.000 Orang	0,7
11	Ambon dan Irian	11.800 Orang	0,4
12.	Nusa Tenggara Timur	4.800 Orang	0,2
13.	Nusa Tenggara Barat	1.300 Orang	0,0
14.	Bali	1.900 Orang	0,1
15.	Melayu	19.800 Orang	0,7
16.	tidak diketahui	38.600 Orang	1,3
II	Non-Pribumi		
1.	Tionghoa	294.000 Orang	10,1
2.	Lain-lain	16.500 Orang	0,6
	Jumlah Penduduk	2.906.500 Orang	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta 1961.

Tabel 2. Jumlah permohonan/naturalisasi pada masyarakat Tionghoa di DKI Jakarta per 31 Desember 1960.

Wilayah	WNI keturunan Tionghoa	Jumlah pemohon baru	W. N. A. Tiongkok	Stateless (Tanpa Kewarganegaraan)
Jakarta Pusat	50.578 jiwa	16.431 jiwa	41.875 jiwa	4.236 jiwa
Jakarta Selatan	11.523 jiwa	3.815 jiwa	6.548 jiwa	997 jiwa
Jakarta Timur	9.317 jiwa	2.993 jiwa	2.356 jiwa	898 jiwa
Jakarta Utara	30.823 jiwa	19.512 jiwa	50.327 jiwa	3.328 jiwa
Jakarta Barat	19.411 jiwa	13.458 jiwa	10.546 jiwa	2.984 jiwa

Sumber : Berita Negara tahun 1955. No. 234, koleksi Departemen Kehakiman Republik Indonesia.